



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
WISATA TOGETHER



LAPORAN KINERJA

PUSAT DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**TAHUN
2025**

✉ layananusdatin@kkp.go.id
🌐 portaldata.kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Wata'alla atas rahmat-Nya, ridho'-Nya, dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025, terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja, dimana 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 2 (dua) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal yang telah memberikan arahan, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025 ini. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D.
NIP. 197208122001121002

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT DATA DAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Data dan Informasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro Perencanaan

Andy Artha Donny Oktopura
NIP. 197910292003121004



Gambar 1. Infografis Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan AKIP di Pusdatin dan menindaklanjuti rekomendasi Bapak Sekretaris Jenderal pada Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi, agar melakukan upaya antara lain: 1) Meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dari Tahun 2024; 2) Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur; 3) Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja.

Pusdatin perlu menindaklanjuti rekomendasi diatas, dengan meningkatkan capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada tahun 2025, berdasarkan **Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029**, sasaran kinerja Pusat Data dan Informasi difokuskan pada **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, dan Informasi Kelautan dan Perikanan serta Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, dan Informasi**. Dan sebagai penguatan tata kelola data untuk mendukung kebijakan **Ekonomi Biru**. Untuk mewujudkan Sasaran Kinerja tersebut, Pusdatin mempunyai 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dan merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 2 (dua) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja/target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) indikator kinerja dengan persentase capaian di atas 100% sebanyak 16 (enam belas) indikator kinerja; 2) indikator kinerja dengan persentase capaian tepat 100% sebanyak 4 (empat) indikator kinerja; dan 3) tidak ada indikator kinerja dengan persentase capaian di bawah 100%.

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Pusdatin Tahun 2025 pada aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*) diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **106,84%**, capaian tersebut mengalami penurunan 1,04% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan capaian sebesar 107,88% hal ini disebabkan oleh indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP mengalami penurunan persentase capaian sebesar 32,50% dikarenakan terdapatnya perubahan dalam instrumen penilaian tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dimana aspek tata kelola KKP berada pada posisi rendah meskipun pelaksanaan kegiatan keamanan siber telah dilaksanakan tetapi tanpa adanya kebijakan yang menjadi dasar.

Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Desember 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp91.136.741.000,-** dengan pagu efektif senilai **Rp146.037.602.000,-** dan telah direalisasikan secara akrual senilai **Rp145.939.649.180,-** atau persentase realisasi total anggaran efektif adalah sebesar **99.93%**, dengan sisa anggaran total senilai **Rp97.952.820,-**.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya, Pusdatin telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Penilaian Mandiri AKIP 2025, sebagai berikut:

1. Meningkatkan capaian kinerja tahun 2025 dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan capaian IKU, antara lain:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP terkait identifikasi serta penyepakatan data utama, baik prioritas maupun non-prioritas. Hasil dari kegiatan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Data Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi khusus untuk memperbaiki proses pengumpulan dan validasi data guna meningkatkan skor indeks SDI di penilaian selanjutnya;
 - c. mengimplementasikan aplikasi Portal Data KKP. Aplikasi ini memungkinkan seluruh proses pendataan mulai dari input, validasi, pengolahan agregasi, hingga penyajian data. Pusdatin juga telah melakukan beberapa kali sosialisasi penggunaan Portal Data KKP kepada masing-masing Unit Eselon I;

- d. melaksanakan proses registrasi ulang *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai respon ancaman siber yang terus berkembang. Proses tersebut telah berjalan dengan baik dan ditandai dengan diterbitkannya Surat Tanda Registrasi (STR) CSIRT KKP yang baru, yang disahkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 18 November 2025, dengan masa berlaku selama tiga tahun ke depan;
- e. melaksanakan uji keamanan atau *Vulnerability Assessment* (VA) terhadap aplikasi-aplikasi di lingkup KKP guna memastikan tingkat kerentanan dan meningkatkan ketahanan aplikasi. Beberapa aplikasi yang telah melalui proses VA antara lain Aplikasi KNMP BHKLN, JDIH, PTSA, serta Aplikasi POP BHKLN atau *Campaign Media Management*;
- f. memperkuat sinergi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas di bidang keamanan siber, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara. Melalui kanal komunikasi CSIRT KKP, Pusdatin menerima informasi terkait aktivitas berbahaya pada beberapa aset KKP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemblokiran domain dan alamat IP yang teridentifikasi, serta koordinasi dengan pengelola aplikasi untuk menutup celah kerentanan melalui pemutakhiran *framework* ke versi yang lebih aman dan terkini;
- g. melakukan Evaluasi Akses Akun VPN KKP dengan penguatan pengamanan akses terhadap aset elektronik KKP dengan menerapkan mekanisme penggunaan VPN versi terbaru dengan metode IPSEC-VPN, pegawai KKP yang bertugas sebagai pengelola sistem elektronik maupun pihak ketiga yang berafiliasi dengan pengelolaan aplikasi diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang akun VPN;
- h. melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus uji fungsi *Media Campaign* Budidaya Ikan Nila Salin sebagai upaya memastikan efektivitas media dalam mendukung penyebaran informasi, edukasi, dan promosi kegiatan budidaya ikan nila salin kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat sasaran;
- i. melakukan finalisasi Modul Sistem *e-logbook* Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- j. menyusun program pelatihan untuk Tahun Anggaran 2026 bagi jabatan fungsional yang menjadi binaan Pusdatin, yaitu Pranata Komputer, Statistisi, Surveyor

Pemetaan, dan Analis Data Ilmiah. Program ini selaras dengan arah pengembangan kompetensi ASN melalui *Corporate University* KKP dibawah binaan BPPSDMKP, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ASN secara sistematis dan berkelanjutan;

- k. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KKP Tahun 2025 sebesar 92,49 (A) yang merupakan nilai IKM rata-rata atas seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) periode Triwulan I s.d III Tahun 2025. Sementara itu, validasi atas SKM Triwulan IV juga telah diselesaikan dengan nilai IKM KKP sebesar 93,19 kategori A (Sangat Baik). Nilai IKM KKP telah memenuhi target pada RB Tahun 2025 dengan presentase capaian sebesar 101,5%;
- l. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional oleh Kementerian PANRB telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) KKP 4,80 kategori Pelayanan Prima. Capaian ini berhasil mempertahankan IPP KKP Tahun 2024 yang juga 4,80. Sementara itu, PEKPPP Mandiri Instansional yang dilakukan pada 41 OP Lokus dan 61 OP Nonlokus juga telah tuntas dengan capaian IPP sebesar 4,28 kategori Sangat Baik;
- m. Hasil pemetaan tingkat kematangan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) KKP melalui pengisian kertas kerja telah tuntas dilaksanakan dengan capaian 4,19 (kategori Mahir);
- n. Hasil pemantauan pengendalian gratifikasi Pusat Data dan Informasi periode tahun 2025 yaitu nihil pelapor, menjadi bentuk komitmen kesadaran untuk menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan melaporkannya apabila tidak dapat dihindari, sehingga nilai integritas dan profesionalisme benar-benar tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas;
- o. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meraih **Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas)** untuk kategori Kementerian/Lembaga melalui inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan IGT melalui Portal Data”;
- p. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh piagam penghargaan Opini Ombudsman kategori Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan opini “**Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi**”

2. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur dengan melakukan dialog kinerja antar Tim Kerja lingkup Pusdatin yang merupakan forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja yang melibatkan seluruh Tim Kerja di lingkungan Pusdatin sebagai evaluasi implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang tepat untuk memastikan setiap pegawai berkontribusi terhadap kinerja organisasi dalam pencapaian sasaran strategis dan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dalam dialog kinerja Kapusdatin melakukan pembagian peran hasil antara pegawai lingkup Pusdatin untuk dirincikan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja, antara lain:
 - a. membangun portal pegawai yang terintegrasi ke dalam Portal KKP dan Aplikasi MyASN, setiap pegawai dapat meng-*update* data pribadi pada aplikasi MyASN sehingga *database* portal pegawai KKP lebih lengkap dan *up to date*. Data yang perlu di-*update* antara lain berupa Satyalancana Karya Satya (SLKS) X dan/atau XX dan/atau XXX tahun, juga sertifikasi untuk peningkatan IPASN;
 - b. finalisasi implementasi sistem Aplikasi *Campaign Media Management* sebagai media pengelolaan diseminasi informasi;
 - c. melakukan langkah-langkah reaktif dalam penanganan insiden keamanan siber yang terjadi pada aset KKP. Sepanjang triwulan keempat 2025, tercatat beberapa insiden yang berhasil ditangani, antara lain dua serangan defacement pada aplikasi Integrasi DJPT, satu insiden serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS) pada aplikasi e-Presensi, serta dua laporan *Bug Bounty* terkait celah kerentanan pada aplikasi TPKP Nasional yang dikelola oleh DJPSDKP;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka integrasi data statistik dan data spasial di portal data dan *command center* untuk mewujudkan data yang lengkap dan komprehensif serta pengayaan data dan informasi untuk berbagi pakai;
 - e. melakukan pembangunan sistem *Reconnaissance* untuk memonitor program strategis dan proyek prioritas nasional di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan

teknologi *Digital Twin*, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis data;

- f. integrasi data spasial Portal Data dan *Command Center* termasuk di dalamnya data PKKPR dan data terumbu karang nasional;
- g. identifikasi data perizinan ruang laut khususnya reklamasi yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan monitoring bangunan laut berbasis citra radar;
- h. Pusdatin telah mengkoordinir Layanan Konsultasi Tatap Muka di PTSA KKP dari bulan Januari s.d Desember 2025 sebanyak 1.555 pelayanan dan dengan jumlah pengunjung sebanyak 1.182 orang;
- i. melakukan penyusunan perubahan perhitungan pada indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan semula 3 (tiga) variabel menjadi 4 (empat) variabel dengan bobot yang disesuaikan berdasarkan Eselon I lain, yaitu:
 - 1) persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi Kusuka;
 - 2) persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi;
 - 3) persentase Tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang Terjamin Kualitasnya;
 - 4) persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi.
- j. melakukan penyusunan perubahan target dan perhitungan pada indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP untuk memastikan keselarasan antara target kinerja dengan metode, parameter, dan bobot penilaian yang telah diperbarui berdasarkan surat Deputi Bidang Keamanan Siber dan Pemerintahan dan Pembangunan BSSN Nomor T.1984/BSSN/D3/KS.01.02/08/2025, tanggal 22 Agustus 2025.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja Utama bersama Tim SAKIP Pusat Data dan Informasi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja Tahun 2025. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, sehingga pelaksanaan kinerja Pusdatin pada Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin	8
1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Informasi	9
1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional	12
1.4 Potensi	13
1.5 Tantangan	15
1.6 Kendala	16
1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	16
BAB 2	19
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029	19
2.2 Program dan Kegiatan	23
2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	23
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi	25
2.5 Keselarasan Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Pusdatin 2025	34
BAB 3	40
AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	43
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja	46
3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	46

3.3.2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	57
3.3.3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim.....	63
3.3.6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	86
3.3.7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	91
3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	96
3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	102
3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	106
3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP.....	109
3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP	112
3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	123
3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP	128
3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin	133
3.3.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	138
3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	142
3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	145
3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	152
3.3.20 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin	155
3.4 Realisasi Anggaran.....	156
BAB 4	159
PENGHARGAAN DAN KEGIATAN LAIN	159
Prestasi dan Penghargaan.....	159
BAB 5	164
KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	164
5.1 Kesimpulan.....	164
5.2 Rencana Tindak Lanjut	166
LAMPIRAN	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Fungsi Tim Kerja Lingkup Pusdatin	4
Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin	9
Tabel 3. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin	11
Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusdatin.....	12
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin	13
Tabel 6. Indikasi Resiko Terhadap Pencapaian SS.....	20
Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2025	24
Tabel 8. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Pusat Data dan Informasi Tahun 2025	31
Tabel 9. Indikator Kinerja Pusdatin pada Rencana Strategis KKP 2025-2029	35
Tabel 10. Keselarasan Renstra Setjen Tahun 2025-2029, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.	37
Tabel 11. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Triwulan IV Tahun 2025	41
Tabel 12. Capaian Kinerja Anggaran dalam Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2025	43
Tabel 13. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP Tahun 2025	48
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP Tahun 2025	48
Tabel 15. Ukuran Kinerja Penilaian Survei Layanan Aplikasi Sistem Informasi	58
Tabel 16. Rincian hasil penilaian Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	59
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2025	61
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim Tahun 2025.....	64
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim Tahun 2025.....	65
Tabel 20. Skor Kinerja Aplikasi Command Center Tahun 2025	67
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Tahun 2025	78
Tabel 22. Capaian Indeks SPBE KKP.....	79
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025	81
Tabel 24. Hasil Penilaian KIPP KKP Tahun 2025.....	82
Tabel 25. Daftar perubahan persyaratan penilaian proposal inovasi tahun 2024 dengan tahun 2025.....	83

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	88
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi Tahun 2025	92
Tabel 28. Instrumen Kontrol IKASANDI v2.1	98
Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP Tahun 2025	100
Tabel 30. Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI KKP	104
Tabel 31. Nilai Indeks Aspek SDI KKP.....	104
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Triwulan IV 2025	104
Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP Tahun 2025.....	107
Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP Tahun 2025.....	111
Tabel 35. Linimasa PEKPPP Nasional Tahun 2025	115
Tabel 36. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) yang menjadi Lokus Mystery Shopper pada PEKPPP Mandiri Instansional	116
Tabel 37. Perbandingan Hasil Indeks Pelayanan Publik KKP	118
Tabel 38. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 dan Tahun 2025...	121
Tabel 39. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Tahun 2025	125
Tabel 40. Jenis layanan OSS dan Non OSS per Eselon I KKP	127
Tabel 41. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan IV Tahun 2025.....	129
Tabel 42. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan IV Tahun 2025	130
Tabel 43. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan IV 2025	130
Tabel 44. Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin 2025	135
Tabel 45. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin Tahun 2025.....	136
Tabel 46. Rincian Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Semester II Tahun 2025.....	139
Tabel 47. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP Triwulan IV 2025	139

Tabel 48. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	143
Tabel 49. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2025	143
Tabel 50. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	146
Tabel 51. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	147
Tabel 52. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	147
Tabel 53. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	148
Tabel 54. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	148
Tabel 55. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran	149
Tabel 56. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Semester II 2025.....	150
Tabel 57. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025	153
Tabel 58. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin Tahun 2025	153
Tabel 59. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Tahun 2025.....	155
Tabel 60. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Triwulan IV Tahun 2025.....	157
Tabel 61. Lampiran Dokumen Pendukung pada Rencana Aksi Pusdatin TW IV 2025.....	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Infografis Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2025.....	iii
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2025.....	4
Gambar 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	10
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Gambar 6. Dialog Kinerja Pusdatin TA 2025	29
Gambar 7. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun 2025	40
Gambar 8. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun 2025	41
Gambar 9. Kegiatan Pendampingan Sosialisasi dan Gerai Pendataan Nelayan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.....	49
Gambar 10. Kegiatan Pendampingan Sosialisasi dan Gerai Pendataan Nelayan di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara	50
Gambar 11. Rapat Sosialisasi Sosialisasi Portal Data KKP Modul Valnas Bidang Perikanan Budi Daya	50
Gambar 12. Validasi Nasional Semester I Tahun 2025.....	51
Gambar 13. Kegiatan Penilaian Tahap II Bhumandala Inovasi Pemanfaatan IGT	52
Gambar 14. Kegiatan Penerimaan Penghargaan Bhumandala Kanaka.....	52
Gambar 15. Piagam Penghargaan Bhumandala Kanaka	53
Gambar 16. Pendampingan survei kontrol kualitas IGT Lahan Garam Kabupaten Pidie, Aceh	54
Gambar 17. Pusdatin memberikan materi Bimbingan Teknis.....	55
Gambar 18. Pendampingan Penggunaan Portal KKP di SKIPM Batam.....	62
Gambar 19. Kunjungan Instansi lain ke Command Center	75
Gambar 20. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Update Fitur Pengawasan Command Center	76
Gambar 21. Diskusi Regulasi dan Kesesuaian OSS dengan Perizinan Berusaha pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.....	80
Gambar 22. Piagam Penghargaan Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025.....	84
Gambar 23. Piagam Penghargaan Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025.....	85
Gambar 24. Indeks Nilai Kematangan pada Instrumen IKASANDI v2.1	98

Gambar 25. Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) KKP	100
Gambar 26. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI	103
Gambar 27. Nilai Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE pada Aplikasi SIA SPBE.....	107
Gambar 28. Pembahasan Clearance dengan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian Bappenas.....	108
Gambar 29. Kegiatan pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial	112
Gambar 30. Pendampingan dan pengisian F02B atas Lokus PEKPPP Nasional pada BPKIL Serang	120
Gambar 31. Peninjauan Sarana Prasarana Pelayanan pada BPKIL Serang	121
Gambar 32. Desk Evaluation PEKPPP Tahun 2025 oleh Evaluator Kementerian PANRB	121
Gambar 33. Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman	126
Gambar 34. Validasi SKM KKP TW IV Tahun 2025	132
Gambar 35. Sosialisasi Pembaharuan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM KKP	132
Gambar 36. Evaluasi Rencana Aksi TW IV 2025 dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025.....	137
Gambar 37. Rapat Pembahasan PKS Setjen KKP dengan Pushidrosal TNI AL.....	140
Gambar 38. Rapat Pembahasan PKS Pusdatin KKP dengan Dinas Perikanan Jepara	141
Gambar 39. Koordinasi Penyelesaian temuan BPK Tahun 2025 lingkup Pusdatin.....	144
Gambar 40. Pelatihan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tematik Estimasi Karbon Biru Mangrove dan Lamun yang diselenggarakan oleh Geoaccess Indonesia	151
Gambar 41. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Tahun 2025	158
Gambar 42. Penghargaan Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Kementerian PANRB Tahun 2024	159
Gambar 43. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 oleh Ombudsman RI	160
Gambar 44. Penyerahan Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup KKP Tahun 2024 oleh Sekretariat Jenderal KKP	161
Gambar 45. Piagam Penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2025	162

Gambar 46. Pengumuman Penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 oleh KEMENPANRB	163
--	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusat Data dan Informasi atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi mengacu pada 1). Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 3). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP Instansi Pemerintah, 4). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di KKP, 5). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029, 6). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja KKP 2025, 7). Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025-2029, 8). Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal yang menjelaskan tentang capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap capaian kinerja dan memberikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Pusdatin KKP (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan) memberikan dukungan dalam arah kebijakan KKP 2025-2029 dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan data serta informasi yang akurat dan relevan. Dukungan ini membantu KKP dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, melalui elaborasi:

1) **Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pusdatin KKP bertugas mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber, termasuk data statistik perikanan, data produksi, data pasar, data lingkungan laut, dan data terkait isu-isu strategis lainnya. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna.

2) **Pelayanan Informasi**

Pusdatin KKP menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada internal KKP (pimpinan, jajaran, dan staf) serta eksternal (masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya). Informasi ini dapat berupa laporan, analisis, grafik, atau format lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3) **Dukungan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan**

Data dan informasi yang disediakan Pusdatin KKP digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan KKP. Ini termasuk perencanaan anggaran, penentuan target, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan strategis.

4) **Evaluasi dan Peningkatan**

Data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Pusdatin KKP juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan KKP. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja KKP di masa depan.

5) **Integrasi dengan Sistem Informasi Nasional**

Pusdatin KKP juga berupaya untuk mengintegrasikan sistem informasi KKP dengan sistem informasi nasional lainnya, seperti sistem informasi pangan, sistem informasi lingkungan, dan sistem informasi lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan informasi di seluruh sektor pemerintahan.

Contoh Dukungan Pusdatin KKP, antara lain:

1) **Data Perikanan**

Pusdatin KKP menyediakan data produksi ikan, jenis ikan, wilayah perikanan, dan data terkait lainnya yang digunakan untuk perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya perikanan, dan pengendalian *illegal fishing*.

2) **Data Lingkungan**

Pusdatin KKP menyediakan data terkait kondisi laut, kualitas air, dan kondisi ekosistem pesisir yang digunakan untuk perencanaan konservasi, pengelolaan sumber daya pesisir, dan mitigasi bencana.

3) Data Pasar

Pusdatin KKP menyediakan data harga ikan, volume perdagangan, dan data terkait lainnya yang digunakan untuk perencanaan pemasaran, pengelolaan pasar, dan pengendalian inflasi harga ikan.

Dengan dukungan Pusdatin, melalui Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025 sebagai dokumen evaluasi dan capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP.

1.2 Tujuan

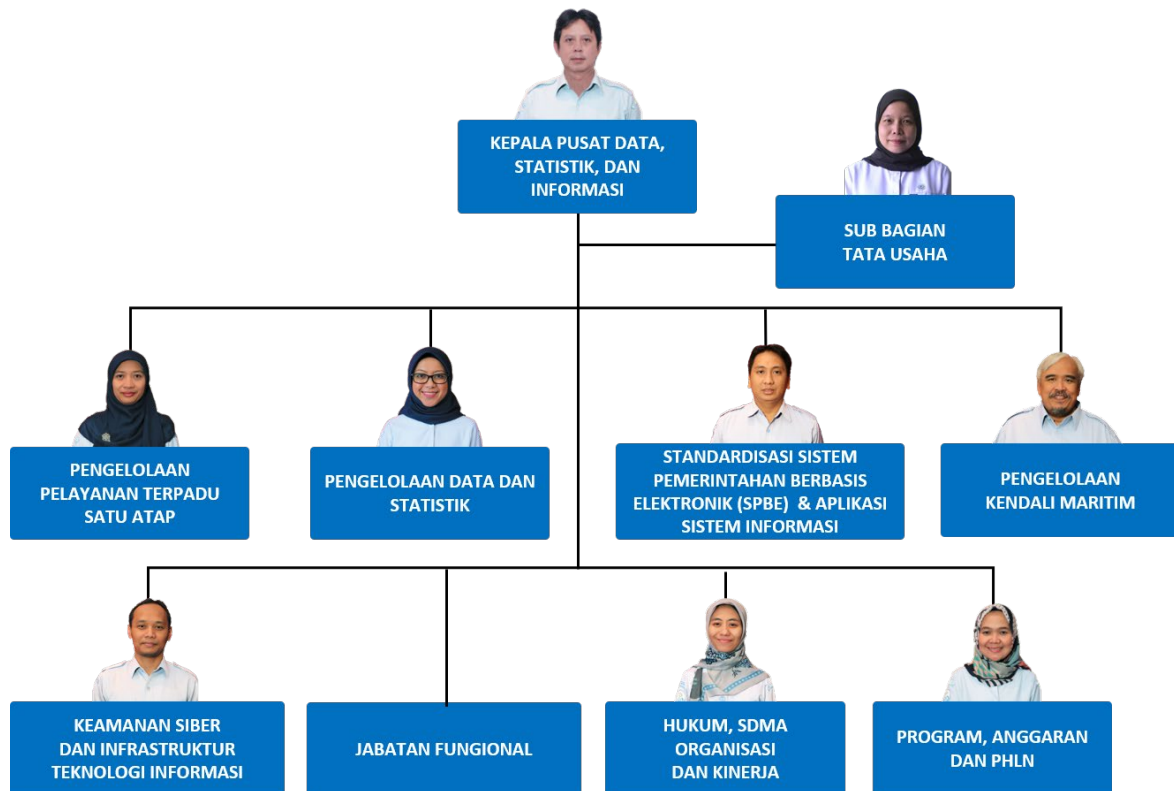
Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin, sasaran strategis kegiatan/program, arah kebijakan yang ditetapkan, dan sebagai laporan atas realisasi, capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin

Sesuai dengan Surat Tugas Kapusdatin Nomor B.1997/SJ.8/KP.440/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, dan dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan Pusdatin memiliki 7 (tujuh) Tim Kerja. Dan

berdasarkan SK Menteri KP No. 3/MEN-SJ/KP.430/V/2025, tanggal 7 Mei 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka telah ditetapkan Kasubbag Tata Usaha pada Pusdatin.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2025

Pada tabel berikut adalah Tim Kerja lingkup Pusat Data dan Informasi Tahun 2025 beserta uraian fungsinya:

Tabel 1. Uraian Fungsi Tim Kerja Lingkup Pusdatin

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Kasubbag Tata Usaha	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen); b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan draf perjanjian kerjasama;

			c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dalam hal kearsipan dan layanan pimpinan pada Pusat Data dan Informasi.
2.	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	Pemenuhan indeks pelayanan publik KKP.
		Tingkat kepatuhan Standar Masyarakat (SKM) KKP (nilai) Pelayanan Publik KKP (nilai)	a. Dukungan pengelolaan pelayan terpadu satu atap di lingkungan KKP; b. Pelaksanaan dan pemenuhan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP.
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan b. Pelaksanaan pembangunan zona integrasi menuju WBK/WBBM.
3.	Pengelolaan Data dan Statistik	Tingkat Kepatuhan Pengelola data Kelautan dan Perikanan (persen)	a. Melakukan standarisasi dan statistik, pengelompokan data, dan metodologi statistik, serta pengelolaan master data kelautan dan perikanan; b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi data statistik kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi, analisis, penyajian, penyebarluasan data kelautan dan perikanan; d. Penyusunan dan analisis data tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan; dan e. Melakukan monitoring dan evaluasi data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	a. Melakukan pengelolaan data kelautan dan perikanan mendukung implementasi Satu Data Indonesia; b. Melaksanakan tugas sebagai Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Melakukan pemenuhan tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	Melakukan pemenuhan indeks tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP.
4.	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan Aplikasi Sistem Informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	a. Melakukan pemenuhan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP; b. Koordinasi pelaksanaan <i>clearance</i> anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait; c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan KKP.
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan	Melakukan pemenuhan implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP.

		Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	
		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka evaluasi layanan aplikasi; b. Melakukan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik lingkup KKP; c. Melakukan monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
		Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	a. Melakukan pemenuhan indeks layanan sistem dan teknologi informasi; b. Melaksanakan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP.
5.	Pengelolaan Kendali Maritim	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi merupakan sistem untuk menyediakan data dan informasi yang terpusat untuk dapat menggambarkan situasi secara real time; b. Melakukan pengelolaan data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Melakukan visualisasi data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis data untuk kebutuhan <i>decision support system</i>; d. Melakukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset <i>command center</i> dan komputasi lingkup KKP; e. Melakukan integrasi sistem informasi pada unit kerja eselon I dan data citra berbasis satelit yang dimiliki oleh KKP; f. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase layanan sistem informasi pengelolaan kendali maritim.
6.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)	Persentase pemenuhan data citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan data citra satelit sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah

			ada, serta data citra berbasis satelit yang dimiliki KKP.
		Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada.
7.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	a. Melakukan kegiatan keamanan siber dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; b. Melakukan kegiatan pengelolaan bandwidth dan infrastruktur jaringan KKP pusat.
8.	Hukum, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Kinerja	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Nilai Rekonsiliasi/Verifikasi Kinerja Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka perencanaan, pengukuran SAKIP, penyusunan laporan kinerja per triwulan; c. Melakukan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan tahunan.
		Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin (indeks)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin; b. Mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan Uji Kompetensi pegawai lingkup Pusdatin c. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional dibawah binaan/PIC Pusdatin
9.	Program, Anggaran dan PHLN	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan PIPK.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin.

		Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase realisasi penyerapan anggaran Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan anggaran APBN/Pinjaman Hibah Luar Negeri; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait pengadaan barang dan jasa; b. Penyiapan laporan keuangan dan BMN, pencatatan BMN.
--	--	--	---

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Pusat Data, Statistik, dan Informasi berubah nomenklatur menjadi Pusat Data dan Informasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;

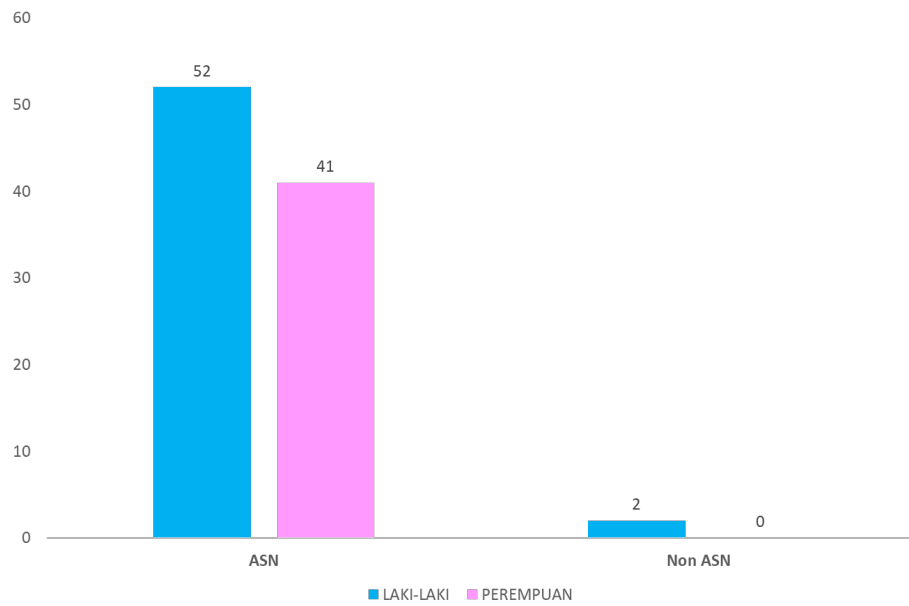
- f. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem informasi geospasial sumber daya kelautan perikanan;
- g. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi keamanan siber;
- h. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Data dan Informasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Pusat dan informasi.

1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Informasi

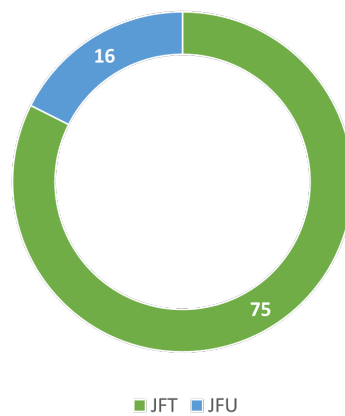
Dalam rangka mengemban tugas, Pusdatin didukung oleh 95 orang pegawai yang terdiri dari 93 ASN dan 2 Non ASN. Sedangkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 75 orang dan 16 orang Pegawai Fungsional Umum (JFU), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin

Jabatan	Jumlah (orang)
Eselon II	1
Eselon IV	1
Jabatan Fungsional Tertentu	76
Pelaksana	14
Pelaksana Paruh Waktu	1
PJLP/Non ASN	2
Total	95



Gambar 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



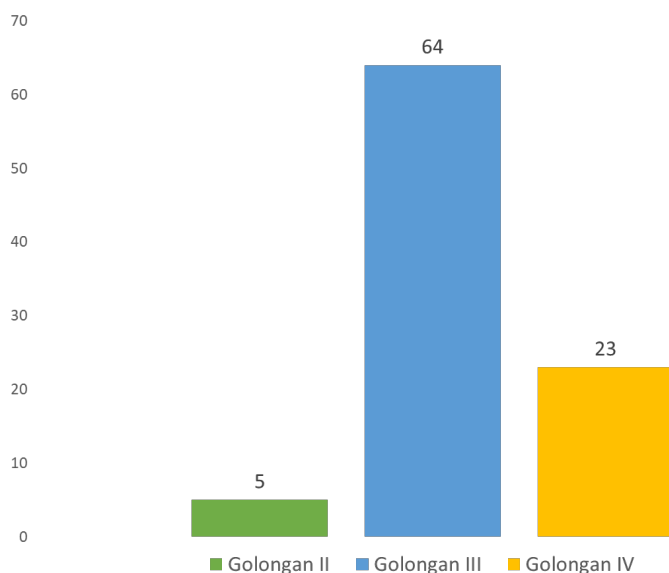
Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai ASN di Pusdatin mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin

NAMA JABATAN/JENJANG JFT	AHLI MADYA			AHLI MUDA		AHLI PERTAMA			MAHIR		TERAMPIL		
PENDIDIKAN	S1	S2	S3	S1	S2	D4	S1	S2	S1	SMA	D3	S1	SMA
ANALIS KEBIJAKAN					1								
ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN		1											
ANALIS SDM							1						
ARSIPARIS									1				
PENATA PERIZINAN		1				1	2						
PERENCANA		1		1									
PRANATA KEUANGAN APBN													1
PRANATA KOMPUTER	3	7		4	5		21		1	1			
STATISTISI	2	4		1	2		7	1					
SURVEYOR PEMETAAN			2				3				1		

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 23 orang golongan IV, 64 orang golongan III, dan 5 orang golongan II.



Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Distribusi aparatur Pusdatin baik Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN sesuai dengan Status Pegawai dan pendidikan pada Tim Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusdatin

TIM KERJA	ASN/ SMA	ASN/ D1	ASN/ D3	ASN/ D4	ASN/ S1	ASN/ S2	ASN/ S3	ASN/ SMA	Non ASN/ D3	Non ASN/ S1	Non ASN/ SMA
KAPUSDATIN							1				
TU			1		1	1				2	
DATA DAN INFORMASI			1		13	5	2				
HSDMAOK	1				1	2		1		3	
KITI			1		4	1		1	1	1	1
PAPHLN		1	1		3	1		2		2	2
PKM					10	3					
PTSA				1	3	1				1	
SPASI					11	8					

1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Kerja Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, Analis Kebijakan, Surveyor Pemetaan, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, Penata Perijinan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Pusdatin Tahun 2025.

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin

Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					Total
	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil	
Analisis Kebijakan		1				1
Analisis Pengelola Keuangan APBN	1					1
Analisis SDM			1			1
Arsiparis				1		1
Penata Perizinan	1		3			4
Perencana	1	1				2
Pranata Keuangan APBN					1	1
Pranata Komputer	10	8	22	2		42
Statistisi	6	4	8			17
Surveyor Pemetaan	2		3		1	6
Total	21	13	37	3	2	76

Catatan : Termasuk PPPK waktu paruh dan PJLP

1.4 Potensi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dengan jumlah 95 orang, jabatan fungsional yang diampu oleh Pusdatin antara lain: Pranata Komputer 42 orang, Statistisi 17 orang, 6 orang Surveyor Pemetaan, 4 orang Penata Perizinan, selebihnya merupakan Jabatan Fungsional tertentu dan pelaksana sebagai pendukung organisasi. Dengan SDM yang ada saat ini, berdasarkan tugas dan fungsi Pusdatin, dan pagu efektif senilai Rp147.087.602.000,- , maka Pusdatin dapat memfasilitasi :

- a. Ruang *Command Center* KKP, yang berfungsi menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan.
 - b. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), yang bertugas sebagai unit pengelola perizinan perikanan dan kelautan terpadu lingkup KKP.
 - c. Portal Satu Data KP, yang berfungsi menyajikan data statistik kelautan dan perikanan secara *real time* dalam bentuk *dashboard*.
 - d. Aplikasi Portal *Collaboration Office*, yang mempunyai fungsi sebagai portal korespondensi persuratan, administrasi pegawai dan tanda tangan elektronik pada SK produk hukum KKP.
 - e. Aplikasi Portal Bantuan Pemerintah, yang berfungsi menyajikan data bantuan KKP kepada pelaku usaha perikanan dan kelautan.
 - f. Penguatan keamanan siber lingkup KKP, melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi pendukung keamanan siber kantor KKP baik dipusat maupun di UPT.
2. Pada BPISDKP mempunyai citra satelit bumi yang berfungsi untuk memantau kondisi terkini dari kapal penangkap ikan dan kapal pengawas. BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data dan Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan menekankan pada aspek strategis berupa pengelolaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan dan diseminasi data dalam bentuk data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Keberadaan BPISDKP telah meningkatkan IKU pemenuhan data citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan perikanan.
 3. Dengan adanya potensi organisasi, Pusdatin sebagai institusi yang mempunyai tugas memberikan layanan tentang informasi kelautan dan perikanan dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan yang dibutuhkan oleh *stakeholders*, serta mendukung dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025-2029.

4. Dengan kebijakan pembangunan teknologi yang mengedepankan transformasi digital dan mendukung Asta Cita Presiden, maka mendorong pengembangan dan perbaikan antara lain pengembangan Aplikasi Portal *Collaboration Office*, yang mempunyai fungsi sebagai portal korespondensi persuratan, administrasi pegawai dan tanda tangan elektronik pada SK produk hukum KKP, serta presensi. Sedangkan untuk perbaikan capaian kinerja dengan mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja salah satunya membangun portal pegawai yang terintegrasi ke dalam Portal KKP dan Aplikasi MyASN, serta memformulasikan perhitungan tingkat kepatuhan pengelola data KP dengan menambahkan variabel baru yaitu Persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi.

1.5 Tantangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusdatin menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut berdampak pada keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Selain itu, tekanan psikologis, stabilitas kerja, serta aspek kesejahteraan pegawai juga berpotensi terpengaruh oleh penerapan kebijakan efisiensi tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan atau infrastruktur teknologi dan sistem informasi pendukung tidak dapat dilaksanakan, sehingga terdapat perubahan manual IKU yang mempengaruhi nilai IKU dimaksud.

Dengan memahami berbagai potensi dan tantangan ini, Pusdatin diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi

serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di sektor Kelautan dan Perikanan.

1.6 Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang terbatas pada bidang analisa data, analisa hukum, perancang undang-undang, dan analisa kerja sama;
2. Bagi Pakai Data antar K/L memerlukan PKS yang terlalu lama dalam prosesnya;
3. Renovasi/Pembaharuan sarana dan prasarana pada ruang layanan PTSA yang tertunda serta perlunya penambahan alokasi petugas khusus untuk *customer service* PTSA KKP;
4. Banyaknya aplikasi yang menghasilkan *database* sendiri-sendiri, sehingga mengakibatkan sulitnya untuk menjadikan satu informasi yang lengkap dan komprehensif;
5. Belum adanya regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagai dasar tata kelola keamanan informasi di lingkup KKP sebagai pendukung berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup KKP;
6. Belum seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang sesuai dengan ketentuan dalam pemenuhan nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) serta manajemen talenta pengembangan SDM aparatur;
7. Terbatasnya kuota tugas belajar pada setiap unit kerja, sehingga kesempatan untuk tugas belajar dengan beasiswa/pembiayaan dari BPPSDMKP kecil.

1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2025 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja Pusdatin berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2025 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tujuan, organisasi, tugas pokok dan fungsi, potensi, permasalahan, tantangan, dan kendala serta sistematika penyusunan laporan kinerja.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja Pusdatin yang telah dicapai dalam satu tahun, tindak lanjut rekomendasi triwulan sebelumnya, keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusdatin.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

a. Capaian Kinerja Organisasi

- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja);

- Menginformasikan kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.

4. **Bab IV Prestasi dan Kinerja Lainnya**, menjelaskan capaian prestasi dan capaian kinerja lainnya yang diperoleh pada periode tahun 2025 pada unit kerja Eselon II.
5. **Bab V Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan rencana tindak lanjut pada periode selanjutnya. menjelaskan capaian prestasi dan capaian kinerja lainnya yang diperoleh pada periode triwulan III tahun 2025 pada unit kerja Eselon II.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029

Dalam perencanaan kinerja perlu adanya penetapan kegiatan yang merupakan turunan dari Rencana Kerja Sekretariat Jenderal. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Setjen tahun 2025 yang terdiri atas: a.) arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program dan indikator sasaran program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta dukungan terhadap prioritas nasional sebagaimana tercantum; b.) matriks Renja Sekretariat Jenderal Tahun 2025; c.) rincian prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; dan d.) rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi Tahun 2025. Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada Tahun 2025-2029 Setjen KKP menetapkan visi, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional" untuk mewujudkan "Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan". KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Sekretariat Jenderal KKP sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam melaksanakan Misi KKP ke-4 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, Setjen KKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia”.

Untuk mewujudkan Misi Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029 tersebut, Setjen KKP perlu menetapkan Sasaran Program (SP).

Sasaran program Setjen KKP ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis ke- 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029.

Tabel 6. Indikasi Risiko Terhadap Pencapaian SS

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	
SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1.	Belum optimalnya kolaborasi antarbirokrasi yang mengakibatkan antarunit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan

	2.	Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital
	3.	Belum tuntasnya penyerdehanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proposionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab
	4.	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
	5.	Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK

Sebagai upaya mewujudkan sasaran program Setjen KKP, Pusdatin menetapkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan turunan dari Rencana Kerja Setjen pada program Dukungan Manajemen, antara lain kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dengan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan. Dalam penetapan Perjanjian Kinerja Pusdatin perlu adanya penetapan sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan adalah salah satu bagian dari perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka ditetapkan beberapa sasaran dan indikator kinerja lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025, antara lain:

1. Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi KKP, Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP, Nilai Keterbukaan Informasi Publik,

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP, Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP, Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, serta Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal; dan

2. Sasaran PNBPN BLU Sektor KP Meningkat dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pencapaian Target PNBPN Layanan LPMUKP, dan Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP.

Adapun tujuan Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan penyajian data, statistik dan pelayanan informasi secara berkesinambungan;
2. mewujudkan sarana jaringan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelayanan alur data maupun informasi secara mutakhir, tepat, cepat dan efisien;
3. mewujudkan Sistem Pemerintahan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi lingkup kementerian;
4. terciptanya SDM yang handal dalam sistem dan teknologi informasi serta pengolahan, penyajian dan analisa data statistik; dan
5. terwujudnya data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Selain tujuan diatas, Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan, antara lain:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan; dan
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data dan Informasi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2 Program dan Kegiatan

Pusdatin merupakan unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP, melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, yaitu “Program Dukungan Manajemen”. Sejak Tahun Anggaran 2023, telah diimplementasikan kebijakan 1 (satu) DIPA pada masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP, sedangkan DIPA Sekretariat Jenderal KKP dikelola di Biro Umum. Dalam memenuhi sasaran, Pusdatin mempunyai Rincian *Output* (RO), antara lain:

1. Pengelolaan Data dan Informasi
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal
3. Sistem Informasi Pemerintahan
4. Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Sasaran kegiatan diatas diuraikan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Penetapan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II serta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon I. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2025, tanggal 29 Desember 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2025

Sasaran Kinerja		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	64,68
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
		18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	82

Sasaran Kinerja		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85
		20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi

Sub bab ini menginformasikan tindak lanjut dari rekomendasi pada triwulan sebelumnya, yaitu Pusat Data dan Informasi, agar melakukan upaya antara lain: 1) Meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dari Tahun 2024; 2) Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur; 3) Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja; 4) meningkatkan capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja/target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) indikator kinerja dengan persentase capaian di atas 100% sebanyak 16 (enam belas) indikator kinerja; 2) indikator kinerja dengan persentase capaian tepat 100% sebanyak 4 (empat) indikator kinerja; dan 3) tidak ada indikator kinerja dengan persentase capaian di bawah 100%. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Pusdatin Tahun 2025 pada aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*) diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **106,84%**, capaian tersebut mengalami penurunan 1,04% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan capaian sebesar 107,88% hal ini disebabkan oleh indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP mengalami penurunan persentase capaian sebesar 32,50% dikarenakan terdapatnya perubahan dalam instrumen penilaian tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dimana aspek tata kelola KKP berada pada posisi rendah meskipun pelaksanaan kegiatan keamanan siber telah dilaksanakan tetapi tanpa adanya kebijakan yang menjadi dasar.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya, Pusdatin telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Penilaian Mandiri AKIP 2025, sebagai berikut:

1. Meningkatkan capaian kinerja tahun 2025 dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan capaian IKU, antara lain:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP terkait identifikasi serta penyepakatan data utama, baik prioritas maupun non-prioritas. Hasil dari kegiatan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Data Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi khusus untuk memperbaiki proses pengumpulan dan validasi data guna meningkatkan skor indeks SDI di penilaian selanjutnya;
 - c. mengimplementasikan aplikasi Portal Data KKP. Aplikasi ini memungkinkan seluruh proses pendataan mulai dari input, validasi, pengolahan agregasi, hingga penyajian data. Pusdatin juga telah melakukan beberapa kali sosialisasi penggunaan Portal Data KKP kepada masing-masing Unit Eselon I;
 - d. melaksanakan proses registrasi ulang *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai respon ancaman siber yang terus berkembang. Proses tersebut telah berjalan dengan baik dan ditandai dengan diterbitkannya Surat Tanda Registrasi (STR) CSIRT KKP yang baru, yang disahkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 18 November 2025, dengan masa berlaku selama tiga tahun ke depan;
 - e. melaksanakan uji keamanan atau *Vulnerability Assessment* (VA) terhadap aplikasi-aplikasi di lingkup KKP guna memastikan tingkat kerentanan dan meningkatkan ketahanan aplikasi. Beberapa aplikasi yang telah melalui proses VA antara lain Aplikasi KNMP BHKLN, JDIH, PTSA, serta Aplikasi POP BHKLN atau *Campaign Media Management*;

- f. memperkuat sinergi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas di bidang keamanan siber, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara. Melalui kanal komunikasi CSIRT KKP, Pusdatin menerima informasi terkait aktivitas berbahaya pada beberapa aset KKP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemblokiran domain dan alamat IP yang teridentifikasi, serta koordinasi dengan pengelola aplikasi untuk menutup celah kerentanan melalui pemutakhiran *framework* ke versi yang lebih aman dan terkini;
- g. melakukan Evaluasi Akses Akun VPN KKP dengan penguatan pengamanan akses terhadap aset elektronik KKP dengan menerapkan mekanisme penggunaan VPN versi terbaru dengan metode IPSEC-VPN, pegawai KKP yang bertugas sebagai pengelola sistem elektronik maupun pihak ketiga yang berafiliasi dengan pengelolaan aplikasi diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang akun VPN;
- h. melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus uji fungsi *Media Campaign* Budidaya Ikan Nila Salin sebagai upaya memastikan efektivitas media dalam mendukung penyebaran informasi, edukasi, dan promosi kegiatan budidaya ikan nila salin kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat sasaran;
- i. melakukan finalisasi Modul Sistem *e-logbook* Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- j. menyusun program pelatihan untuk Tahun Anggaran 2026 bagi jabatan fungsional yang menjadi binaan Pusdatin, yaitu Pranata Komputer, Statistisi, Surveyor Pemetaan, dan Analis Data Ilmiah. Program ini selaras dengan arah pengembangan kompetensi ASN melalui *Corporate University* KKP dibawah binaan BPPSDMKP, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ASN secara sistematis dan berkelanjutan;
- k. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KKP Tahun 2025 sebesar 92,49 (A) yang merupakan nilai IKM rata-rata atas seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) periode Triwulan I s.d III Tahun 2025. Sementara itu, validasi atas SKM Triwulan IV juga telah diselesaikan

dengan nilai IKM KKP sebesar 93,19 kategori A (Sangat Baik). Nilai IKM KKP telah memenuhi target pada RB Tahun 2025 dengan presentase capaian sebesar 101,5%;

- l. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional oleh Kementerian PANRB telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) KKP 4,80 kategori Pelayanan Prima. Capaian ini berhasil mempertahankan IPP KKP Tahun 2024 yang juga 4,80. Sementara itu, PEKPPP Mandiri Instansional yang dilakukan pada 41 OP Lokus dan 61 OP Nonlokus juga telah tuntas dengan capaian IPP sebesar 4,28 kategori Sangat Baik;
 - m. Hasil pemetaan tingkat kematangan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) KKP melalui pengisian kertas kerja telah tuntas dilaksanakan dengan capaian 4,19 (kategori Mahir);
 - n. Hasil pemantauan pengendalian gratifikasi Pusat Data dan Informasi periode tahun 2025 yaitu nihil pelapor, menjadi bentuk komitmen kesadaran untuk menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan melaporkannya apabila tidak dapat dihindari, sehingga nilai integritas dan profesionalisme benar-benar tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas;
 - o. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meraih **Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas)** untuk kategori Kementerian/Lembaga melalui inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan IGT melalui Portal Data”;
 - p. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh piagam penghargaan Opini Ombudsman kategori Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan opini “**Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi**”
2. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur dengan melakukan dialog kinerja antar Tim Kerja lingkup Pusdatin yang merupakan forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja yang melibatkan seluruh Tim Kerja di lingkungan Pusdatin sebagai

evaluasi implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang tepat untuk memastikan setiap pegawai berkontribusi terhadap kinerja organisasi dalam pencapaian sasaran strategis dan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dalam dialog kinerja Kapusdatin melakukan pembagian peran hasil antara pegawai lingkup Pusdatin untuk dirincikan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



Gambar 6. Dialog Kinerja Pusdatin TA 2025

3. Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja, antara lain:
 - a. membangun portal pegawai yang terintegrasi ke dalam Portal KKP dan Aplikasi MyASN, setiap pegawai dapat meng-*update* data pribadi pada aplikasi MyASN sehingga *database* portal pegawai KKP lebih lengkap dan *up to date*. Data yang perlu di-*update* antara lain berupa Satyalancana Karya Satya (SLKS) X dan/atau XX dan/atau XXX tahun, juga sertifikasi untuk peningkatan IPASN;
 - b. finalisasi implementasi sistem Aplikasi *Campaign Media Management* sebagai media pengelolaan diseminasi informasi;
 - c. melakukan langkah-langkah reaktif dalam penanganan insiden keamanan siber yang terjadi pada aset KKP. Sepanjang triwulan keempat 2025, tercatat beberapa insiden yang berhasil ditangani, antara lain dua serangan defacement pada aplikasi Integrasi DJPT, satu insiden serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS) pada aplikasi e-Presensi, serta dua

laporan *Bug Bounty* terkait celah kerentanan pada aplikasi TPKP Nasional yang dikelola oleh DJPSDKP;

- d. melakukan koordinasi dalam rangka integrasi data statistik dan data spasial di portal data dan *command center* untuk mewujudkan data yang lengkap dan komprehensif serta pengayaan data dan informasi untuk berbagi pakai;
- e. melakukan pembangunan sistem *Reconnaissance* untuk memonitor program strategis dan proyek prioritas nasional di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan teknologi *Digital Twin*, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis data;
- f. integrasi data spasial Portal Data dan *Command Center* termasuk di dalamnya data PKKPR dan data terumbu karang nasional;
- g. identifikasi data perizinan ruang laut khususnya reklamasi yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan monitoring bangunan laut berbasis citra radar;
- h. Pusdatin telah mengkoordinir Layanan Konsultasi Tatap Muka di PTSA KKP dari bulan Januari s.d Desember 2025 sebanyak 1.555 pelayanan dan dengan jumlah pengunjung sebanyak 1.182 orang;
- i. melakukan penyusunan perubahan perhitungan pada indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan semula 3 (tiga) variabel menjadi 4 (empat) variabel dengan bobot yang disesuaikan berdasarkan Eselon I lain, yaitu:
 - 1) persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi Kusuka;
 - 2) persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi;
 - 3) persentase Tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang Terjamin Kualitasnya;
 - 4) persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi.
- j. melakukan penyusunan perubahan target dan perhitungan pada indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP untuk memastikan keselarasan antara target kinerja dengan metode,

parameter, dan bobot penilaian yang telah diperbarui berdasarkan surat Deputi Bidang Keamanan Siber dan Pemerintahan dan Pembangunan BSSN Nomor T.1984/BSSN/D3/KS.01.02/08/2025, tanggal 22 Agustus 2025.

2.4 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024

Penetapan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya. Berikut merupakan rincian pemanfaatan informasi Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2024 dalam penetapan awal kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025.

Tabel 8. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Pusat Data dan Informasi Tahun 2025

No.	Perjanjian Kinerja 2024			Perjanjian Kinerja 2025			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	91	96,42	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	91	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen	94	125	-	-	-	IKU ini belum dapat dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan capaian telah mencapai maksimal dan belum dirancangnya formula capaian terbaru
3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	3,5	4,11	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	3,5	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	76	98,95	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	77	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,05	3,99	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,2	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan	76	80,78	Nilai Hasil Proposal Inovasi	77	82,05	Target disusun berdasarkan capaian

No.	Perjanjian Kinerja 2024			Perjanjian Kinerja 2025			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
	Publik di Lingkungan KKP			Pelayanan Publik di Lingkungan KKP			tahun 2024
7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	90	100	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90	-	IKU ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)
8.				Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	100	-	IKU ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)
9.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	2,5	3,40	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	2	2,07	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Siber turun dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan indikator penilaian
10.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	70	89,17	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	64,68	-	Target IKU ini disamakan dengan capaian tahun 2024
11.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3	3	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
12.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	2,75	2,73	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	2,7	-	Target tahun 2025 diturunkan dikarenakan tidak tercapainya IKU ini pada tahun 2024. Capaian IKU ini disamakan dengan capaian tahun 2024 berdasarkan Surat Badan Pusat Statistik Nomor B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025, bahwa penilaian EPSS dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali sehingga pada tahun 2025 tidak ada penilaian dari BPS, Pusdatin telah mengirimkan Memorandum Nomor 1603/SJ.8/RC.610/V/20

No.	Perjanjian Kinerja 2024			Perjanjian Kinerja 2025			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
							25 kepada Biro Perencanaan mengenai perubahan target IKU ini Tahun 2025-2029.
13.	Indeks Pelayanan Publik KKP	4,59	4,80	Indeks Pelayanan Publik KKP	4,6	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
14.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	85	90,15	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	88,87	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
15.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	88,30	91,47	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	89,6	91,80	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
16.	Nilai PM SAKIP Pusdatin	84	84,55	Nilai PM SAKIP Pusdatin	87	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
17.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan PeraturanPerundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistikdan Informasi Kelautan dan Perikanan	100	100	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan PeraturanPerundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistikdan Informasi Kelautan dan Perikanan	100	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di LingkunganPusdatin	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di LingkunganPusdatin	100	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
19.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)Pusdatin	85	90,13	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)Pusdatin	87	100	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
20.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yangDimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	95	100	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	85	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
21.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang	94	133,33	-	-	-	IKU ini belum dapat dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan capaian telah mencapai

No.	Perjanjian Kinerja 2024			Perjanjian Kinerja 2025			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
	Terstandar lingkup Pusdatin						maksimal dan belum dirancangnya formula capaian terbaru
22.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	95	99,49	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	95	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

2.5 Keselarasan Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Pusdatin 2025

Akuntabilitas Kinerja organisasi Sekretariat Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pada tahun 2025, berdasarkan **Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029**, sasaran kinerja Pusat Data dan Informasi difokuskan pada **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, dan Informasi Kelautan dan Perikanan serta Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, dan Informasi**. Dan sebagai penguatan tata kelola data untuk mendukung kebijakan **Ekonomi Biru**. Untuk mewujudkan Sasaran Kinerja tersebut, Pusdatin mempunyai 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dan merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 2 (dua) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Renstra KKP Tahun 2025–2029 mengintegrasikan lima pengarusutamaan pembangunan sebagai kerangka lintas kebijakan dan program. Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025–2029 meliputi pendekatan lintas kebijakan dan lintas

fungsi untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Setjen selaras dengan arah pembangunan KKP. Melalui pengarusutamaan ini, Sekretariat Jenderal berperan memastikan bahwa seluruh dukungan manajemen dan tata kelola pembangunan secara konsisten mendukung pencapaian sasaran strategis KKP yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang terkait dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal, meliputi pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*, serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, Pusat Data dan Informasi, berkontribusi pada sasaran strategis dan indikator kinerja, yaitu:

Tabel 9. Indikator Kinerja Pusdatin pada Rencana Strategis KKP 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	92	93	94	95
	2. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	3. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77	78	79	80	81
	4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	5. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77	78	79	80	81

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90	92	94	96	98
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100	100	100	100	100
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	64,68	70	71	72	73
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	3	3	4	4
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,7	2,75	2,75	2,77	2,77
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87	88,9	88,93	88,96	88,99
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6	89,7	89,8	89,9	89,95
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87	87,2	87,4	87,6	87,8
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	100	100	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	100	100	100	100
		18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87	82,5	83	83,5	84
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85	86	87	88	89
		20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	95	95	95	95

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Inderal 2025-2029 menjadi acuan penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin, dan rencana kerja Pusdatin yang tertuang pada kegiatan-kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Keselarasan Renstra Setjen Tahun 2025-2029, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Rancangan Renstra Setjen 2025-2029	Renja KKP 2025	PK Pusdatin 2025
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	91	91
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	3,5	3,5
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77	77	77
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,85	3,85	3,2
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77	76	77
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90	90	90
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100	100	100
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3	3	2
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70	70	64,68
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	3	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75	2,75	2,7
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6	4,6	4,6
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87	88,87	88,87
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6	89,6	89,6
		15.	Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	94	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87	87	87
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data	100	100	100

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Rancangan Renstra Setjen 2025-2029	Renja KKP 2025	PK Pusdatin 2025
	Pusat Data, Statistik, dan Informasi		Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)			
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	100	100
		18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87	87	82
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85	85	85
		20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	>95	95

Pada Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2025 terdapat ketidaksamaan target dengan target pada Renstra Setjen 2025-2029 dan Rencana Kerja Setjen 2025, yaitu terdapat pada Indikator Kinerja *“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP”*; IKU *“Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP”*; dan IKU *“Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan”* dikarenakan menyesuaikan capaian tahun 2024. Pada IKU *“Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP”* berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-236/02000/TS.160/2025, tanggal 7 Mei 2025, menyampaikan bahwa kegiatan EPSS/penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP tahun 2025 tidak dilaksanakan, dikarenakan adanya efisiensi pada kegiatan dimaksud. IKU *“Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)”* terdapat perubahan target dikarenakan terdapatnya perubahan dalam instrumen penilaian tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dimana aspek tata kelola KKP berada pada posisi rendah meskipun pelaksanaan kegiatan keamanan siber telah dilaksanakan tetapi tanpa adanya kebijakan yang menjadi dasar. Sedangkan pada IKU *“Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar”* dihapus dan belum dapat dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan capaian telah mencapai maksimal dan belum dirancangnya formula capaian terbaru.

Pada bulan Desember telah dilakukan perbaikan Perjanjian Kinerja dengan menurunkan target pada indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP yang semula target 3 (tiga) menjadi 2 (dua) berdasarkan Nota Dinas Pusat Data dan Informasi Nomor 3565/SJ.8/RC.610/X/2025 perihal Perubahan Nilai Target IKU Tingkat Kematangan Siber KKP tanggal 29 Oktober 2025.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

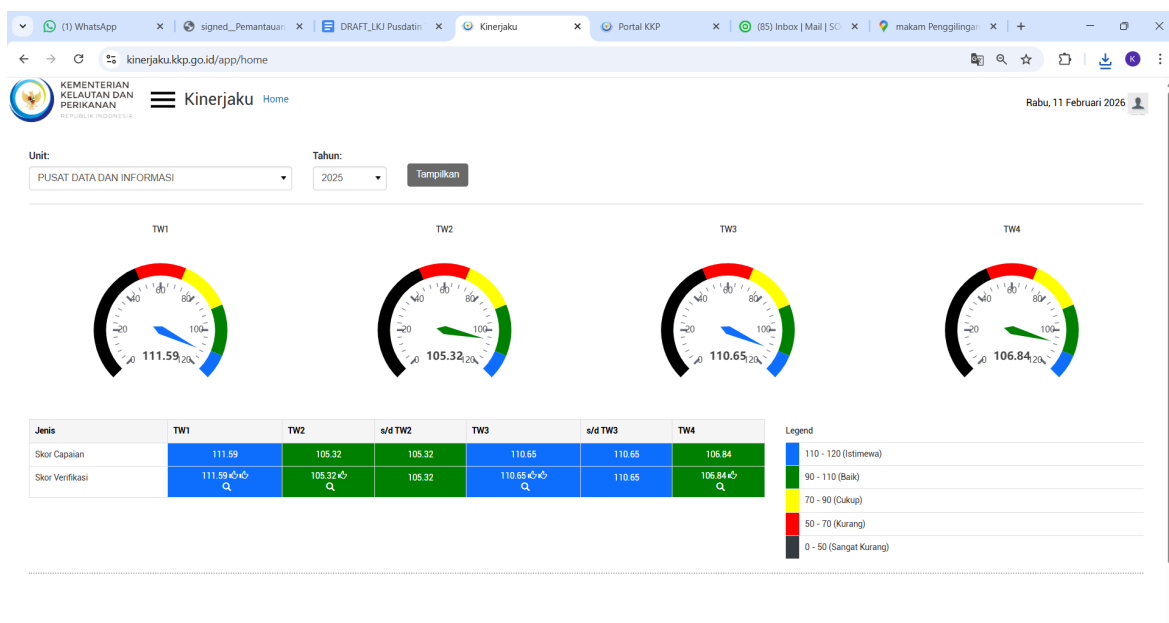
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP, yang diturunkan melalui visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP.

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pusat Data dan Informasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Tim Kerja di Pusat Data dan Informasi dengan didasarkan atas perjanjian kinerja yang telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Pusat Data dan Informasi menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun Nilai Kinerja Pusdatin periode Triwulan IV Tahun 2025 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai **106.84%** dengan predikat '**Baik**', dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun 2025



Gambar 8. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Pusdatin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target TW IV Tahun 2025	Realisasi TW I 2025	Realisasi TW II 2025	Realisasi TW III 2025	Realisasi TW IV 2025	Capaian s/d Desember (%)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	-	-	-	98,46	108,20
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	-	-	-	4,41	126,00
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77	-	-	-	98,52	127,95
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2	-	-	-	*3,99	124,69
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77	-	-	-	82,54	107,19
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90	-	-	-	100,00	111,11
		7.	Persentase Pemenuhan	100	-	-	-	100,00	100,00

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target TW IV Tahun 2025	Realisasi TW I 2025	Realisasi TW II 2025	Realisasi TW III 2025	Realisasi TW IV 2025	Capaian s/d Desemb er (%)
			Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)						
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2	-	-	-	2,07	103,50
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	64,68	-	-	-	83,69	129,39
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3	-	-	-	3,00	100,00
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7	-	-	-	*2,73	101,11
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6	-	-	-	4,80	104,35
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87	-	-	-	90,15	101,44
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6	91,80	92,34	92,87	93,11	104,01
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87	-	-	-	87,15	100,17
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100	-	100	-	100,00	100,00
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	-	-	-	100,00	100,00
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	82	-	85,09	-	87,85	107,13
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85	100,00	100,00	100,00	100,00	117,65
		20.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	-	-	-	99,93	105,19

Keterangan (*):

- Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan tidak adanya penilaian pada tahun 2025 oleh KEMENPANRB;

LAPORAN KINERJA**TAHUN
2025****PUSAT DATA & INFORMASI**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN

2. Indikator Kinerja Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan tidak adanya penilaian pada tahun 2025 oleh BPS;
3. Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan surat capaian tahun 2025 dari Ombudsman RI belum rilis.

3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Dalam melaksanakan capaian kinerja, perlu dukungan anggaran, berikut disampaikan, capaian kinerja anggaran Pusdatin tahun anggaran 2025, yang dituangkan dalam rencana aksi.

Tabel 12. Capaian Kinerja Anggaran dalam Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	Pengelolaan Data Geospasial (Satu Peta)	Data Geospasial	1.852.000	1.852.000	100.00
		Percepatan Pendataan Kusuka	Data update KUSUKA	35.230.000*	35.199.455	99.75
		Validasi Nasional	Data produksi perikanan dan kelautan	2.400.000	2.400.000	100.00
	2. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	Sinkronisasi dan Koordinasi Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Pengelolaan aplikasi lingkup KKP	-	-	0.00
	3. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	Pengelolaan Operasional PKM	Implementasi operasional digitalisasi perizinan yang meliputi modul SIUP, SIPI, SIKPI, SKKP, BKP, SKAT SLO dan SPB.	100..015.557.000	100.1014.411.338	100.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)
		4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dengan K/L terkait	nilai hasil evaluasi Indeks SPBE KKP dan draft Kepmen tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	7.310.000	7.310.000	100,00
		5. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP	Berita Acara Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP		-	0,00
		6. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	Data Citra Satelit Radar	Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.505.737.000 *BPISDKP	3.457.153.252	98,61
		7. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	Data dan Informasi Geospasial SDKP	Informasi geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.324.400.000 *BPISDKP	2.323.700.522	99,97
		8. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	Pelaksanaan Keamanan Siber dan Infrastruktur TI	Indeks Tingkat Keamanan Siber dan Infrastruktur TI	231.744.000	226.099.040	97,56
		9. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	Penyusunan Data Statistik Nasional	Persentase Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	5.994.000.	4.994.000	100,00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)
		10. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	Pengembangan repository layanan dan data berbasis arsitektur	Nilai Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	-	-	0.00
		11. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	Penyusunan Dokumen Evaluasi Data dan Statistik	Nilai Statistik Sektoral KKP	8.080.000	8.078.800	99.99
		12. Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional dan PEKPPP Mandiri Instansional	Nilai Indeks Pelayanan publik KKP	17.192.000	17.191.037	99.99
		13. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	Penyusunan Standar Layanan Perizinan Terpadu	Nilai tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP	3.432.000	3.432.000	100.00
		14. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	Monev Layanan Perizinan Terpadu	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	554.960.000	54.968.780	100.00
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	Penyusunan dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi	Rencana Kerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan	-*	-	0.00
		16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	Penyempurnaan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama Data, Statistik dan Informasi	Permen dan Kepmen KP bidang data dan informasi, Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait tentang berbagi pakai data	11.795.000	11.707.300	99.26

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)
	17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/ Penatausahaan Keuangan / Penatausahaan BMN	Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK	0	0	0
	18. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin (indeks)	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM (Sertifikasi) Bidang Data dan Informasi	Indeks IP ASN	2.500.000	2.500.000	100.00
	19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/ Penatausahaan Keuangan / Penatausahaan BMN	Tindak lanjut rekomendasi sebagai acuan perbaikan kinerja selanjutnya	146.039.348.560	145.826.658.996	99.94
	20. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/ Penatausahaan Keuangan / Penatausahaan BMN	Laporan Keuangan	146.039.348.560	145.826.658.996	99.94

*)Blokir Efisiensi

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Realisasi dan capaian kinerja Pusdatin Tahun 2025 berdasarkan PK yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan

3.3.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Tingkat kepatuhan pengelolaan data (TKPD) kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional.

Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya.

Terdapat 3 Variabel Perhitungan untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X_1), Bobot Nilai 30%. Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap unit kerja eselon I pada laman satu data KKP (<https://portaldata.kkp.go.id>)
2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X_2), Bobot Nilai 40%. Merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi portal data KP dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.
3. Persentase Realisasi Persentase Tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang Terjamin Kualitasnya (X_3), Bobot Nilai 30%. Merupakan penilaian atas capaian realisasi penyelenggaraan informasi geospasial yang telah dilakukan oleh Unit Data Eselon I dan Produsen Data. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.

3.3.1.2 Analisa Capaian

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan, berdasarkan Nota Dinas dari Pusdatin dengan Nomor 170/SJ.8/TU.140/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 dengan perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP Tahun 2025. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 98,46 dari target sebesar 91.

Tabel 13. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP Tahun 2025

Eselon I	KUSUKA (Pelaku Usaha)				Data Produksi yg Tervalidasi (%)				Kematangan IGT yg terjamin Kualitasnya (%)				Capaian IKU
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	
DJPT	50.000	56.886	114	30	100	83	83	33,20	100	100	100	30	93,20
DJPB	55.000	75.539	137	30	100	90	90	36	100	100	100	30	96
DJPK	450	814	181	30	100	100	100	40	100	100	100	30	100
DJPDSPKP	5.230	11.919	228	30	100	100	100	40	100	100	100	30	100
DJPRL									100	100	100	30	100
BPPSDMKP									100	100	100	30	100
BPPMHKP									100	100	100	30	100
Capaian IKU TKPD Tahun 2025													98,46

Keterangan:

- Kusuka *update* per 8 Januari 2026
- Produksi *update* per 8 Januari 2026
- IGT *update* per 8 Januari 2026

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 96,42, untuk nilai capaian Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,24% dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih yang mensyaratkan kewajiban pelaku usaha memiliki KUSUKA sehingga capaian dapat meningkat.

Pada capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP terdapat 3 (tiga) Eselon I yang hanya memiliki nilai capaian dari variabel Kematangan IGT yang terjamin Kualitasnya, maka untuk tahun 2026 diharapkan dapat diformulasikan dalam capaian variabel KUSUKA dan Data Produksi yang Tervalidasi untuk periode selanjutnya.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan											
Nama IKU		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
88,50	81,40	87,08	99,01	96,42	91	98,46	108,20	2,24	91	108,20	95	113,89	

3.3.1.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Untuk mendukung IKU TKPD Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2025 Pusdatin melakukan upaya penyempurnaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pendampingan Sosialisasi dan Gerai Pendataan Nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian pendataan KUSUKA yang dilaksanakan di:
 - a. Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 2025;
 - b. Kabupaten Bombana dan Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 - 4 Desember 2025;
 - c. Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 2 - 6 Desember 2025;
 - d. Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada tanggal 16-19 Desember 2025;
 - e. Kabupaten Jepara dan Pati Provinsi Jawa Tengah pada tanggal ;
 - f. Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 - 13 Desember 2025;
 - g. Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB pada tanggal 11 - 13 Desember 2025.



Gambar 9. Kegiatan Pendampingan Sosialisasi dan Gerai Pendataan Nelayan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 10. Kegiatan Pendampingan Sosialisasi dan Gerai Pendataan Nelayan di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Pusdatin telah melaksanakan Sosialisasi Portal Data Modul Validasi Nasional Bidang Perikanan Budi Daya pada tanggal 9 Oktober 2025;



Gambar 11. Rapat Sosialisasi Sosialisasi Portal Data KKP Modul Valnas Bidang Perikanan Budi Daya

3. Pelaksanaan kegiatan Validasi Nasional Semester I Tahun 2025, yang bertujuan melakukan verifikasi dan validasi data statistik kelautan dan perikanan tahun 2025 semester 1, serta dalam rangka koordinasi penguatan pendataan pelaku usaha dan produksi kelautan dan perikanan tahun 2025. Validasi data meliputi Data Pelaku Usaha (Rumah Tangga/Perusahaan, Data Sarana, Data Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Serta Produksi

Garam). Output dari kegiatan ini adalah data nasional yang lengkap, akurat, logis, sebagai bahan analisis, dan penyusun publikasi data statistik kelautan dan perikanan tahun 2025 yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 12. Validasi Nasional Semester I Tahun 2025

4. Melaksanakan rangkaian kegiatan Penilaian Penganugrahan Bhumandala Inovasi Pemanfaatan IGT 2025 (tahap 2)

Penilaian tahap 2 Bhumandala Inovasi Pemanfaatan IGT tahun 2025 dilakukan dengan menyampaikan materi paparan terkait dengan pengembangan Portal Data KKP. mulai dari perencanaan hingga rencana pengembangan kedepan. Penilaian tahap 2 ini juga menjawab pertanyaan Tim Juri seputar pengembangan dan substansi dokumen isian yang dibuat oleh KKP. Kegiatan penilaian dilakukan di Kantor Pusat Badan Informasi Geospasial.



Gambar 13. Kegiatan Penilaian Tahap II Bhumandala Inovasi Pemanfaatan IGT

Berdasarkan hasil penilaian tahap I dan tahap II, KKP mendapatkan peringkat pertama dengan penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) dari Badan Informasi Geospasial yang diterima oleh Inspektur Jenderal KKP sebagai perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan. Penghargaan dilaksanakan di Auditorium Perpustakaan Nasional.



Gambar 14. Kegiatan Penerimaan Penghargaan Bhumandala Kanaka



Gambar 15. Piagam Penghargaan Bhumandala Kanaka

5. Melakukan pendampingan survei kontrol kualitas IGT Lahan Garam; Pusdatin KKP selaku Unit Data Kementerian dan Wali Data dalam penyelenggaraan data di lingkup KKP memiliki wewenang memberikan pendampingan Kontrol Kualitas IGT untuk memastikan proses pengambilan dan verifikasi IGT berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tahapan pendampingan survei Kontrol Kualitas yang dilakukan pada TW IV tahun 2025 adalah pada IGT Lahan Garam yang dilaksanakan di Provinsi Aceh.

Survei pendampingan Kontrol Kualitas IGT Lahan Garam di Provinsi Aceh terdiri dari beberapa lokasi yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah mendukung proses verifikasi hasil pemetaan lahan garam di Provinsi Aceh dan memastikan tahapan survei dilakukan sesuai dengan standar. Hasil dari kegiatan pendampingan adalah kesesuaian hasil pemetaan dan rekomendasi perbaikan kepada Produsen Data.



Gambar 16. Pendampingan survei kontrol kualitas IGT Lahan Garam Kabupaten Pidie, Aceh

6. Melakukan pendampingan penyelenggaraan IGT KKP;

Kegiatan Pendampingan yang dilakukan Pusdatin sebagai Unit Data Kementerian atau Wali Data dalam penyelenggaraan IGT di lingkungan KKP tidak hanya pada satu kegiatan. Pusdatin dapat memberikan pendampingan mulai dari kegiatan perencanaan atau pada saat sebuah IGT baru saja disusun.

Kegiatan Pendampingan yang dilakukan Pusdatin TW IV tahun 2025 adalah salah satunya adalah bimbingan teknis penyusunan IGT Habitat Bentik Laut Dangkal. Kegiatan Bimbingan teknis yang dilakukan adalah memberikan materi terkait tata kelola data dan manajemen kualitas yang digunakan sebagai acuan dalam setiap penyelenggaraan data di lingkup KKP.



Gambar 17. Pusdatin memberikan materi Bimbingan Teknis

Kegiatan Pendampingan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan IGT KKP adalah pendampingan penyusunan standar data IGT hingga tahapan pemerolehan data. IGT tersebut adalah IGT Gudang Beku Produk Kelautan dan Perikanan, IGT Bantuan Pemerintah lingkup PSDKP, dan IGT Biota Perairan Dilindungi.

7. Melakukan penjaminan kualitas IGT KKP untuk beberapa IGT

Pusdatin sebagai Unit Data Kementerian dan Wali Data wajib memberikan konfirmasi kualitas data melalui tahapan penjaminan kualitas agar data dapat dibagi pakaikan. Tahun 2025 Pusdatin telah menjamin beberapa IGT KKP yaitu IGT Gudang Beku Komoditas Ikan dan IGT Peraturan KKPRL/ Materi Teknis Ruang Perairan RTRWP

8. Melakukan penilaian terhadap tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang terjamin kualitasnya lingkup Eselon I pada tahun 2025.

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk penyempurnaan Indikator Kinerja ini adalah:

1. Untuk percepatan pendataan Kusuka, Pusdatin akan melakukan:
 - a. Sosialisasi pendataan KP ke Dinas KP provinsi, kabupaten/kota, petugas pendataan dan pelaku usaha

- b. Melakukan pendampingan/asistensi pendataan pelaku usaha KP (Kusuka)
 - c. Melaksanakan/pendampingan kegiatan gerai pendataan Kusuka
- 2. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan validasi nasional tahun 2026, diperlukan:
 - a. alokasi anggaran untuk pendataan kelautan dan perikanan tahun 2026 berupa honorarium enumerator dan validator serta kegiatan validasi dan supervisi
 - b. Kegiatan bimbingan teknis dan validasi satu data KP dilaksanakan secara luring
 - c. Diperlukan supervisi/pendampingan kegiatan pendataan/validasi ke lapangan atau kantor dinas KP
- 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data Kusuka maupun sampling produksi yang telah masuk ke portal data KP;
- 4. Melakukan penentuan target IKU Geospasial tahun 2026;
- 5. Melaksanakan pelaporan pemutakhiran IGT KKP oleh Kebijakan Satu Peta;
- 6. Melaksanakan pendampingan penyelenggaraan IGT KKP tahun 2026
- 7. Melaksanakan persiapan penilaian penganugerahan Bhumandala Simpul Jaringan 2026;
- 8. Melakukan penjaminan kualitas IGT KKP;
- 9. Melakukan penilaian terhadap tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang terjamin kualitasnya lingkup Eselon I pada tahun 2026;
- 10. Dikarenakan nilai TKPD tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding tahun 2024, untuk itu perlu adanya perubahan manual IKU agar terdapat inovasi pada IKU dimaksud pada tahun 2026.

3.3.1.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU TKPD yang dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia dengan Jabatan Fungsional Statistisi dan Surveyor Pemetaan dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Data Geospasial (Satu Peta) anggaran awal senilai Rp256.325.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp2.114.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp1.852.000,- (87,61%);
2. Percepatan Pendataan Kusuka dengan anggaran awal senilai Rp1.133.660.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp35.289.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp35.199.455,- (99,75%);
3. Validasi Nasional dengan anggaran awal senilai Rp665.920.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp2.400.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp2.400.000,- (100%);
4. Jabatan Fungsional Statistisi pada Pusdatin saat ini sebanyak 17 orang dan Surveyor Pemetaan sebanyak 6 orang, dengan beban kerja yang ada, masih terdapat kekurangan SDM pada tahun 2025 sebanyak 5 orang Statistisi dan 3 orang Surveyor Pemetaan.

3.3.2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

3.3.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana aplikasi sistem informasi yang dikelola KKP mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, mudah diakses, dan bermanfaat bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan KKP.

Maksud dan tujuan dari survei layanan aplikasi sistem informasi adalah:

- a. Mengetahui kelemahan atau kelebihan layanan yang digunakan;
- b. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang digunakan;
- c. Sebagai bahan pengambilan Keputusan dan penetapan kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- d. Sebagai umpan balik (feedback) dalam memperbaiki layanan aplikasi.

Survei dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penyebaran Kuesioner

Melakukan penyebaran kuesioner melalui Portal Collaboration Office untuk seluruh ASN KKP.

b. Penyajian Data

c. Survei yang telah diisi secara otomatis akan diolah dan dihitung oleh sistem untuk kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Nilai rata-rata per pertanyaan

Nilai masing-masing pertanyaan dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan, jumlah nilai masing-masing pertanyaan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

$$\text{Rata-rata Per Pertanyaan} = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi}}{\text{Jumlah responden}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survei layanan aplikasi sistem informasi, maka penilaian diukur dengan Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju; Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju; Skor 3 untuk jawaban Netral; Skor 4 untuk jawaban Setuju; dan Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju. Skor persepsi terendah adalah 1 dan skor persepsi tertinggi adalah 5 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Ukuran Kinerja Penilaian Survei Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja Penilaian Pelayanan
1	≤ 1,9	Kurang
2	2 – 2,9	Cukup
3	3 – 3,9	Baik
4	4 – 4,5	Sangat Baik
5	4,6 – 5,00	Memuaskan

3.3.2.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung dalam periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas Pusat Data dan Informasi Nomor 4271/SJ.8/TU.140/XII/2025 perihal Penyampaian Hasil Survei Layanan Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2025, hasil deskriptif persepsi responden terhadap layanan Aplikasi Portal Collaboration Office, rata-rata yang diperoleh adalah **4,41** dengan kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut berdasarkan hasil survey, rata-rata yang diperoleh layanan aplikasi Portal Collaboration Office dari 5 variabel yang dinilai. Rincian hasil penilaian tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 16. Rincian hasil penilaian Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

No.	Pertanyaan	Rata-Rata Nilai	Keterangan
1.	Portal <i>Collaboration Office</i> dapat diakses dengan baik pada penjelajah (<i>browser</i>) saya	4,44	Sangat Baik
2.	Akses login Portal <i>Collaboration Office</i> memiliki tingkat keamanan yang baik	4,37	Sangat Baik
3.	Portal <i>Collaboration Office</i> dapat diakses setiap hari	4,43	Sangat Baik
4.	Portal <i>Collaboration Office</i> mudah digunakan	4,41	Sangat Baik
5.	Informasi pada Portal <i>Collaboration Office</i> tersaji sesuai dengan kebutuhan	4,38	Sangat Baik
Rata-rata		4,41	Sangat Baik

Survey dilakukan selama 12 bulan, yaitu Januari s.d. Desember 2025, dengan responden sebanyak 2093 orang. Metode yang digunakan dalam survey adalah metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui aplikasi. Layanan yang menjadi objek survey difokuskan ada Aplikasi Portal Collaboratin Office, dimana layanan ini merupakan layanan perkantoran terintegrasi di KKP.

Merujuk pada Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2025, target IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi adalah 3,5 sehingga dapat diketahui bahwa target tahun 2025 telah tercapai dan terlampaui sebesar 125,89%. Realisasi Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi pada tahun 2025 adalah 4,41 sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah 4,11 sehingga jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan 2024 persen kenaikannya adalah 7,30%.

Kenaikan nilai Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi dari 4,11 pada tahun 2024 menjadi 4,41 pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan aplikasi sistem informasi yang dirasakan oleh pengguna (*user*). Peningkatan ini dapat dianalisis sebagai hasil kombinasi beberapa faktor straregis dan operasional. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan indeks adalah meningkatnya kualitas teknis aplikasi, baik dari sisi stabilitas sistem, ketersediaan layanan (*availability*), maupun performa aplikasi. Perbaikan bug, optimalisasi sistem, serta peningkatan infrastruktur pendukung berpotensi mengurangi gangguan layanan, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Disamping itu, pada tahun 2025 terdapat kecenderungan penguatan integrasi antar aplikasi dan portal layanan, termasuk pemanfaatan SupperApps, Dashboard Pimpinan, dan aplikasi pendukung lainnya. Integrasi ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih sederhana dan konsisten, sehingga layanan aplikasi dinilai lebih mudah diakses dan digunakan. Hasil penilaian survei diperlukan penyesuaian pada form survei dengan meningkatkan kualitas pertanyaan pada periode selanjutnya.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan												
Nama IKU	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi												
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
			4,18	4,11	3,5	4,41	126,00	8,57	3,5	126,00	3,9	113,07	

3.3.2.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi adalah:

1. Pembahasan dashboard pimpinan;
2. Pembahasan Aplikasi Insight Monev PBJ
3. Pembahasan Aplikasi ePresensi
4. Pengembangan aplikasi e-Learning atau LMS e-Milea;
5. Pendampingan dan asistensi penggunaan Portal KKP dan penerbitan tanda tangan elektronik untuk PPPK;
6. Monitoring dan evaluasi Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUSAN) dan Aplikasi PTSP;
7. Pembangunan, sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi campaign media management;
8. Melakukan survey layanan aplikasi sistem informasi sesuai dengan Surat Dinas Kapusdatin Nomor B.4096/SJ.8/KP.160/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025, perihal Pengisian Survey Layanan Aplikasi Sistem Informasi.



Gambar 18. Pendampingan Penggunaan Portal KKP di SKIPM Batam

Inovasi yang dilakukan untuk mendukung IKU ini pada tahun berikutnya, adalah:

1. Melakukan pengembangan *Portal Collaboration Office* secara berkelanjutan sebagai sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan KKP;
2. Menerapkan tanda tangan elektronik pada seluruh proses bisnis yang ada di KKP;
3. Monitoring dan evaluasi implementasi Aplikasi *Campaign Media Management*;
4. Menyiapkan kuesioner sebagai instrumen survei yang akan disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I;
5. Melakukan survey layanan aplikasi di lingkungan KKP;
6. Menindaklanjuti apabila terdapat permintaan pengembangan aplikasi dari Menteri atau dari unit kerja lainnya.

3.3.2.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi melalui kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Layanan Aplikasi Sistem Informasi dengan anggaran awal senilai Rp513.010.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp0,- dikarenakan terdampak efisiensi anggaran. Sumber Daya Manusia yang diberdayakan adalah Jabatan Fungsional Pranata Komputer serta seluruh pegawai yang mengisi kuesioner Survey Layanan

Aplikasi Sistem Informasi pada halaman Portal KKP. Dengan adanya efisiensi anggaran Pusdatin tetap melaksanakan koordinasi intensif dengan unit Eselon I dan pihak terkait secara *luring* maupun *daring* atau *zoom meeting*. Dengan adanya dukungan sumber daya Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Pusdatin sebanyak 42 orang, dengan adanya beban kerja saat ini, maka masih bisa tertangani dengan baik dalam menjalankan kegiatan lingkup Tim Kerja SPBE dan Aplikasi Sistem Informasi.

3.3.3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

3.3.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (PKM) merupakan penilaian atas kinerja dan implementasi layanan sistem informasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada pimpinan KKP dan Unit Kerja Eselon I dalam menyajikan data secara *real time*. Layanan Sistem Informasi PKM didukung dengan *platform* terintegrasi yang disebut *Integrated Maritime Intelligent Platform (IMIP)*, yang dilengkapi 3 fitur utama yaitu *Monitoring*, *Alert*, dan *Dashboard*. Fitur *Monitoring* digunakan untuk memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *Automatic Identification System (AIS)*. Fitur *Alert* digunakan untuk mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat setiap indikator pelanggaran, seperti masa berlaku surat izin penangkapan ikan yang sudah habis, aktivitas pelanggaran penangkapan ikan seperti penangkapan ikan di kawasan konservasi dan penangkapan ikan di luar wilayah perizinan yang didaftarkan, serta pelanggaran kapal perikanan yang mematikan transponder VMS. Fitur *Dashboard* digunakan untuk menyajikan informasi produksi perikanan tangkap secara *real time* dan data citra satelit radar.

3.3.3.2 Analisa Capaian

Persentase Layanan Sistem Informasi PKM merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas Pusdatin dengan nomor 56/SJ.8/TU.140/I/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Sistem Informasi PKM adalah sebesar **98,52%** dari target sebesar 77%.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot x Capaian
1.	Operasional <i>Decision Support System</i>	100%	92,4%	92,4%	9,24%
2.	Operasional Infrastruktur	100%	100%	100%	10%
3.	Operasional Data <i>Warehouse dan Analytics</i>	100%	100%	100%	10%
4.	Hasil Survey Layanan Pusat Kendali Maritim	4,90	4,85	98,98%	69,28%
Total Capaian Indikator Kinerja					98,52%

Capaian Indikator Kinerja diatas sebesar 98,52% telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77%. Adapun terdapat penurunan capaian tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 98,95% dikarenakan adanya perbedaan jawaban dari responden.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan capaian indikator kinerja Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target kinerja dengan meningkatkan target pada periode selanjutnya.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	96,17	98,95	77	98,52	127,95	-0,43	77	127,95	81	121,63

3.3.3.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Dalam rangka memastikan operasional Layanan Sistem Informasi PKM berjalan dengan baik, maka dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung kinerja layanan. Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Operasionalisasi *Data Warehouse* dan *Analytics* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:

a. Monitoring API *Data Warehouse Command Center*

Selama tahun 2025, PKM telah mengintegrasikan berbagai data dari Eselon I terkait ke dalam *Data Warehouse Command Center*, mulai dari data perizinan kapal perikanan (Izin SIPI/SIKPI, Kesatuan Usaha Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut, SKAT, SLO, SPB, STBLKK), PNBP, *log book* penangkapan ikan, pelabuhan perikanan RIPN, sebaran kapal VMS, produksi perikanan tangkap PIPP, neraca komoditas, unit pengolahan ikan, pemasangan rumpon, sebaran perikanan, dan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan (SIAP MUTU). Mekanisme integrasi data tersebut dilakukan menggunakan *Application Programming Interface* (API) dengan sinkronisasi data secara *real time* dan otomatis.

Kegiatan monitoring API dilakukan setiap hari kerja dimana berdasarkan hasil monitoring API pada Tahun 2025 terdapat 237

laporan. Dari hasil kegiatan monitoring pada periode tersebut, persentase layanan API sebesar 100%. Terdapat beberapa kendala *downtime* layanan API dari Eselon I yang disebabkan oleh beberapa hal seperti perawatan data *center* dan *server data*, tetapi hal tersebut bisa *direcovery* dengan cepat dalam hitungan kurang dari 1 jam.

- b. Koordinasi integrasi data dan *update* fitur dengan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP.

PKM telah melakukan rapat rutin dalam rangka koordinasi integrasi data dan update fitur pengawasan *Command Center* dengan Direktorat Pengendalian Operasi Armada DJPSDKP dan Tim Data Mega Solusi setiap minggu. Rapat tersebut membahas tentang usulan pengembangan aplikasi *Command Center* serta verifikasi data aplikasi *Command Center*.

- Pengembangan Aplikasi *Command Center* bertujuan untuk mengakomodir fitur baru dan integrasi data yang diajukan oleh Eselon I. Pada Tahun 2025 terdapat 91 usulan pengembangan fitur aplikasi *Command Center*.
- Verifikasi data aplikasi *Command Center* bertujuan untuk memastikan semua fitur pada aplikasi *Command Center* berfungsi dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, PKM menggunakan platform Trello. Trello merupakan *platform project management* dan kolaborasi yang membantu mengorganisasi serta memprioritaskan proyek dalam bentuk visual. Menggunakan sistem *card*, *board*, dan *list*. Trello memberikan individu dan tim kemudahan untuk mengatur pekerjaan secara jelas, menciptakan struktur untuk melihat tugas, deadline, prioritas, serta perkembangan proyek secara *real time*. Trello memberi tahu apa, siapa yang mengerjakan tugas tertentu, apa yang sedang dikerjakan, dan sejauh mana kemajuan tugas tersebut.

Pemanfaatan Trello dalam verifikasi data dilakukan secara kolaborasi antara pihak pengembang aplikasi dan tim verifikator dari PKM, mulai dari permintaan pengembangan fitur, penyampaian bugs dan status penanganannya hingga selesai dan berfungsi normal kembali. Berikut adalah tampilan Trello yang digunakan verifikasi data PKM yang terdiri dari 5 board yaitu Document Request, Feature Request, Sprint/Bugs, On Development, dan Ready for Review. Pada Tahun 2025, terdapat 252 card Trello yang dibuat dalam rangka verifikasi data aplikasi Command Center.

2. Operasionalisasi *Decision Support System* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:

Sepanjang tahun 2025, Tim *Decision Support System* (DSS) telah melaksanakan monitoring harian terhadap kinerja aplikasi *Command Center*. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai standar layanan (SLA), mendukung kelancaran operasional, serta menyediakan data akurat bagi pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan hasil monitoring selama periode Januari–Desember 2025, capaian kinerja aplikasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 20. Skor Kinerja Aplikasi *Command Center* Tahun 2025

Bulan	Skor Kinerja Aplikasi <i>Command Center</i> (%)
Januari	91.83
Februari	88.19
Maret	87.68
April	86.72
Mei	89.49
Juni	92.67
Juli	93.06
Agustus	96.28

Bulan	Skor Kinerja Aplikasi <i>Command Center</i> (%)
September	94.22
Oktober	96.48
November	97.02
Desember	95.34

Secara umum, indikator utama menunjukkan bahwa kinerja aplikasi *Command Center* sudah baik, meskipun terdapat beberapa *error/bugs* yang memerlukan perhatian khusus.

Seluruh *error/bug* yang terdeteksi melalui monitoring harian segera dilaporkan ke **tim pengembang** untuk ditindaklanjuti. Proses pelaporan dan tindak lanjut dilakukan melalui **Trello**, sehingga setiap kendala dapat dipantau progres penyelesaiannya secara transparan dan terstruktur. Adapun tahapan penanganannya yaitu:

- Error/bug dicatat oleh tim DSS dan dilaporkan ke tim pengembang melalui Trello.
- Status progres diperbaharui (Sprint/Bugs → On Development → Ready to Review → Done).
- Hasil perbaikan diverifikasi kembali oleh tim DSS.

Monitoring harian sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja aplikasi secara umum stabil, dengan sebagian besar indikator SLA tercapai. Namun, adanya sejumlah *error/bug* menegaskan pentingnya koordinasi erat antara Tim DSS dan tim pengembang. Melalui mekanisme pelaporan di Trello dan pembahasan rutin dalam rapat, proses perbaikan dapat dipantau secara sistematis sehingga kualitas layanan aplikasi tetap terjaga.

- Operasionalisasi Infrastruktur pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui unit kerja terkait terus berupaya meningkatkan kapasitas pengawasan dan koordinasi sumber daya kelautan melalui optimalisasi infrastruktur teknologi informasi. Dalam konteks ini, *Command Center* berfungsi sebagai simpul vital (hub) yang mengintegrasikan berbagai data strategis, visualisasi pemantauan lapangan, serta sarana komunikasi pimpinan. Sepanjang Tahun Anggaran 2025, kegiatan pengelolaan operasional *Command Center* difokuskan pada pemeliharaan keberlanjutan layanan (*service continuity*) di tengah tantangan teknis akibat penuaan perangkat keras dan kompleksitas infrastruktur jaringan. Laporan ini menyajikan narasi komprehensif mengenai status kesiapan operasional, konfigurasi teknis, kendala yang dihadapi, serta capaian kinerja pengelolaan infrastruktur visual, audio, dan jaringan, dengan mengambil data monitoring intensif dari Januari hingga Desember 2025 sebagai representasi kondisi eksisting tahun berjalan.
- b. Infrastruktur visual menjadi komponen paling dominan dalam ekosistem *Command Center* KKP, mengingat fungsinya sebagai media utama pemantauan data spasial dan aktivitas maritim. Sistem visual ini ditopang oleh konfigurasi layar yang masif, terdiri dari 32 unit monitor Video Wall berukuran 49 inci merek LG yang terpasang di ruang utama, serta dukungan tambahan 16 unit monitor LG 55 inch di ruang *War Room* untuk kebutuhan rapat terbatas. Pengelolaan tampilan pada layar raksasa ini dikendalikan oleh perangkat *Video Wall Processor* ISEMC VK Series dengan kapasitas 16 kanal input dan 16 kanal output. Dalam operasional hariannya, tim teknis memanfaatkan perangkat lunak kontrol berbasis jaringan (*Video Wall Control Software*) yang memungkinkan pengaturan tata letak layar secara fleksibel, mulai dari fitur drag-and-drop sumber input, pengaturan *scene* atau skenario tampilan, hingga manajemen *user privilege*. Sistem ini juga didukung oleh perangkat keras pendukung visual lainnya, termasuk HDMI Splitter 1x4 dan HDMI

Extender (*Transmitter* dan *Receiver*) yang berfungsi mendistribusikan sinyal visual jarak jauh dari ruang server ke dinding monitor tanpa penurunan kualitas sinyal yang signifikan dalam kondisi normal. Selain itu, untuk mendukung interaktivitas pimpinan saat presentasi, sistem visual juga terintegrasi dengan perangkat monitor interaktif Wacom Cintiq Pro 24 inci dan Provent Interactive 65 inci, serta didukung oleh dua unit PC Workstation Dell 3640 Tower sebagai operator *console* yang menjalankan aplikasi pemetaan dan visualisasi data.

- c. Pada aspek tata suara atau audio, pengelolaan operasional difokuskan untuk menjamin kejernihan komunikasi dua arah, baik untuk keperluan rapat internal maupun teleconference dengan unit pelaksana teknis di daerah. Ekosistem audio *Command Center* dibangun menggunakan perangkat berkualitas tinggi, mencakup Amplifier tipe ZN-DPA2650 yang bertugas memperkuat sinyal suara ke seluruh ruangan, serta Mixer Analog ZN-16CM dan Mixer Digital (DSP) yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan sinyal suara untuk meminimalisir *feedback* dan *noise*. Distribusi suara di dalam ruangan dilayani oleh sepasang *Speaker Full Range* merk Zoan yang ditempatkan secara strategis untuk cakupan area dengar yang merata. Sementara itu, untuk menangkap suara peserta rapat, ruangan telah dilengkapi dengan teknologi dua *Ceiling Microphone* dari Sennheiser yang tertanam di plafon, memungkinkan penangkapan suara yang jernih tanpa mengganggu estetika meja rapat. Selain itu, tersedia pula empat unit mikrofon genggam (*Hand Mic*) sebagai cadangan atau penggunaan fleksibel. Seluruh perangkat audio ini terhubung melalui infrastruktur jaringan menggunakan Switch Cisco PoE+ khusus audio, yang memisahkan lalu lintas data audio dari data umum untuk mencegah latensi.
- d. Infrastruktur jaringan (*networking*) dan kelistrikan menjadi tulang punggung yang menopang seluruh operasional perangkat visual dan audio tersebut. Topologi jaringan di *Command Center* dikelola

menggunakan perangkat switching kelas *enterprise*, yakni Cisco 9200 Series, yang mengatur lalu lintas data lokal (LAN) dan koneksi ke internet maupun intranet kementerian. Manajemen *bandwidth* dan distribusi rute jaringan dikendalikan melalui *router/firewall* FortiGate, sementara akses nirkabel disediakan melalui *Access Point* (AP) Huawei yang tersebar di beberapa titik strategis. Untuk menjamin ketersediaan daya listrik yang stabil dan memproteksi perangkat sensitif dari fluktuasi tegangan atau pemadaman listrik tiba-tiba, seluruh sistem Command Center didukung oleh unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) 3 Phase berkapasitas 40 KVA. Keberadaan UPS ini sangat krusial dalam memastikan operasional 24/7 dan memberikan waktu yang cukup bagi tim teknis untuk melakukan prosedur *shutdown* yang aman jika terjadi kegagalan pasokan listrik utama dari PLN.

- e. Meskipun secara umum infrastruktur berjalan, kegiatan monitoring harian sepanjang tahun 2025 mencatat sejumlah kendala teknis persisten yang berdampak pada kualitas layanan. Masalah paling kritis yang menjadi sorotan utama dalam laporan tahun ini adalah kerusakan perangkat keras pada Video Wall Controller ISEMC VK Series. Berdasarkan log status harian, teridentifikasi bahwa sebanyak 8 port input dan 8 port output pada prosesor tersebut mengalami kegagalan fungsi atau kerusakan permanen. Kondisi ini secara langsung membatasi kemampuan sistem untuk menampilkan seluruh sumber input secara bersamaan. Sebagai langkah mitigasi taktis agar layanan tetap berjalan, tim operasional terpaksa melakukan rekayasa jalur sinyal melalui metode jumper atau bypass jalur input/output. Meskipun cara ini berhasil mempertahankan tayangan di layar utama, namun hal ini mengakibatkan hilangnya fleksibilitas pengaturan layout dan mengurangi resolusi maksimal yang dapat ditampilkan. Selain masalah pada prosesor, degradasi fisik juga sempat terpantau pada unit monitor Video Wall LG 49 inci, di mana laporan visual menunjukkan adanya gangguan berupa noise

(bintik gangguan sinyal), efek banding (garis-garis gradasi warna), serta inkonsistensi warna dan kontras antar layar yang mengindikasikan panel telah melewati masa performa puncaknya. Merespons kondisi tersebut, pada bulan Oktober hingga November 2025 telah dilakukan langkah perbaikan signifikan berupa penggantian 32 unit LG Video Wall dengan perangkat baru yang memiliki tipe sama (identik), sehingga kualitas visual kini telah pulih dan kembali optimal.

- f. Tantangan operasional lainnya terletak pada manajemen infrastruktur pasif, khususnya pengkabelan (cabling) di area rak server dan belakang layar. Laporan monitoring secara konsisten menyoroti kondisi kabel jaringan yang "berantakan" dan tidak memiliki label identifikasi (labeling) yang standar. Kesemrawutan manajemen kabel ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan menimbulkan risiko operasional yang nyata. Ketiadaan label dan jalur kabel yang rapi sangat menyulitkan tim teknis saat melakukan penelusuran masalah (troubleshooting) ketika terjadi putus koneksi atau gangguan sinyal. Waktu yang seharusnya digunakan untuk perbaikan cepat seringkali habis hanya untuk mengurutkan jalur kabel satu per satu. Selain itu, kondisi ini juga menghambat proses rekonfigurasi jaringan jika sewaktu-waktu dibutuhkan perubahan topologi mendadak untuk mendukung kegiatan pimpinan. Di sisi lain, perangkat periferal pendukung juga tak luput dari masalah. Dua unit camera Pan-Tilt-Zoom (PTZ) merek AverCam dilaporkan mengalami latensi (delay) yang tinggi dan kualitas video yang buruk, sehingga kurang optimal untuk kegiatan konferensi video tingkat tinggi. Sistem keamanan akses berbasis Face Recognition juga kerap tidak dapat diakses akibat masalah pada catu daya magnet (magnet power), serta ditemukannya dua unit mikrofon genggam merek Relacart yang mengalami masalah dan tidak dapat difungsikan.
- g. Khusus untuk fasilitas War Room, catatan operasional menunjukkan adanya periode ketidaktersediaan layanan (downtime) yang

terencana pada awal tahun, tepatnya di bulan Januari 2025. Status ruangan tercatat dalam kondisi "Sedang Renovasi", yang meliputi pekerjaan fisik dan penataan ulang perangkat. Hal ini berdampak pada pengalihan sementara seluruh kegiatan monitoring hanya ada di ruang Command Center utama. Namun, pasca renovasi, perangkat visual utama berupa 16 unit Video Wall 55 inci dan sistem pendukung lainnya seperti Wolfvision Cynap Pure untuk kolaborasi nirkabel serta Kramer Switcher kembali beroperasi untuk mendukung kegiatan strategis. Pemantauan terhadap perangkat di War Room pasca renovasi menunjukkan status "Nothing to Report" atau berjalan normal, yang mengindikasikan bahwa proses renovasi berhasil mengembalikan fungsi ruangan tersebut ke kondisi optimal.

- h. Terlepas dari berbagai kendala teknis pada perangkat keras tersebut, capaian kinerja pengelolaan *Command Center* pada tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang memuaskan dari sisi ketersediaan layanan (*availability*). Berdasarkan rekapitulasi Monitoring Tracker untuk periode Januari hingga Desember 2025, tercatat skor kinerja mencapai angka maksimal 100.00 untuk seluruh parameter yang diukur. Parameter tersebut meliputi stabilitas *bandwidth* internet, fungsi dasar perangkat visual di ruang utama dan ruang rapat, kejernihan perangkat audio, kinerja server, fungsi kamera, serta kestabilan kelistrikan dan lampu penerangan. Pencapaian skor 100% ini menegaskan bahwa tim pengelolaan operasional berhasil melakukan manajemen risiko dan mitigasi yang efektif. Meskipun terdapat kerusakan pada 8 *port Video Wall Controller*, tim mampu memastikan bahwa output visual yang dibutuhkan pimpinan tetap tersaji melalui jalur alternatif. Demikian pula dengan isu manajemen kabel, meskipun menyulitkan, tim tetap mampu menjaga uptime jaringan lokal (LAN) dan WiFi tetap hijau (operasional) tanpa insiden putus koneksi yang signifikan selama jam kerja efektif (*Office Day*). Status "Hijau" yang dominan pada laporan harian (Daily Status) menjadi bukti empiris bahwa fungsi

dasar *Command Center* sebagai pusat komando tetap terjaga integritasnya.

- i. Sebagai penutup dan rekomendasi strategis untuk tahun anggaran berikutnya, evaluasi tahun 2025 ini menggarisbawahi urgensi peremajaan perangkat keras (*hardware renewal*). Keandalan operasional di masa depan tidak dapat terus-menerus bertumpu pada solusi sementara (*workaround*) seperti jumper kabel pada perangkat yang rusak. Oleh karena itu, prioritas utama harus diberikan pada pengadaan atau penggantian unit Video Wall Controller yang baru untuk mengembalikan kapabilitas penuh sistem visual.. Di sisi infrastruktur pasif, kegiatan *recabling* atau penataan ulang kabel jaringan disertai pelabelan yang sistematis harus menjadi agenda pemeliharaan preventif yang wajib dilaksanakan. Hal ini krusial untuk mempercepat waktu respon penanganan gangguan (Mean Time To Repair) dan meningkatkan standar kerapian pusat data. Terakhir, perbaikan atau penggantian perangkat periferal seperti kamera PTZ dan mikrofon yang rusak juga mutlak diperlukan untuk mendukung tren pertemuan hibrida (*hybrid meeting*) yang menuntut kualitas audio-visual prima. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan *Command Center* KKP dapat terus beroperasi sebagai instrumen pengawasan yang handal dan modern.
4. Kunjungan dari Instansi Kementerian/ Instansi Lain ke *Command Center*
 - a. Kunjungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan kunjungan ke *Command Center* dengan tujuan berbagi pengalaman, baik terkait konten informasi yang disajikan, infrastruktur, maupun pengelolaan pusat kendali di *Command Center* KKP.



Gambar 19. Kunjungan Instansi lain ke Command Center

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Operasionalisasi *Data Warehouse* dan *Analytics* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:
 - a. Monitoring API *Data Warehouse Command Center*
 - b. Koordinasi integrasi data dan update fitur dengan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP
2. Operasionalisasi *Decision Support System* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*; dan
3. Operasionalisasi Infrastruktur pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*.



Gambar 20. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Update Fitur Pengawasan Command Center

3.3.3.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim melalui kegiatan pengelolaan operasional PKM dengan Sumber Daya Manusia yang diberdayakan adalah Jabatan Fungsional Pranata Komputer saat ini yang berjumlah 13 orang dengan berbagai jenjang, dengan beban kerja yang ada saat ini, kebutuhannya telah mencukupi. Anggaran awal senilai Rp1.204.716.000,- sedangkan setelah efisiensi menjadi Rp15.557.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp15.556.338,- atau 99,99% dikarenakan terdampak efisiensi anggaran.

3.3.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP

3.3.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diamanatkan kepada seluruh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi SPBE secara berkala. Evaluasi tersebut merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.3.4.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja Indeks SPBE KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB). Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor B/40/PD.03/2025 tanggal 8 Juli 2025, hal : Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE 2025, disampaikan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan dari SPBE menuju Pemerintah Digital (Pemdi).

Sebagai bagian dari transisi tersebut, Kementerian PAN RB melaksanakan kegiatan Pemantauan SPBE Tahun 2025 yang sekaligus menjadi dasar penilaian awal terhadap Indeks Pemerintah Digital. Kegiatan ini meliputi sosialisasi, penilaian mandiri, penilaian dokumen oleh asesor eksternal, serta pembinaan Pemda yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Juli s.d. November 2025. Namun demikian, berdasarkan Lampiran II surat tersebut, KKP tidak termasuk dalam daftar kementerian/lembaga yang menjadi lokus atau objek penilaian Pemerintah Digital tahun 2025.

Dengan demikian, pada tahun ini KKP tidak dilakukan penilaian atau pemantauan langsung oleh Kementerian PAN RB, namun tetap diharapkan untuk menyiapkan diri dan memperkuat penerapan kebijakan SPBE sebagai bagian dari kesiapan menuju implementasi penuh kebijakan Pemerintah Digital ditahun-tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut maka telah

ditetapkan bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE KKP pada tahun 2025 menggunakan hasil dari penilaian Indeks SPBE tahun 2024 dikarenakan aplikasi penilaian mandiri tauval KEMENPANRB tidak dibuka pada tahun 2025.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks SPBE KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Targe t 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
4,21	4,26	4,24	4,71	3,99	3,2	3,99	124,68	-	3,2	124,68	3,6	110.83

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, Indeks SPBE KKP Tahun 2024 sebesar **3,99** dengan predikat Sangat Baik mengalami peningkatan sebesar 11,45% dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 3,58. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh KKP adalah pada penerapan aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, aspek Perencanaan Strategis SPBE, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, aspek Penyelenggara SPBE, aspek Penerapan Manajemen SPBE, aspek Pelaksanaan Audit TIK, aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Berikut adalah capaian KKP jika dibandingkan dengan K/L lain pada gambar berikut:

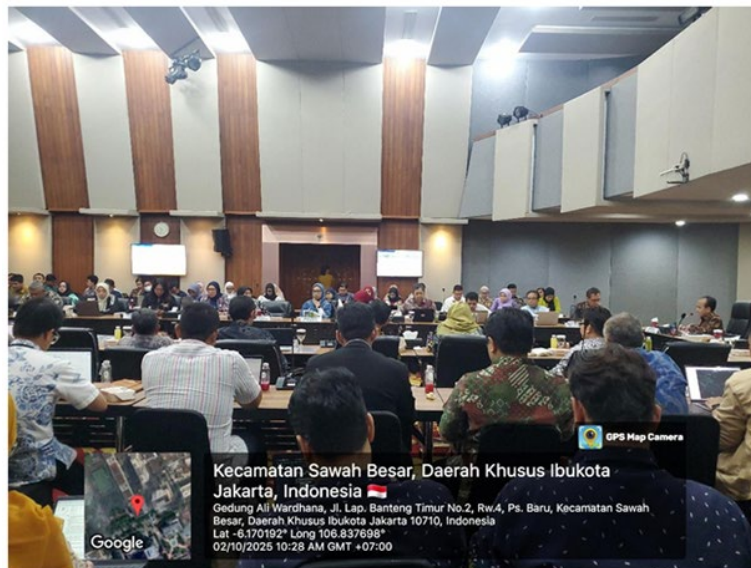
Tabel 22. Capaian Indeks SPBE KKP

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Kementerian Dalam Negeri	4,21	Memuaskan
12	Kementerian Luar Negeri	3,93	Sangat Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,88	Sangat Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,36	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,74	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	4,00	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,73	Sangat Baik
21	Kementerian Agama	4,63	Memuaskan
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Baik
23	Kementerian Sosial	3,58	Sangat Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,99	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,75	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,22	Memuaskan
28	Kementerian Perindustrian	3,44	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	4,35	Memuaskan
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,68	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,95	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,15	Sangat Baik
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,54	Sangat Baik

3.3.4.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Diskusi regulasi dan kesesuaian OSS dengan perizinan berusaha pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Koordinasi dengan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian PPN/Bappenas terkait permohonan rekomendasi (*clearance*) belanja TIK KKP tahun 2025.



Gambar 21. Diskusi Regulasi dan Kesesuaian OSS dengan Perizinan Berusaha pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait secara berkelanjutan untuk penyelenggaraan SPBE;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian PAN RB terkait permohonan fasilitasi *clearance* belanja TIK tahun anggaran 2026.

3.3.4.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dengan K/L terkait dengan anggaran awal senilai Rp195.880.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp7.310.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp7.310.000,- atau 100%. Sumber Daya Manusia yang diberdayakan adalah pegawai yang tercantum pada KepMen KP Nomor 22/SJ Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KKP, dengan mayoritas mempunyai jabatan sebagai pemangku pejabat fungsional Pranata Komputer.

3.3.5 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

3.3.5.1 Definisi Indikator Kinerja

Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada dengan kriteria:

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

3.3.5.2 Analisa Capaian

Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian internal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pusdatin telah melaksanakan kegiatan penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan disahkannya Berita Acara Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada kegiatan yang dilaksanakan tanggal 26 s.d 27 Mei 2025.

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP												
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	%	Target 2025	% Capaian Thdp	Target 2029	% Capaian Thdp	

LAPORAN KINERJA

PUSAT DATA & INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN

**TAHUN
2025**

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP												
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029				
							Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2024-2025		Target 2025		Target 2029	
-	-	-	82,93	80,78	77	82,54	107,19	0,91	77	107,19	81	101,90	

Pusdatin telah memfasilitasi Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan proposal inovasi yang diusulkan sejumlah 30 (tiga puluh) proposal. Syarat peserta Inovasi dengan implementasi minimal 2 (dua) tahun dan belum pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian PANRB, sehingga beberapa inovasi yang berpartisipasi di tahun sebelumnya kembali diusulkan untuk penilaian pada tahun 2025. Terdapat dua proposal tidak memenuhi persyaratan tersebut. Penilaian proposal telah selesai dengan disahkannya Berita Acara Pleno Penilaian dengan penyampaian Nota Dinas Nomor 1689/SJ.8/TU.210/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang menghasilkan 15 (lima belas) Top Inovasi dan diusulkan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Nasional, capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP mendapatkan nilai sebesar **82,54** dari target 77 dengan persentase capaian sebesar 107,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil Penilaian KIPP KKP Tahun 2025

No	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
1.	DJPK	3 proposal	77	77.55	100.72
2.	DJPT	6 proposal	77	84.05	109.15
3.	DJPBD	4 proposal	77	82.29	106.86
4.	DJPDSPPK	5 proposal	77	88.17	114.51
5.	DJPSPDKP	3 proposal	77	77.88	101.15
6.	BPPSDMKP	3 proposal	77	87.10	113.11
7.	BPPMHKP	4 proposal	77	77.34	100.44

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 80,78, capaian tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,91%. Peningkatan capaian dipengaruhi oleh beberapa perubahan persyaratan dalam pelaksanaan penilaian proposal inovasi, sebagai berikut:

Tabel 25. Daftar perubahan persyaratan penilaian proposal inovasi tahun 2024 dengan tahun 2025

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Waktu implementasi inovasi	Minimal 0 bulan	Minimal 2 tahun
2.	Komponen penilaian	Terdiri dari bobot aspek a. Latar Belakang dan Tujuan (10%) b. Kebaruan/Nilai Tambah (15%) c. Implementasi inovasi (5%) d. Signifikansi (30%) e. Adaptabilitas (20%) f. Sumber Daya (5%) g. Strategi Keberlanjutan (15%)	Terdiri dari bobot aspek dan bobot sub aspek a. Kebaruan (14%) 1) Latar Belakang (19%) 2) Tujuan (23%) 3) Cara Kerja Inovasi (30%) 4) Keunggulan Ide/ Gagasan (28%) b. Efektivitas dan Manfaat (52%) 1) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (31%) 2) Dampak Inovasi (69%) c. Adaptabilitas (17%) 1) Upaya Difusi dan Replikasi Inovasi (100%) d. Keberlanjutan (17%) 1) Sumber Daya (42%) 2) Strategi Keberlanjutan (58%)

Pada tahun 2024 proposal inovasi dengan waktu implementasi kurang dari 2 tahun sejumlah 31 dari total yang dinilai sejumlah 61 proposal inovasi. Sedangkan tahun 2025 sejumlah 28 proposal inovasi yang seluruhnya memiliki waktu implementasi minimal 2 tahun. Penulisan proposal yang dituangkan pada inovasi dengan waktu implementasi kurang dari 2 tahun, didominasi nilai yang tidak optimal karena belum maksimal menyampaikan jawaban sesuai aspek penilaian.

Pada tahun 2024 bobot penilaian terdiri dari aspek sedangkan tahun 2025 bobot penilaian terdiri dari aspek dan sub aspek, hal ini memengaruhi penulisan proposal. Pada tahun 2024 penulisan proposal terbatas di aspek dengan maksimal 150-300 kata sedangkan tahun 2025 penulisan tersampaikan hingga sub aspek dengan maksimal 150-300 kata, sehingga

tahun 2025 memberikan peluang kepada inovator untuk menyampaikan secara detail pelaksanaan inovasi dan jawaban sesuai aspek penilaian.

Perbedaan persyaratan waktu implementasi dan komponen penilaian inovasi tahun 2024 dengan tahun 2025 mempengaruhi capaian kinerja nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik.

3.3.5.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP adalah:

1. Memberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025 melalui Portal KKP;



Gambar 22. Piagam Penghargaan Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025

2. Memberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan kepada 13 peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025 melalui Portal KKP;



Gambar 23. Piagam Penghargaan Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025

3. Mengusulkan Proposal Top 15 inovasi lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional. Sebanyak 12 (dua belas) inovasi menjadi finalis top inovasi sesuai pengumuman Kementerian PANRB yang disampaikan melalui surat dinas nomor B.2394/SJ.8/TU.210/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025.
4. Inovasi yang meraih *Outstanding Public Service Innovations* (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di tingkat nasional sebanyak 3 inovasi dari 12 (dua belas) finalis top inovasi, hal ini disampaikan melalui surat dinas nomor B.2873/SJ.8/TU.210/VIII/2025 tanggal 31 Agustus 2025. Tiga inovasi peraih OPSI perlu disebarluaskan ke Organisasi Penyelenggara (OP) pelayanan publik atau instansi lain.
5. Penyampaian surat Komitmen Penyebarluasan (*Scaling Up*) Inovasi Pelayanan Publik oleh Sekretariat Jenderal KKP dengan nomor B.882/SJ/TU.210/IX/2025 kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) pada 3 (tiga) inovasi, yaitu:
 - a. LOCAFEED COMMUNITY (LFC) oleh Unit Kerja Inovator Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, BPPSDM;

- b. BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) oleh Unit Kerja Inovator Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, BPPSDM; dan
- c. BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) IDAMAN NELAYAN oleh Unit Kerja Inovator Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, DJPT.

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan Eselon I lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perihal monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan publik;
2. Berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Penyelenggara (OP) pelayanan publik, dalam penyebarluasan (*scaling up*) Inovasi Pelayanan Publik.

3.3.5.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP melalui kegiatan Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik internal KKP dilaksanakan oleh 27 (dua puluh tujuh) orang tim penilai dan Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/SJ Tahun 2025, namun anggaran dalam kegiatan ini tidak tercantum pada RKAKL tahun 2025. Sumber Daya Manusia yang terlibat adalah JF Pranata Komputer dan Penata Perijinan sebanyak 5 orang, dan untuk kebutuhan JF Penata Perijinan saat ini membutuhkan 4 orang.

3.3.6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3.3.6.1 Definisi Indikator Kinerja

BPISDKP, melalui fasilitas stasiun penerima data satelit radar BARATA, melakukan akuisisi data citra satelit radar *Cosmo-Skymed Constelation* dan *Cosmo-Skymed Second Generation*. Data-data tersebut kemudian dikelola dan diolah menjadi data dan/atau informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Proses

pengelolaan data meliputi tahap pemesanan, akuisisi, pengolahan dan analisis data dengan peruntukan pemantauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan cara menghitung pembagian antara data citra satelit yang digunakan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan selama 2025 dan data citra satelit yang diakuisisi oleh BPISDKP selama 2025 dikalikan 100 persen. Target pada tahun 2025 adalah 90% dengan periode pengukuran tahunan.

3.3.6.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5/BPISDKP/TU.210/I/2026 perihal Penyampaian Realisasi IKU Kegiatan RADAR Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2026, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar **100** dari target 90 dengan persentase capaian sebesar 111,11%.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan tren yang stabil dibandingkan tahun 2024, ditandai dengan nilai target, realisasi, dan tingkat capaian yang relatif sama. Stabilitas ini mengindikasikan konsistensi kinerja unit kerja dalam mempertahankan pencapaian indikator secara berkelanjutan. Selanjutnya, apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra Setjen tahun 2029 sebesar 98%, maka tingkat capaian yang dihasilkan mencapai 102,04%. Realisasi tahun 2025 tersebut telah melampaui target Renstra Setjen tahun 2029, yang mencerminkan kinerja yang berada di atas ekspektasi perencanaan jangka menengah. Dalam pelaksanaan pemenuhan target output pada IKU ini, terdapat kendala anggaran sebagai dampak penerapan kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menyikapi kondisi tersebut, BPISDKP

melakukan penyesuaian target output agar selaras dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	100	100	90	100	111,11	-	90	111,11	90	111,11

3.3.6.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Guna mendukung pencapaian IKU, BPISDKP melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin sistem stasiun penerima data satelit radar BARATA, baik pada komponen fisik (hardware) maupun perangkat lunak (software). Persiapan kegiatan dimulai dengan proses rekomposisi anggaran hingga terbitnya dokumen clearance infrastruktur TIK pada bulan Juni 2025.

Selanjutnya, dilakukan penyiapan dokumen teknis berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi, dokumen teknis dan rancangan kontrak tersebut telah melalui proses penelaahan oleh Inspektorat Jenderal guna menilai kelengkapan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan berikutnya adalah evaluasi dokumen pengadaan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) untuk memastikan kesesuaian dokumen pengadaan dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah seluruh dokumen pengadaan dinyatakan lengkap dan sesuai, BPISDKP bersama Biro PBJ melaksanakan klarifikasi proposal teknis dan negosiasi harga dengan pihak penyedia. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2025, telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia untuk

pengadaan data citra satelit radar serta operasional pemeliharaan (*maintenance*) satelit radar. Inovasi yang dilaksanakan pada IKU ini antara lain:

1. Pertemuan dengan *Stakeholder* dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, serta Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan optimalisasi pemanfaatan data citra satelit radar untuk mendukung kegiatan monitoring dan pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
2. Re-arsitektur jaringan stasiun bumi untuk mendukung kelancaran operasional sistem penerimaan data citra satelit radar. Melalui penyederhanaan arsitektur jaringan dan penggabungan jalur dalam sistem Radarsat dengan Cosmo-Skymed diharapkan penggunaan internet menjadi lebih efisiensi.
3. Pemeliharaan Antena Stasiun Bumi BPISDKP guna mendukung kelancaran operasional sistem penerimaan data citra satelit radar. Telah dilakukan inspeksi secara langsung oleh penyedia (e-Geos) untuk memastikan sistem antena masih dalam kondisi baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi lanjutan, teridentifikasi bahwa komponen gearbox pada sumbu-Y antena mengalami kerusakan sehingga menyebabkan fungsionalitas gerak antena tidak optimal. Tindakan perbaikan telah diambil untuk mengembalikan fungsi kedua komponen gearbox. Sedangkan sistem elektronik antena, seperti Antenna Control Unit (ACU), servo amplifier, network switch, stow-pin, dan jalur perkabelan antara ACU, jaringan, dan server dalam kondisi baik.
4. Akuisisi Data Radar diawali dengan tahapan feasibility request untuk memastikan ketersediaan satelit radar pada waktu akuisisi yang direncanakan, kesesuaian jadwal lintasan, mode akuisisi yang akan digunakan pada lokasi yang disepakati. Hasil dari feasibility request kemudian diproses menjadi bahan dasar pemesanan data citra satelit radar kepada penyedia data (e-Geos). Selama periode pemantauan

telah dilakukan akuisisi 78 scene data radar, terdiri dari 20 scene Cosmo-Skymed Second Generation (CSG) dan 58 scene Cosmo-Skymed Constellation (CSK).

5. Seluruh data citra satelit radar yang telah berhasil diakuisisi selanjutnya dilakukan proses analisis dan deliniasi objek pemanfaatan ruang laut di lokasi pemantauan. Objek delineasi mencakup seluruh wilayah yang berada di dalam batas shapefile perizinan KKPRL, baik yang masih berada dalam batas area perizinan maupun yang telah melampaui batas perizinan yang ditetapkan sesuai dengan cakupan data. Data citra hasil analisis delineasi selanjutnya disimpan dalam bentuk shapefile (.shp) dan divisualisasikan dalam bentuk peta.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pencapaian IKU, antara lain kontras yang sangat gelap atau sangat terang sehingga diperlukan proses penyesuaian histogram menggunakan metode linear *stretching*. Selain itu, data citra mengandung banyak noise sehingga proses *georeferencing* dan deliniasi objek tidak dapat dilakukan secara optimal. Kendala lainnya adalah masih terdapat sebagian anggaran yang terblokir akibat kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada penyesuaian dan perubahan target *output* yang telah ditetapkan.

3.3.6.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Layanan Data Kelautan dan Perikanan berupa Sarana Data Citra Satelit Radar dan OM Sarana Data Citra Satelit Radar dengan anggaran senilai Rp606.731.000,- dan Rp4.459.766.000. Sedangkan pagu yang terkena efisiensi senilai Rp1.560.760.000 dan pagu efektif senilai Rp3.505.737.000 sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp3.457.153.252,- atau 98,61% (anggaran ini terdapat pada DIPA Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Perikanan). Serta terdapat dukungan SDM dengan berbagai pemangku jabatan fungsional seperti Pranata Komputer, Analis Data Ilmiah, dan Analis Kebijakan.

3.3.7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

3.3.7.1 Definisi Indikator Kinerja

BPISDKP, melalui Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Geospasial, telah melakukan kegiatan pengolahan data, analisis data, dan penyebarluasan informasi geospasial kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Adapun tematik data yang dikelola meliputi sebaran tumpahan minyak di Perairan Bintan dan sekitarnya; lahan pembudidaya ikan di Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, dan Riau; perubahan pemanfaatan wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat; perubahan garis pantai di Pulau Sulawesi; monitoring pemutihan karang di perairan Selat Lombok; serta peta prakiraan daerah penangkapan ikan. Sedangkan kegiatan survey data geospasial tidak dapat dilaksanakan imbas efisiensi anggaran.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui perbandingan permintaan informasi geospasial yang dipenuhi selama 2025 dan permintaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan ke BPISDKP selama 2025. Target yang diharapkan pada tahun 2025 adalah 100% dari permintaan informasi geospasial yang dihasilkan BPISDKP. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan yang berarti capaian akan diukur pada akhir tahun.

3.3.7.2 Analisa Capaian

IKU ini merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5/BPISDKP/TU.210/I/2026 perihal Penyampaian Realisasi IKU Kegiatan RADAR Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2026, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar **100** dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100,00%.

Capaian tersebut menunjukkan tren kinerja yang stabil dibandingkan dengan tahun 2024, yang ditandai oleh kesesuaian antara nilai target, realisasi, dan tingkat capaian. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi kinerja unit kerja

dalam mempertahankan pencapaian indikator secara berkelanjutan. Selanjutnya, apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal tahun 2029 sebesar 100%, maka tingkat capaian yang dihasilkan juga mencapai 100%. Dengan demikian, realisasi pada tahun 2025 telah memenuhi target Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2029.

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100

3.3.7.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Hingga Desember 2025, upaya perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu:

1. Penyusunan data sebaran dan luasan lahan pembudidayaan merupakan tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 161/DJPB.1/TU.210/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal permohonan citra satelit untuk peta lahan pembudidayaan ikan tahun 2025. BPISDKP berupaya melakukan identifikasi dan analisis lahan pembudidayaan ikan di 3 lokasi (Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, dan Riau) menggunakan kombinasi data citra satelit Sentinel-2A dengan Google Satellite, Esri Satellite, dan Bing Satellite. Proses analisis dilakukan pada perangkat lunak Quantum GIS (QGIS) berdasarkan baseline kawasan yang diterbitkan DJPB tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2025, capaian deliniasi lahan pembudidayaan ikan di Provinsi Riau mencapai 556,18 Ha, Provinsi Aceh (Aceh Tamiang, Kota

Langsa dan Aceh Timur) mencapai 30.369,7 Ha, dan Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 16.246,40 Ha.

2. Penyusunan data sebaran tumpahan minyak di perairan pulau Batam dan Bintan sebagai tindak lanjut mitigasi risiko akibat tingginya lalu lintas kapal di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I). Identifikasi sebaran tumpahan minyak dilakukan menggunakan data citra satelit radar Sentinel-1. Sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 159 scene data citra radar Sentinel-1 telah diolah dan dianalisis. Ditemukan sebanyak 150 kejadian tumpahan minyak, dengan rata-rata 13 kejadian tumpahan minyak setiap bulan. Kejadian tumpahan minyak terendah teramati di bulan Januari 2025, sebanyak 5 tumpahan minyak. Tumpahan minyak meningkat secara signifikan pada bulan Juni 2025 dengan puncak kejadian tertinggi di bulan Oktober 2025, mencapai 36 kejadian. Berdasarkan lokasi kejadiannya dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu WPP-NRI 571, WPP-NRI 711 dan di luar ZEE. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa kejadian tumpahan minyak di dominasi terjadi di wilayah perairan WPP-NRI 711 sebanyak 105 kejadian (70%). Guna memudahkan visualisasi spasial hasil identifikasi sebaran tumpahan minyak disusun *dashboard* monitoring yang selanjutnya disebut dengan OIL-Tracker. *Prototype dashboard* monitoring tumpahan minyak dapat diakses melalui jaringan internal BPISDKP pada tautan <http://172.19.0.206/OilTracker/>.
3. Penyusunan basis data perubahan garis pantai sebagai tindak lanjut mitigasi dampak lingkungan akibat abrasi dan akresi. Ketersediaan data perubahan garis pantai diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan berbasis data untuk perlindungan pesisir, khususnya di Pulau Sulawesi. Analisis perubahan garis pantai didasarkan pada data citra Sentinel-2 dan Landsat periode perekaman tahun 2015, 2023, dan 2024. Identifikasi dan deteksi garis pantai menggunakan pendekatan *automatic water extraction indeks* (AWEI). Sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan verifikasi ulang hasil ekstraksi perairan yang

sebelumnya telah dibersihkan. Sejumlah tahapan termasuk pengecekan konsistensi garis, koreksi akibat tutupan awan, serta koreksi pergeseran kecil yang masih muncul setelah proses *stitching* antar citra dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat. Hasil pemantauan garis pantai tahun 2024 terlihat lebih mundur dibandingkan garis pantai tahun 2015 dan 2023. Hal ini mengindikasikan adanya proses abrasi yang cukup kuat, terutama di sekitar muara sungai dan zona pemukiman yang berdekatan dengan pantai. Sementara itu, tampak adanya sedikit akresi di beberapa titik, ditunjukkan oleh pergeseran garis pantai ke arah laut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kegiatan reklamasi, proses sedimentasi dari aliran sungai atau dinamika arus lokal.

4. Penyusunan basis data perubahan penggunaan lahan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Provinsi Jawa Barat. Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan menggunakan citra satelit optis Sentinel-2 yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Hingga akhir tahun 2025 telah dilakukan pengolahan dan analisis data citra sentinel-2 untuk identifikasi perubahan penggunaan perubahan lahan di sejumlah wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Sukabumi, Indramayu, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Karawang, Garut, Bekasi, Tasikmalaya, dan Subang.
5. Penyusunan basis data spasial/temporal lingkungan laut dan indikator pemutihan karang merupakan tindak lanjut mitigasi perubahan lingkungan yang berpotensi menyebabkan pemutihan karang, utamanya di perairan Selat Lombok (Gili Matra, Gita Nada, dan Nusa Penida). Berdasarkan tingkat risikonya, Gili Matra cenderung paling berisiko mengalami pemutihan (bleaching). Hal ini dikarenakan dominasi terumbu dangkal dan area laguna yang mudah mengalami pemanasan permukaan laut secara lokal, dikombinasikan dengan tekanan antropogenik yang tinggi dari pariwisata (snorkeling, diving, pembangunan pesisir, dan sampah). Kondisi perairan yang relatif tertutup pada beberapa bagian Gili membuat suhu permukaan cepat

naik pada periode gelombang panas laut, sehingga stres termal pada karang menjadi lebih besar dan pemutihan lebih mungkin terjadi serta lebih parah. Gita Nada menempati posisi menengah dimana beberapa bagian yang terlindungi dan dangkal juga rentan, terutama jika penegakan pengelolaan dan praktik penangkapan ikan destruktif lemah. Namun, variasi topografi dan sirkulasi lokal membuat risiko bervariasi antar-lokasi di dalam kawasan tersebut. Sedangkan Nusa Penida relatif lebih tahan terhadap pemutihan di beberapa titik karena arus kuat dan fenomena *upwelling* yang dapat menurunkan suhu permukaan lokal, serta keberadaan zonasi MPA yang lebih mapan di beberapa area. Sampai akhir tahun 2025 telah disusun dashboard monitoring basis data pemutihan karang yang selanjutnya disebut dengan ReefView. *Prototype dashboard* monitoring pemutihan karang dapat diakses melalui jaringan internal pada tautan <http://172.19.0.206/ReefView/>. Adapun ruang lingkup data dan informasi yang divisualisasikan dalam dashboard ini mencakup 7 indikator pemutihan karang yaitu sst (*sea surface temperature*), ssta (anomali sst), hs (*coral bleaching hotspot*), dhew (*coral bleaching degree heating week*), baa (*bleaching alert area*) satu hari, baa-mas-7d (baa maksimum dalam 7 hari terakhir), dan sst-tren-7d (SST trend dalam 7 hari terakhir).

6. Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang disediakan oleh BPISDKP. Sejalan dengan penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) perlu dilakukan evaluasi dan penilaian tingkat kematangan IG PPDPI guna memberikan gambaran tingkat kemampuan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan IGT mulai dari perencanaan sampai dengan berbagi pakai. Guna mencapai tingkat kematangan 4, maka telah disusun dokumen Rancangan Spesifikasi Produk Informasi Geospasial (SPIG), Struktur Data dan Metadata, dan Kontrol Kualitas.

Adapun kendala yang dihadapi adalah tindak lanjut dengan survei lapangan untuk validasi dan verifikasi belum dapat terlaksana karena beberapa

pertimbangan teknis dan non-teknis serta anggaran untuk melakukan validasi masih terblokir Efisiensi berdasarkan Inpres 1 tahun 2025. Sebagai upaya perbaikan, BPISDKP melakukan optimalisasi metode validasi alternatif melalui pemanfaatan data sekunder, analisis citra satelit, dan koordinasi lintas unit kerja guna memastikan kualitas data tetap terjaga. Selain itu, dilakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dan penganggaran secara bertahap agar survei lapangan dapat dilaksanakan setelah pembukaan blokir anggaran, serta penguatan perencanaan teknis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

3.3.7.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terpenuhi melalui kegiatan layanan data kelautan dan perikanan berupa layanan data statistik kelautan dan perikanan, dengan anggaran senilai Rp4.600.000.000,- dan Rp500.000.000,- akan tetapi pagu anggaran untuk mendukung IKU tersebut masih ada yang terblokir, karena adanya efisiensi senilai Rp2.775.600.000,- dan pagu efektif senilai Rp2.324.400.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp2.323.700.522,- atau 99,97% (anggaran ini terdapat pada DIPA Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Perikanan). Dukungan Sumber Daya Manusia untuk IKU dimaksud saat ini terdapat pemangku jabatan fungsional Surveyor Pemetaan sebanyak 3 orang, masih terdapat kebutuhan sebanyak 2 orang.

3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

3.3.8.1 Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Kematangan Keamanan Siber merupakan sebuah indikator yang mendeskripsikan tingkat kesiapan dan kemampuan sebuah organisasi untuk melindungi aset informasinya dari serangan siber, serta menilai efektivitas dari personil, proses, dan teknologi yang diterapkan. Indikator ini juga berguna untuk menunjukkan sejauh mana pendekatan organisasi dalam menghadapi insiden siber telah bergerak–dari pendekatan yang bersifat

reaktif ke pendekatan yang bersifat lebih proaktif dan strategik. Disamping itu, indikator ini juga dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan berbagai aspek yang perlu diberikan peningkatan agar terjadi peningkatan tingkat kematangan keamanan siber di organisasi tersebut. Adapun sebaran nilai serta bagaimana interpretasi dari nilai IKASANDI seperti disampaikan di atas, dapat diamati pada Gambar 21.

Pada Agustus tahun 2025, BSSN selaku tim penilai tingkat kematangan keamanan siber telah melakukan sosialisasi terkait instrumen penilaian tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi terkini yang harus diterapkan oleh organisasi atau Penyelenggara Sistem Elektronik [PSE], dengan nama IKASANDI v2.1. Berbeda dengan instrumen yang dipergunakan BSSN sebelumnya, Instrumen IKASANDI v2.1 ini memiliki dua bagian pengukuran, yaitu Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat Kematangan Persandian. Instrumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber untuk bagian keamanan siber serta Peraturan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2023 untuk bagian persandian. IKASANDI adalah hasil pemetaan dari berbagai instrumen pengukuran yang ada di BSSN dan dapat digunakan untuk mengukur PSE IIV (Infrastruktur Informasi Vital) sesuai Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023 (memiliki kategori Strategis) maupun PSE non IIV (memiliki kategori non Strategis). Instrumen ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi kematangan keamanan siber dan sandi pada kementerian/lembaga secara lebih menyeluruh dan mendalam, sehingga dapat membantu proses pembinaan kematangan keamanan siber dan sandi secara terstruktur dan terarah.



Gambar 24. Indeks Nilai Kematangan pada Instrumen IKASANDI v2.1

Evaluasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber ini dilaksanakan melalui metode wawancara terstruktur menggunakan instrumen berupa kuesioner. Akan tetapi, sebelum wawancara tersebut dilakukan, KKP terlebih dahulu diminta untuk menentukan kategori Sistem Elektronik agar dapat ditentukan jumlah kontrol yang akan dinilai, seperti dapat diamati pada Gambar 16. Oleh karena Sistem Elektronik di lingkup KKP tergolong ke dalam kategori tinggi, maka terdapat 179 kontrol yang digunakan sebagai indikator penilaian.

Tabel 28. Instrumen Kontrol IKASANDI v2.1

Jumlah Kontrol SE	Rendah	Tinggi	Strategis
Kontrol Identifikasi	31	56	59
Kontrol Proteksi	52	75	79
Kontrol Deteksi	4	9	12
Kontrol Penanggulangan dan Pemulihan	9	23	27
Total Kontrol Kamsiber	96	163	177
Kontrol Persandian	41	41	41
Irisan Kontrol Kamsiber dan Persandian	25	25	25
Total Keseluruhan	112	179	193

3.3.8.2 Analisa Capaian

Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berdasarkan surat Deputi Bidang

Keamanan Siber dan Pemerintahan dan Pembangunan BSSN Nomor T.1984/BSSN/D3/KS.01.02/08/2025 tanggal 22 Agustus 2025, bahwa penilaian tingkat kematangan siber tahun 2025 menggunakan instrumen IKASANDI. Berbeda dengan instrumen CSM v.1.10 yang dipergunakan BSSN dalam melakukan penilaian tingkat kematangan siber tahun 2024, IKASANDI v2.1 ini memiliki dua bagian pengukuran, yaitu Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat Kematangan Persandian. IKASANDI merupakan hasil pemetaan dari berbagai instrumen pengukuran seperti Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), instrumen pengukuran tingkat kematangan keamanan siber/*Cyber Security Maturity* (CSM), instrumen Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Siber (TMPI), dan CIS (*Critical Security Controls*) versi 8. Pada IKASANDI v.2.1 terdapat 5 domain, yaitu: Identifikasi, Proteksi, Deteksi, Penanggulangan Pemulihan, dan Persandian. Domain Tata Kelola yang menjadi salah satu domain pada penilaian instrumen CSM v.1.10 dilakukan perubahan sehingga domain tata kelola tidak berdiri sebagai satu domain khusus akan tetapi menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di masing-masing indikator pada instrumen IKASANDI. Oleh karena itu, walaupun pelaksanaan kegiatan keamanan siber telah dilaksanakan tetapi tanpa adanya kebijakan yang menjadi dasar, nilai pada indikator-indikator yang ada berada pada posisi rendah.

Berdasarkan Nota Dinas Pusat Data dan Informasi Nomor 3257/SJ.8/TU.140/X/2025 Perihal Kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian IKASANDI KKP Tahun 2025 Capaian indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP mendapatkan capaian sebesar **2,07** dari target sebesar 2. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 32,50% . Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan instrument penilaian Kematangan yang digunakan.

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	3,08	3,40	2,00	2,07	103,50	-32,50	2.00	103,50	2,4	86,25

3.3.8.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Melakukan kegiatan operasional keamanan TI;
2. Mengikuti sosialisasi dan asistensi kajian instrumen pengukuran tingkat kematangan dan penyelenggaraan persandian oleh BSSN;
3. Pembaharuan Sertifikat CSIRT-KKP
4. Melaksanakan penilaian tingkat kematangan siber dan sandi 2025 bersama tim BSSN
5. Melaksanakan surveilliance ISO 27001:2022 lingkup infrastruktur TI Pusdatin
6. Melakukan penyusunan draft kebijakan SMKI tingkat kementerian.



Gambar 25. Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) KKP

7. Melakukan penilaian mandiri terhadap instrumen penilaian IKASANDI v2.1 serta menyiapkan data dukung berupa:

- a. Dokumen: Kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), *manual book*, laporan audit, atau sertifikat terkait keamanan siber.
- b. Catatan Implementasi: Bukti rekaman konfigurasi sistem, *log* keamanan, hasil *penetration test*, atau laporan penanggulangan insiden.
- c. Pelaporan: Hasil penilaian mandiri yang akan dilaporkan ke BSSN.

Inovasi=inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan evaluasi rekomendasi hasil penilaian tingkat kematangan keamanan siber KKP yang dilaksanakan oleh BSSN;
2. Melakukan koordinasi untuk tindak lanjut draf kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) tingkat kementerian;
3. Pimpinan menentukan lokasi DRC (*Disaster Recovery Center*) (Pusat Pemulihan Bencana) dan BCP (*Business Continuity Plan*) (Rencana Kelangsungan Bisnis) dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung hal tersebut;
4. SOP terkait Keamanan TI akan diperbaharui.

3.3.8.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP melalui kegiatan Pelaksanaan Keamanan Siber dan Infrastruktur TI dengan anggaran awal senilai Rp1.905.980.000 sedangkan setelah efisiensi senilai Rp231.744.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp226.099.040,- atau 97,56%. Sumber Daya Manusia yang mendukung IKU dimaksud memangku sebagai Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 7 orang dan Statistisi sebanyak 2 orang, kebutuhan saat ini masih membutuhkan 2 orang Pranata Komputer yang mempunyai kompetensi dibidang keamanan jaringan.

3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

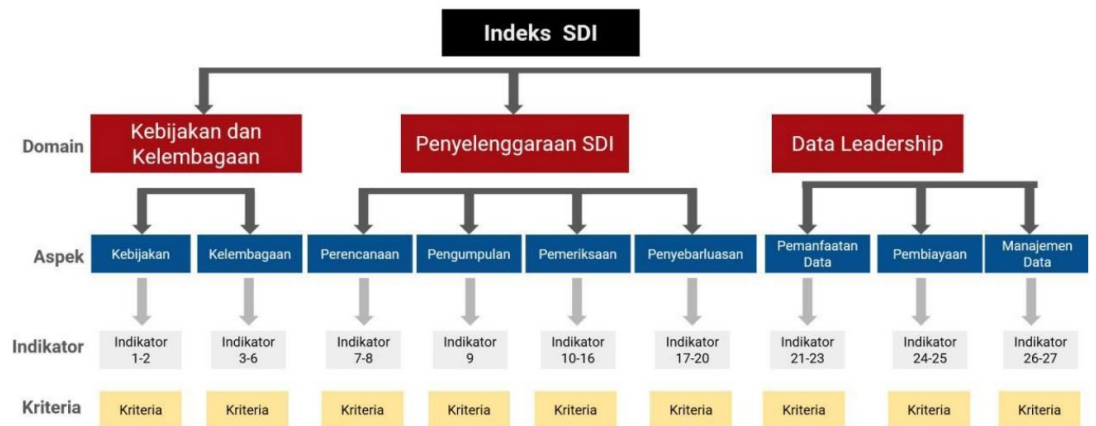
3.3.9.1 Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan alat bantu untuk mengukur penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Evaluasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia di instansi KKP berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam Lembar Kerja SDI.

Pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di KKP. Hasil evaluasi penyelenggaraan SDI akan dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan oleh pembina Satu Data Indonesia yaitu Kementerian PPN/Bappenas.

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.



Gambar 26. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Pengukuran Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :

1. Kebijakan;
2. Kelembagaan;
3. Perencanaan;
4. Pengumpulan;
5. Pemeriksaan;
6. Penyebarluasan;
7. Pemanfaatan;
8. Pembiayaan; dan
9. Manajemen Data.

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data *Leadership* dengan rincian struktur penilaian. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Pada Tahun 2025 terdapat 1 aspek penilaian baru yaitu Manajemen Data.

3.3.9.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 perihal Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 (Indeks SDI 2025) tanggal 31 Desember 2025, capaian Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar **83,69**.

Tabel 30. Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI KKP

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	98.46
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	73.86
3	Domain Data Leadership	24%	94.35
Indeks Satu Data Indonesia			83.69

Tabel 31. Nilai Indeks Aspek SDI KKP

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	8%	96.15
2	Aspek Kelembagaan	12%	100.00
3	Aspek Perencanaan	14%	89.29
4	Aspek Pengumpulan	12%	50.00
5	Aspek Pemeriksaan	14%	65.94
6	Aspek Penyebarluasan	16%	85.17
7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	100.00
8	Aspek Pembiayaan	6%	91.67
9	Aspek Manajemen Data	6%	85.71

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Triwulan IV 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	89,17	64,68	64,68	83.69	129,39	36,99	64,68	129,39	66,5	125,85

Jika dibandingkan dengan capaian indeks SDI tahun 2024 (64,68), capaian pada tahun 2025 (83,69) mengalami kenaikan sebesar 36,99% hal ini dikarenakan naiknya nilai Domain sebagai berikut:

1. Domain Kebijakan dan Kelembagaan dengan bobot 20% dengan nilai 98,46;
2. Domain Penyelenggaraan SDI dengan bobot 56% dengan nilai 73,86;
3. Domain Data Leadership dengan bobot 24% dengan nilai 94.35.

3.3.9.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya Perbaikan dan upaya penyempurnaan yang telah dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Keikutsertaan dalam *Workshop* Gotong Royong Data (WGRD) 2025 Seri VII melalui rapat koordinasi pra-Forum Penyepakatan Rencana Induk Jangka Menengah Data Prioritas 2025–2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai upaya mendukung peningkatan tata kelola dan integrasi data kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan koordinasi internal antar unit kerja dalam rangka harmonisasi data kelautan dan perikanan, dan verifikasi sumber data untuk mendukung penerapan prinsip Satu Data Indonesia;
3. Penyusunan dan pembaruan daftar data prioritas kelautan dan perikanan sebagai bagian dari penyelarasan dengan Rencana Induk Data Prioritas Nasional 2025–2029.
4. Partisipasi dalam pendampingan teknis dan forum berbagi praktik baik (*knowledge sharing*) mengenai tata kelola data dan interoperabilitas sistem informasi sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah melakukan persiapan penilaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), meliputi koordinasi dengan unit terkait, pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung, serta pemenuhan indikator dan eviden penilaian tingkat maturitas data kelautan dan perikanan.

3.3.9.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Penyusunan Data Statistik Nasional dengan anggaran awal senilai Rp194.475.000,- sedangkan setelah efisiensi anggaran senilai Rp5.994.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp5.994.000,- atau 100% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jabatan fungsional Statistisi, Pranata Komputer dan Perencana.

3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

3.3.10.1 Definisi Indikator Kinerja

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Arsitektur SPBE diterapkan dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yakni pada lingkup Nasional, lingkup Instansi Pusat, dan lingkup Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, SPBE bukan hanya merupakan IKU KKP dan Pusdatin, tapi juga menjadi bagian penting dalam program Reformasi Birokrasi (RB).

3.3.10.2 Analisa Capaian

IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian PAN RB. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan unit kerja terhadap kebijakan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan, termasuk keselarasan antar proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur TIK, dan keamanan informasi, dalam rangka mendukung integrasi layanan dan efektifitas penyelenggaraan SPBE.

Berdasarkan Aplikasi SIA SPBE nilai Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE mendapatkan capaian senilai 3, hasil capaian sebagaimana dapat dilihat pada tangkapan layar berikut:

Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE

Download Rekap Excel

10 entries per page

Search:

Instansi	Arsitektur As-Is					Arsitektur To-Be					Peta Rencana	Clearance	Reviu dan Evaluasi	Tingkat Kematangan	Aksi		
	Proses Bisnis	Layanan	Data & Info	Aplikasi	Infra	Keamanan	Proses Bisnis	Layanan	Data & Info	Aplikasi						Infra	Keamanan
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	1	25	90	19	21	1	1	1	22	25	32	1	Sudah Ada	Belum	Belum	3	Refresh
Kementerian Investasi dan Hilirisasi(Badan Koordinasi Penanaman Modal	9	31	64	59	295	13	0	0	0	2	1	3	Sudah Ada	Sudah	Belum	4	Refresh
Kementerian Kebudayaan	9	162	74	98	18	53	0	0	0	0	1	0	Belum	Belum	Belum	2	Refresh
Kementerian Kehutanan	17	3	15	10	9	1	19	0	12	1	0	0	Sudah Ada	Belum	Belum	3	Refresh
Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	7	18	145	163	4	2	3	3	5	5	2	Sudah Ada	Belum	Belum	3	Refresh
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	57	11	245	39	670	17	2	0	59	21	143	6	Sudah Ada	Belum	Belum	3	Refresh
Kementerian Kesehatan	4	26	72	470	543	27	1	1	2	17	20	2	Sudah Ada	Sudah	Belum	4	Refresh
Kementerian Ketenagakerjaan	27	10	56	127	121	19	0	0	0	1	24	0	Sudah Ada	Sudah	Belum	4	Refresh
Kementerian Keuangan	2	170	31	197	317	70	0	0	0	1	51	12	Sudah Ada	Sudah	Belum	4	Refresh
Kementerian Komunikasi dan Digital	12	137	390	227	316	60	0	33	42	105	699	28	Sudah Ada	Belum	Belum	3	Refresh

Gambar 27. Nilai Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE pada Aplikasi SIA SPBE

Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	2	3	3	3	100,00	-	3	100,00	4	75,00

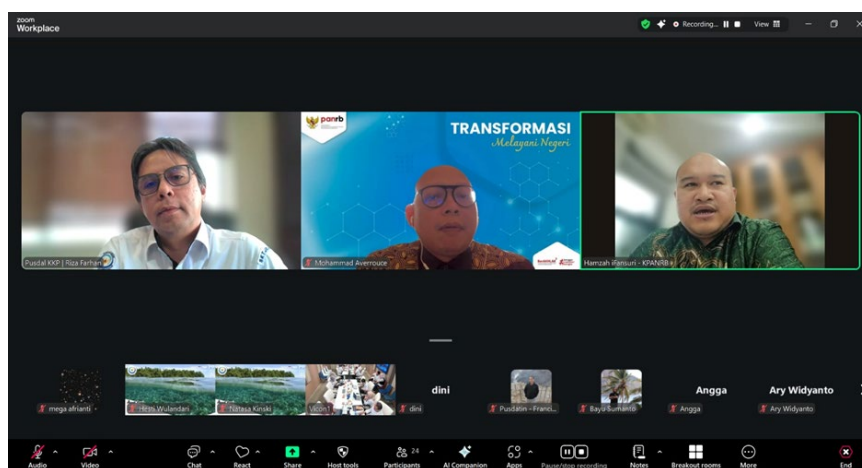
Dengan nilai IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP Tahun 2025 yang didapat menunjukkan bahwa kebijakan arsitektur SPBE telah dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh unit kerja, sehingga mendukung integrasi sistem, peningkatan kualitas layanan elektronik, serta pencapaian Indeks SPBE KKP secara berkelanjutan. Dari Aplikasi SIA SPBE dapat diketahui bahwa kebijakan arsitektur SPBE KKP telah disusun sebagai kerangka acuan utama dalam penyelenggaraan SPBE, yang mencakup keselarasan proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi.

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE merupakan indikator strategis yang memastikan bahwa transformasi digital KKP berjalan terarah dan terkendali. Implementasi arsitektur SPBE yang konsisten menjadi pondasi integrasi sistem, efisiensi anggaran TIK, serta peningkatan kualitas layanan digital. Oleh karena itu, indikator ini menjadi alat kendali pimpinan dalam memastikan keselarasan kebijakan, program, dan pengembangan TIK lintas unit kerja. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 senilai 3, capaian tahun 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan capaian.

3.3.10.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Pembahasan *clearance* belanja SPBE pra dipa tahun anggaran 2026;
2. Koordinasi Pembahasan *Clearance* Pusdatin tahun anggaran 2025 dan 2026 dengan Kemenpanrb;
3. Pembahasan rekomendasi (*clearance*) belanja TIK KKP tahun 2025;
4. Koordinasi dengan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian PPN/Bappenas terkait permohonan rekomendasi (*clearance*) belanja TIK KKP tahun 2025;
5. Memfasilitasi penambahan kapasitas *repository drive*.



Gambar 28. Pembahasan Clearance dengan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian Bappenas

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon I untuk permohonan fasilitasi clearance belanja TIK tahun anggaran 2026;
2. Melakukan rapat pembahasan evaluasi belanja SPBE tahun anggaran 2026;
3. Menindaklanjuti apabila terdapat permintaan penambahan kapasitas repository.

3.3.10.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP melalui kegiatan Penyusunan *Grand* Desain Arsitektur dan Peta dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang tercantum pada KepMen KP Nomor 22/SJ Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KKP. dengan anggaran awal senilai Rp793.520.000,- sedangkan realisasi per 30 September 2025 senilai Rp0,- atau 0% dikarenakan terdampak efisiensi anggaran. Penggunaan Sumber Daya Manusia dengan pemangku jabatan fungsional Pranata Komputer pada IKU ini sudah terpenuhi sebanyak 19 orang.

3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP

3.3.11.1 Definisi Indikator Kinerja

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data Indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

3.3.11.2 Analisa Capaian

Indikator Kegiatan Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP merupakan indikator kegiatan yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan surat dari Badan Pusat Statistik nomor B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025, pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Instansi Pusat dilakukan

dalam rentang waktu 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, rencana Grand Design RB 2025-2045 dan Roadmap RB 2025 - 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Sehingga capaian pada tahun 2025 ini menggunakan data capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar **2,73** dari target sebesar 2,7 pada tahun 2025.

Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	2,68	2,73	2,70	2,73	101,11	-	2,7	101,11	2,77	98,56

3.3.11.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah adanya kegiatan pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor, yaitu BPS melakukan pelatihan Penjaminan Kualitas Data melalui Quality Gates dan pelatihan untuk produsen data cara pengajuan rekomendasi pada aplikasi ROMANTIK BPS dan pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh pembina statistik sektoral.



Gambar 29. Kegiatan pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Upaya penyempurnaan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, akan mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Eselon I lingkup KKP untuk penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, terkendala dikarenakan dengan adanya efisiensi anggaran nasional, sehingga BPS meniadakan penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP untuk tahun 2025.

3.3.11.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Data dan Statistik dengan anggaran awal senilai Rp262.660.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp8.748.000,- sedangkan realisasi per 30 September 2025 senilai Rp8.078.800.- atau 92,35%. Dukungan Sumber Daya Manusia pada IKU dimaksud mayoritas pemangku jabatan fungsional statistisi sebanyak 17 orang dan telah terpenuhi kebutuhannya.

3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP

3.3.12.1 Definisi Indikator Kinerja

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) yang

dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). IPP berfungsi sebagai instrumen pengukuran tingkat kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja pemerintah, dengan menilai aspek standar pelayanan, profesionalisme aparatur, sarana prasarana, serta mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pada pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri, disampaikan bahwa perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat 2 huruf b, yaitu salah satu tugas Penanggung jawab atau Pimpinan pelayanan publik adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Dengan demikian, diperlukan strategi khusus berupa pelaksanaan PEKPPP yang dilakukan secara mandiri, agar dapat melihat lebih jauh dampak yang diharapkan. Terdapat 2 (dua) bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional dan PEKPPP Mandiri Instansional. Untuk PEKPPP Mandiri Nasional, nilai Indeks Pelayanan Publik diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Sedangkan PEKPPP Mandiri Instansional dilakukan oleh instansi masing-masing, tanpa keterlibatan Kementerian PANRB dalam proses pelaksanaannya, serta yang menerbitkan Indeks Pelayanan Publik adalah instansi terkait.

Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, IPP memiliki relevansi strategis karena unit-unit kerja di lingkungan KKP merupakan penyelenggara layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan. Kualitas pelayanan yang diberikan tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga pada keberhasilan program pembangunan kelautan dan perikanan serta peningkatan daya saing nasional. Dengan menjadikan IPP sebagai

indikator kinerja, KKP menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari capaian program dan output administratif, tetapi juga dari **kepuasan, kepercayaan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat atas layanan publik**. Hal ini sejalan dengan visi reformasi birokrasi, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.3.12.2 Analisa Capaian

IKU Indeks Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) atau disebut sebagai PEKPPP Mandiri Nasional. Kegiatan telah dilaksanakan sejak 1 September 2025 dan tuntas sejak dilakukan penetapan hasilnya pada 9 Januari 2026 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025.

PEKPPP Mandiri Nasional Tahun 2025 dilakukan dengan mekanisme penetapan 1 (satu) Unit Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) sebagai Lokus Penilaian. Berdasarkan 3 (tiga) usulan KKP, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ditetapkan sebagai Lokus PEKPPP 2025 sebagai representasi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

Pusdatin berkolaborasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Inspektorat II melaksanakan 5 (lima) kali pendampingan dan/atau *self assessment* atas kesiapan BPKIL Serang selama periode September s.d Oktober 2025 menggunakan 2 instrumen penilaian. Mekanisme pelaksanaan PEKPPP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PEKPPP pada BPKIL Serang dilaksanakan terhadap jenis pelayanan administratif, yaitu Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan produk layanan berupa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium;
2. Instrumen PEKPPP Nasional 2025 yang digunakan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a) instrumen eksisting mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023, menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP); dan
 - b) uji coba instrumen baru mengacu Surat Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025, sebagai *baseline* PEKPPP Tahun 2026;
3. Linimasa PEKPPP Nasional Tahun 2025, sebagaimana berikut:

Tabel 35. Linimasa PEKPPP Nasional Tahun 2025

No.	Kegiatan	Batas Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Kick Off Pelaksanaan PEKPPP	1 September 2025	Kementerian PANRB (daring)
2.	Penyusunan LKE Instrumen Uji Coba (F01, F02, dan F04)	8 September 2025	Pusdatin
3.	<u>PEKPPP Instrumen Eksisting:</u> a) Pengisian F01 b) Penyebarluasan F03 c) Pengisian F02-B	29 September 2025	Melalui sistem https://evaluasi.menpan.go.id/
4.	<u>PEKPPP Instrumen Uji Coba:</u> a) Pengisian F01 b) Penyebarluasan F03 c) Pengisian F02 (KKP) d) Pengisian F04	27 Oktober 2025	Melalui sistem https://evaluasi.menpan.go.id/ dan LKE Ms. Excel
5.	Desk Evaluation oleh Evaluator Kementerian PANRB	10 Oktober 2025	Luring: Hotel Mercure Jakarta

No.	Kegiatan	Batas Waktu Pelaksanaan	Keterangan
6.	Finalisasi F02 oleh Evaluator Kementerian PANRB	Oktober s.d November 2025	Perbaikan data dukung oleh Lokus apabila diperlukan
7.	Penetapan hasil akhir PEKPPP 2025	Desember 2025	Output: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

4. Untuk mendukung PEKPPP Mandiri Nasional, KKP wajib melaksanakan PEKPPP Mandiri Instansional terhadap minimal 25% dari total Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP). Berdasarkan hasil identifikasi, KKP melaksanakan PEKPPP Mandiri Instansional atas 41 Lokus OP untuk dilaporkan kepada Kementerian PANRB.
5. Diluar poin 4 diatas, Pusdatin tetap mengkoordinasi pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional atas 61 OP Nonlokus sebagai bahan evaluasi internal dan persiapan menghadapi PEKPPP Tahun 2026.
6. Perlunya pendataan sebanyak 5 s.d 10 unit Organisasi Penyelenggara (OP) sebagai bahan pertimbangan Kementerian PANRB dalam melakukan *mystery shopper* pelayanan publik. Berdasarkan hasil identifikasi, 8 (delapan) OP yang diusulkan KKP sebagai berikut:

Tabel 36. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) yang menjadi Lokus Mystery Shopper pada PEKPPP Mandiri Instansional

NO.	ESELON I	LOKUS MYSTERY SHOPPER
1.	DJPRL	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang
2.	DJPK	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak
3.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap
4.	DJPB	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung
5.	DJPDSPKP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BP3KP)
6.	DJPSDKP	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual
7.	BPPSDMKP	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal
8.	BPPMHKP	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, hasil PEKPPP Tahun 2025 atas Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Indeks Pelayanan Publik adalah 4,80 kategori A (Pelayanan Prima). Analisis atas capaian Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Konsistensi Kinerja Pelayanan Publik

- a) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mempertahankan capaian **Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,80** pada tahun 2025, sama dengan capaian tahun 2024;
- b) Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik KKP telah mencapai tingkat yang sangat baik dan mampu dipertahankan secara konsisten, meskipun terdapat perubahan mekanisme evaluasi dan keterbatasan kondisi pelaksanaan.

2. Perubahan Instrumen Evaluasi

- a) Tahun 2025 terdapat dua instrumen evaluasi, yaitu instrumen eksisting (LKE) yang telah digunakan sejak 2023, serta instrumen baru yang masih dalam tahap uji coba;
- b) Instrumen baru belum menjadi pembentuk indeks penilaian, sehingga capaian tetap mencerminkan kualitas layanan berdasarkan instrumen utama;
- c) KKP mampu menyesuaikan diri dengan instrumen tambahan tersebut, memastikan seluruh dokumen dan data pendukung tetap memenuhi standar tinggi.

3. Efisiensi Anggaran dan Mekanisme Penilaian

- a) Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penilaian dilakukan tanpa validasi lapangan, hanya melalui dokumen elektronik yang dikirimkan melalui sistem penilaian;

- b) Meskipun mekanisme lebih terbatas, KKP tetap mampu menyajikan dokumen yang lengkap, valid, dan sesuai standar sehingga skor tidak mengalami penurunan;
- c) Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik KKP tidak bergantung pada metode penilaian, melainkan pada substansi layanan yang diberikan.

4. Beban Tambahan Administratif

- a) Tahun 2025 terdapat kewajiban tambahan berupa PEKPPP Mandiri Instansional sebanyak 25% OP serta permintaan data tambahan untuk pertimbangan evaluasi;
- b) Beban kerja meningkat dalam kurun waktu yang lebih singkat, namun KKP mampu menyesuaikan dan memastikan seluruh kewajiban terpenuhi dengan baik;
- c) Keberhasilan ini menunjukkan komitmen KKP dalam menjaga kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi tekanan administratif yang lebih besar.

5. Target Kinerja Utama Terlampaui

- a) Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,60, sedangkan capaian tetap 4,80;
- b) Hal ini menegaskan bahwa KKP tidak hanya konsisten mempertahankan kualitas, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 37. Perbandingan Hasil Indeks Pelayanan Publik KKP

Kondisi	Tahun 2024	Tahun 2025
Lokus Evaluasi	Sudah pernah menjadi lokus PEKPPP tahun sebelumnya: BPSPL Pontianak	Lokus baru yang belum pernah diusulkan: BPKIL Serang

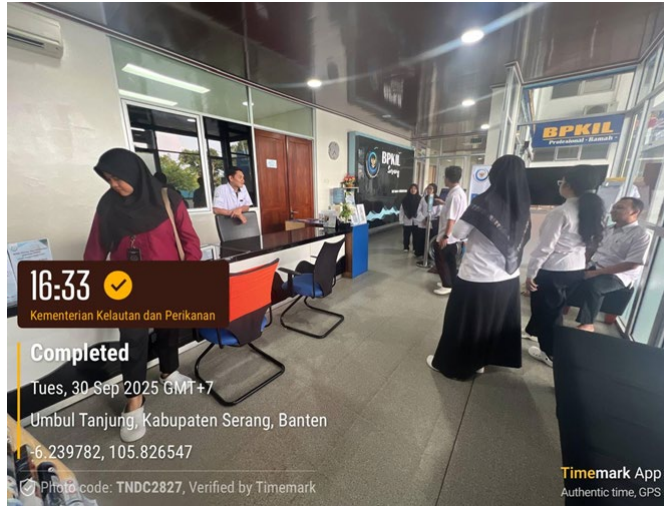
Kondisi	Tahun 2024	Tahun 2025
Instrumen Evaluasi	Menggunakan 1 instrumen eksisting (LKE) yang digunakan sejak 2023	- Menggunakan 2 instrumen evaluasi, terdiri dari: - Instrumen eksisting (LKE yang digunakan sejak 2023); - Instrumen baru (LKE yang baru diujicobakan pada tahun 2025); - Meskipun instrumen baru tidak menjadi pembentuk indeks penilaian, namun tetap menjadi beban bagi Pimpinan dan Pegawai BPKIL Serang sebagai Lokus PEKPPP. - Kementerian PANRB belum menetapkan pedoman atas instrumen baru sehingga Pusdatin selaku koordinator perlu menyusun Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sendiri.
Waktu Pelaksanaan	Pendampingan s.d validasi lapangan: Juni s.d September 2024	Pendampingan s.d <i>desk evaluation</i> : September s.d Oktober 2025 (waktu lebih singkat)
Anggaran Kegiatan	Normal	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak dilakukan validasi lapangan oleh evaluator Kementerian PANRB, sehingga penilaian hanya berdasarkan dokumen elektronik yang dikirim melalui sistem penilaian.
Mekanisme	Tidak ada tambahan/perubahan	Adanya permintaan data tambahan PEKPPP yang diperlukan sehingga menjadi beban tambahan dalam kurun waktu yang lebih pendek, meliputi: - Kewajiban PEKPPP Mandiri Instansional sebanyak 25% dari total Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OP) dan berlaku secara umum untuk semua Kementerian/Lembaga/Daerah; - Pendataan 5-10 OP sebagai lokus pertimbangan Kementerian PANRB dalam melakukan <i>mystery shopper</i>.
Hasil IPP	4.80	4.80
Target IPP	4.59	4.60

Keberhasilan KKP dalam mempertahankan Nilai IPP Tahun 2025 menunjukkan komitmen terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menunjukkan ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika kebijakan dan mekanisme evaluasi. Hal utama yang mendorong keberhasilan, yaitu:

1. Kolaborasi yang baik antara Pusdatin selaku koordinator, Sekretariat selaku penanggungjawab organisasi, tata laksana, dan pelayanan publik Eselon I, dan Inspektorat II selaku Auditor Pelayanan Publik;
2. Komitmen perbaikan kualitas pelayanan publik KKP melalui PEKPPP Mandiri Instansional yang menyeluruh ke seluruh OP yang dilaksanakan oleh Tim PEKPPP Mandiri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/SJ Tahun 2025; dan
3. Dukungan dan komitmen penuh Pimpinan OP sebagai Lokus PEKPPP Tahun 2025, yaitu BPKIL Serang, dimana Kepala Balai terlibat penuh sepanjang kegiatan pendampingan, *self assesment*, peninjauan sarana prasarana hingga *desk evaluation*.



Gambar 30. Pendampingan dan pengisian F02B atas Lokus PEKPPP Nasional pada BPKIL Serang



Gambar 31. Peninjauan Sarana Prasarana Pelayanan pada BPKIL Serang



Gambar 32. Desk Evaluation PEKPPP Tahun 2025 oleh Evaluator Kementerian PANRB

Tabel 38. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks Pelayanan Publik KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	4,64	4,80	4,60	4,80	104,35	-	4,60	104,35	4,8	100

Indeks Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 dan berjalan sampai dengan saat ini. Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2024 (104,58%), capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,23% hal ini dikarenakan capaian Indeks Pelayanan Publik KKP tahun 2025 sama dengan tahun 2024 dengan target yang meningkat.

3.3.12.3 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mempertahankan capaian **Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,80** pada tahun 2025, sama dengan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi kualitas pelayanan publik KKP yang tetap berada pada kategori Pelayanan Prima (A), meskipun terdapat perubahan instrumen evaluasi, kebijakan efisiensi anggaran, serta tambahan beban administratif yang harus diselesaikan dalam waktu lebih singkat.

Namun demikian, capaian yang konsisten ini sekaligus menjadi momentum bagi KKP untuk melakukan **upaya perbaikan berkelanjutan**. Perubahan instrumen evaluasi yang mulai diujicobakan, mekanisme penilaian berbasis sistem aplikasi, serta kewajiban tambahan jumlah Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OP) yang harus dilakukan evaluasi menuntut adanya strategi yang lebih sistematis. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian Indikator Kinerja Organisasi, disusun **Rencana Aksi Perbaikan Indeks Pelayanan Publik**. Rencana ini dirancang untuk memperkuat kesiapan internal, mekanisme penilaian, serta meningkatkan kapasitas OP yang diusulkan sebagai Lokus.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilakukan selanjutnya sebagai inovasi rencana aksi mendukung Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik, yaitu:

1. Penguatan Instrumen Evaluasi, dengan:
 - a) Menyusun kertas kerja evaluasi internal atas instrumen baru PEKPPP yang dapat digunakan bersama lingkup KKP;

- b) Melakukan pengenalan teknis bagi OP dan Sekretariat agar adaptasi terhadap instrumen baru berjalan lancar.
- 2. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi, yaitu dengan Kementerian PANRB terkait kejelasan mekanisme dan *timeline* pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026.
- 3. Optimalisasi Mekanisme Penilaian, dengan mengembangkan sistem *monitoring* internal berbasis digital untuk memastikan kelengkapan data sebelum dikirim ke evaluator.
- 4. Peningkatan Kapasitas Lokus Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OP), dengan memastikan kewajiban PEKPPP Mandiri Instansional KKP dilaksanakan dengan komitmen peningkatan sasaran lokus evaluasi.
- 5. Penetapan Target Indeks Pelayanan Publik, dengan pendekatan terbaik dan rasional melalui keterlibatan pengampu pelayanan publik masing-masing Unit Eselon I.

3.3.12.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan anggaran awal senilai Rp581.530.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp476.000,- telah realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp476.000,- atau 100%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukung Iku dimaksud adalah para jabatan fungsional Penata Perijinan yang saat ini berjumlah 6 orang pada PTSA, dan masih membutuhkan kurang lebih 4 orang.

3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

3.3.13.1 Definisi Indikator Kinerja

Dalam rangka melaksanakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi, Ombudsman melaksanakan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan rangkaian kegiatan sistematis dengan dimensi yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya pengawasan Ombudsman untuk menyatakan Opini.

Indikator Kinerja tingkat kepatuhan standar pelayanan publik dalam konteks penilaian maladministrasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggara pelayanan publik melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, indikator ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memastikan bahwa setiap unit pelayanan publik bekerja sesuai dengan norma hukum, etika, dan standar pelayanan yang berlaku.

Indikator kinerja kepatuhan standar pelayanan publik dalam penilaian maladministrasi juga mencerminkan tingkat integritas dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin kecil potensi terjadinya maladministrasi, karena setiap proses pelayanan berjalan transparan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator ini biasanya diukur melalui evaluasi terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan, seperti kejelasan prosedur, kepastian waktu, biaya, produk layanan, serta mekanisme pengaduan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kualitas interaksi antara aparatur dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Selain itu, indikator ini berperan sebagai tolok ukur dalam upaya perbaikan berkelanjutan di bidang pelayanan publik. Hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang rawan maladministrasi. Dengan adanya indikator ini, organisasi penyelenggara pelayanan publik dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada akhirnya, indikator kinerja kepatuhan standar pelayanan publik menjadi instrumen strategis untuk mencegah maladministrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas, profesional, adil, kerahasiaan, keterbukaan,

dan partisipatif. Penilaian dilaksanakan oleh Ombudsman dan dapat melibatkan pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan. Ombudsman dapat melibatkan masyarakat dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai bentuk pengawasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik atas pelayanan barang, jasa, dan/atau administratif. Penilaian dimaksud dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif, dan diukur berdasarkan unsur penilaian dimensi, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan.

3.3.13.2 Analisa Capaian

IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Pada Tahun 2025 Penilaian dilaksanakan pada 3 s.d. 5 November 2025 sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga terdapat unsur penilaian baru dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Tahun 2025 menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan belum rilisnya hasil capaian tahun 2025 oleh Ombudsman.

Tabel 39. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	88,86	90,15	88,87	90,15	101,44	-4,62	88,87	101,44	88,99	101,44

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Capaian berupa tabel realisasi IKU merupakan capaian selama 2 tahun dari Tahun 2023-2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (106,06%), capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4,62% dikarenakan capaian tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Ombudsman maka perbandingan menggunakan capaian tahun 2024 dengan target yang meningkat di tahun 2025.



Gambar 33. Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman

3.3.13.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menyampaikan rekomendasi Ombudsman RI yang perlu ditindaklanjuti kepada penyelenggara layanan berdasarkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 6/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
2. Melaksanakan koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI melalui kegiatan rapat dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan Eselon I unit penyelenggara layanan terkait. Selanjutnya hasil penyelesaian tindak lanjut dimaksud telah disampaikan kepada Ombudsman RI melalui Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian

Kelautan dan Perikanan Nomor B.163/MEN-SJ/TU.220/II/2025 tanggal 20 Februari 2025.

3. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan pegawai pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai antara 78,00 - 10,00 (zona hijau) berdasarkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024. Penghargaan yang diberikan berupa sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 5 lokus Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai.
4. Rekapitulasi atas seluruh layanan publik yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan jenis layanan OSS dan Non OSS per Eselon I sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 40. Jenis layanan OSS dan Non OSS per Eselon I KKP

Unit Eselon I	Layanan OSS	Layanan Non OSS	Total
SETJEN		1	1
DJPRL	1	1	2
DJPK	10	7	17
DJPT	4	36	40
DJPB	6	8	14
DJPDSPKP	3	8	11
DJPSPDKP		5	5
BPPSDMKP	6	7	13
BPPMHKP		23	23
KKP	30	96	126

5. Penyampaian hasil pendataan Nama Layanan Publik dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagai data awal

kegiatan penilaian tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik Tahun 2025 melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.574/MEN-SJ/TU.220/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025.

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, yaitu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Eselon I lingkup KKP dalam rangka pembahasan instrumen penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dan penyusunan Standar Pelayanan PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

3.3.13.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan Penyusunan Standar Layanan Perizinan Terpadu dengan anggaran pagu awal senilai Rp116.350.000,- sedangkan pagu setelah efisiensi senilai Rp3.432.000,- telah direalisasikan per 31 Desember 2025 senilai Rp3.432.000,- atau 100,55%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukung Iku dimaksud adalah para jabatan fungsional Penata Perijinan yang saat ini berjumlah 6 orang pada PTSA, dan masih membutuhkan kurang lebih 4 orang.

3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP

3.3.14.1 Definisi Indikator Kinerja

Dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat

segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkungan KKP.

3.3.14.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja SKM merupakan Indikator Kinerja yang dihitung berdasarkan periode triwulanan. Pengukuran SKM dilaksanakan atas pelayanan publik administratif, barang, dan jasa mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan validasi dilakukan setiap triwulan secara berjenjang, dimana di level Pusat validasi dilaksanakan bersama Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan selaku administrator Eselon I penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Nota Dinas Pusat Data dan Informasi Nomor 95/SJ.8/TU.140/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 dengan perihal Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP periode Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar **93,19** dengan kategori '**Sangat Baik**'.

Tabel 41. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan IV Tahun 2025

Unit Eselon I	UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Layanan dilaksanakan SKM	Jumlah Responden	Nilai IKM
DJPRL	1	1	2	49	85,71
DJPK	13	11	11	461	94,47
DJPT	26	26	39	4.133	92,42
DJPB	16	16	20	1.384	93,98
DJPDSPKP	3	3	9	53	92,77
DJPSDKP	15	15	5	2.202	93,81
BPPSDMKP	38	33	14	2.869	90,19
BPPMHKP	48	48	13	3.766	95,88
SETJEN*	2	2	38	191	88,25
KKP	162	155	112	15.108	93,19 Sangat Baik

*) Termasuk layanan konsultasi tatap muka pada PTSA KKP

Rincian nilai per Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan VI Tahun 2025 yaitu:

Tabel 42. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan IV Tahun 2025

Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1 - Persyaratan Layanan	3,764
U2 - Kemudahan Prosedur	3,739
U3 - Waktu Penyelesaian	3,722
U4 - Kesesuaian Biaya	3,732
U5 - Kesesuaian Produk	3,727
U6 - Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas	3,703
U7 - Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas	3,724
U8 - Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3,725
U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana	3,714

Tabel 43. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan IV 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Survei Kepuasan Masyarakat KKP											
Realisasi Triwulan IV 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% Kenaikan TW IV 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	-	91,47	89,60	93,19	104,01	0,42	89,60	104,01	89,95	103,60

Pada Tabel diatas terlihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat KKP adalah **93,19** yang artinya capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 89,60 dengan capaian **104,01%**. Analisis atas hasil SKM KKP Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden sebanyak 15.108 menunjukkan partisipasi masyarakat atas 112 layanan yang dilakukan survei pada 155 OP. Jumlah ini mengalami penurunan 7% dibandingkan Triwulan III Tahun 2025, namun menunjukkan trend kenaikan 2% bila dibandingkan dengan periode survei yang sama tahun sebelumnya, yaitu Triwulan IV Tahun 2024;
2. Hanya terdapat 7 (tujuh) OP yang tidak memiliki responden SKM dikarenakan belum adanya pemohon layanan terkait. Sementara itu, 2 (dua) OP dengan responden tunggal dianggap valid karena selaras

dengan produk layanan yang diberikan, yaitu pada Direktorat Jasa Bahari dan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus; dan

3. Keseluruhan nilai unsur pelayanan atas IKM KKP mendapatkan Nilai rata-rata (NRR) lebih dari 3 (tiga) dengan rata-rata keseluruhan 3,728 dan menghasilkan IKM sebesar 93,19. Analisis unsur pelayanan dengan nilai terendah dilakukan secara mandiri di level OP sebagai penyelenggara layanan untuk menentukan kesesuaian tindak lanjut perbaikan. Hasil SKM KKP menunjukkan salah satu unsur terendah layanan adalah U6 - Kecepatan Respon atau Kompetensi Petugas.

3.3.14.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

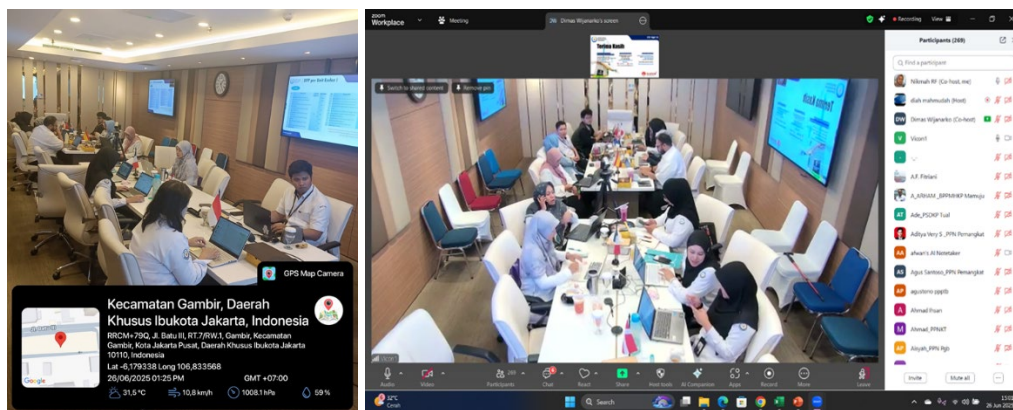
Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan selama tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP secara berkala, yaitu Triwulan I s.d. IV Tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Bab V Pasal 8;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan SKM KKP per Triwulan kepada seluruh Eselon I penyelenggara pelayanan publik melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi setelah seluruh hasil survei dinyatakan valid;
3. Melakukan *remapping* Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP), Layanan/Produk Layanan mengacu SOTK KKP terbaru dan pembaharuan Jenis Layanan dan Produk Layanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025;
4. Melakukan pembaharuan *mapping* OP dan layanan pada aplikasi *Tools SKM Online KKP* (<https://ptsp.kkp.go.id/skm>) dan melaksanakan bimbingan teknis secara luring dan daring kepada seluruh administrator pengelola SKM, baik di Pusat maupun UPT.
5. Menyampaikan kewajiban pelaporan SKM Nasional bagi seluruh OP, menghimpun seluruh data dan laporan SKM per OP selama tahun 2025, yang terdiri dari periode triwulan I, II, dan III;

6. Melakukan rekapitulasi data SKM dan laporan hasil pelaksanaan SKM Tahun 2025 per jenis layanan dan per OP untuk menghitung angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KKP yang menjadi *baseline* capaian pada Indeks Reformasi Birokrasi dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian PANRB.



Gambar 34. Validasi SKM KKP TW IV Tahun 2025



Gambar 35. Sosialisasi Pembaharuan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM KKP

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Mempertahankan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP per triwulan, dimulai dari Triwulan I Tahun 2026;

2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait instruksi penyelenggaraan SKM *Online* Nasional melalui pemanfaatan bersama aplikasi skm.go.id lingkup Kementerian/Lembaga/Daerah;
3. Menyusun master data OP dan Layanan Publik Lingkup KKP sebagai *baseline* implementasi SKM Online Nasional berdasarkan strategi yang paling sesuai dan disepakati bersama Eselon I penyelenggara layanan;
4. Membentuk Tim Pengelola SKM Online sebagai perwakilan masing-masing OP dan Eselon I Penyelenggara di Lingkungan KKP dan membuat akun pengguna aplikasi skm.go.id bagi pegawai yang ditugaskan sebagai admin;
5. Evaluasi dan/atau koordinasi internal KKP sesuai kebutuhan terkait implementasi SKM Online.

3.3.14.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP melalui kegiatan Monev Layanan Perizinan Terpadu dengan anggaran awal senilai Rp513.200.000,- sedangkan pagu setelah efisiensi senilai Rp55.124.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp54.958.780,- atau 99,70%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukung Iku dimaksud adalah para jabatan fungsional Penata Perijinan yang saat ini berjumlah 6 orang pada PTSA, dan masih membutuhkan kurang lebih 4 orang.

3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

3.3.15.1 Definisi Indikator Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan pengetahuan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian Mandiri SAKIP ini mengacu kepada Pedoman Evaluasi AKIP lingkup Sekretariat Jenderal yang disusun Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyesuaian atas Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, serta memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Penilaian Mandiri SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP setiap Unit Eselon II dengan meliputi beberapa ruang lingkup, yaitu:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

3.3.15.2 Analisa Capaian

IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan. Pada Rabu sd Kamis, 2 s.d 3 Juli 2025 telah dilaksanakan Penilaian SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal dan berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Nomor B.939/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 16 September 2025 dengan perihal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025, hasil evaluasi, AKIP Pusdatin Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **87,15** dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan) dari target 87 dengan persentase capaian senilai 100,17%. Rincian hasil evaluasi AKIP sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 44. Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,90	26,10	27,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	26,10	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,60	13,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	19,75	22,50
Nilai Hasil Evaluasi Predikat Penilaian		100	87,15 A (Memuaskan)	84,55 A (Memuaskan)	87,15 A (Memuaskan)

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 84,55 (realisasi 100,65%), capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,48%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan target kinerja pada tahun 2025, dari 84,00 pada tahun 2024 menjadi 87,00 pada tahun 2025, sehingga meskipun realisasi kinerja relatif stabil, persentase capaian terhadap target mengalami penurunan.

Tabel 45. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
96,15	97,88	94,33	87,15	84,55	87	87,15	100,17	-0,48	87	100,17	87,8	99,26

3.3.15.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Meng-*upload* dokumen kelengkapan SAKIP Pusdatin ke dalam *google drive*, <http://bit.ly/DokumenSAKIPSetjen>, <https://bit.ly/SAKIPPusdatin>, dan <https://linktr.ee/HSDMAOK2025>.
2. Menyusun Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025;
3. Menyiapkan data capaian yang dihitung secara triwulanan dan tahunan 2025;
4. Menyusun Evaluasi Rencana Aksi Pusdatin TW I - IV tahun 2025;
5. Menyusun Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025 dan data dukungnya agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil review oleh Tim SAKIP Setjen;
6. Menyusun Laporan Tahunan Pusdatin Tahun 2025.
7. Menginput perencanaan dan hasil kinerja satuan kerja di aplikasi KINERJAKU triwulan I - IV tahun 2025;
8. Melakukan Dialog Kinerja Tahun 2025 melalui apel bersama dengan substansi yang dibahas yaitu pencapaian kinerja pada Tim Kerja Pusdatin;
9. Menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk monitoring kinerja individu.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menyusun Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2026;
2. Menyusun Manual IKU Pusdatin 2026;
3. Menyiapkan data capaian kinerja Pusdatin yang dihitung secara triwulanan I 2026;
4. Menyusun Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2026;
5. Menyusun Laporan Kinerja Pusdatin TW I Tahun 2026 dan data dukungnya agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil review oleh Tim SAKIP Setjen;



Gambar 36. Evaluasi Rencana Aksi TW IV 2025 dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025

3.3.15.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi dilaksanakan dengan Sumber Daya Manusia yang sudah mengerjakan pelaporan kinerja selama lebih dari 2 (dua) tahun dengan anggaran awal senilai Rp180.180.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp0,- atau 0% dikarenakan terdampak efisiensi anggaran. Dengan dukungan Sumber Daya Manusia pemangku jabatan fungsional Perencana, Pranata Komputer dan Pengadministrasi Perkantoran.

3.3.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan

3.3.16.1 Definisi Indikator Kinerja

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Data Statistik dan Informasi KP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan meliputi penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

3.3.16.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode semesteran. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dengan Nomor 3415/SJ.4/HK.160/X/2025 dengan perihal Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Triwulan III tanggal 20 Oktober 2025, Pusdatin telah menyelesaikan 1 (satu) Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2025. Keputusan Menteri tersebut dapat diakses melalui <https://jdih.kkp.go.id/>.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 50/SJ.4/TU.210/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, Pusdatin mendapatkan capaian sebesar 100%.

Tabel 46. Rincian Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Semester II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target Semester II		Capaian Semester II	
		Per/Kep	Persentase	Per/Kep	Persentase
1.	DITJEN PK	4	100%	4	100%
2.	DITJEN PT	3	100%	3	100%
3.	DITJEN PB	2	100%	2	100%
4.	DITJEN PDSPKP	2	100%	2	100%
5.	DITJEN PSDKP	1	100%	1	100%
6.	ITJEN	-	-	-	-
7.	BPPSDMKP	4	100%	4	100%
8.	BPPMHKP	3	100%	3	100%
9.	ROREN	2	100%	2	100%
10.	ROKEU-BMN	1	100%	1	100%
11.	ROSDMAO	2	100%	2	100%
12.	ROKUM	1	100%	1	100%
13.	ROHKLN	1	100%	1	100%
14.	ROUM-PBJ	1	100%	1	100%
15.	PUSDATIN	1	100%	1	100%

Tabel 47. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP Triwulan IV 2025

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Realisasi Semester II Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Semseter II 2025	Realisasi Semester II 2025	% Capaian Semester r II 2025	% Kenaikan Semester II 2024-2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029
-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100

Capaian diluar mekanisme program penyusunan sampai dengan Semester II Tahun 2025 yaitu Pusdatin telah melakukan penyusunan 1 (satu) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 8 (delapan) Keputusan Menteri tentang Tim, dan 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama dengan mitra.

3.3.16.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/SJ Tahun 2025 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/SJ Tahun 2025 tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL Nomor: 04/SJ/KKP/PKS/X/2025 dan Nomor: PKS/45/X/2025 tentang Sinergitas Data dan/atau Informasi Bidang Kelautan, Perikanan, Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi;



Gambar 37. Rapat Pembahasan PKS Setjen KKP dengan Pushidrosal TNI AL

5. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektor Kelautan dan Perikanan;

6. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Data dan Informasi dan Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Nomor: B.4227/SJ.8/KS.320/XII/2025 dan Nomor: 019.6/295 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Sektor Kelautan dan Perikanan;



Gambar 38. Rapat Pembahasan PKS Pusdatin KKP dengan Dinas Perikanan Jepara

7. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Data dan Informasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
8. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
9. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Data dan Informasi dan PT Pupuk Indonesia (Persero)

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menyiapkan rancangan Keputusan Menteri lingkup bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan berikutnya, salah satunya rancangan Keputusan Menteri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data; dan
2. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama berbagi pakai data antara lain dengan Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

3.3.16.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP melalui kegiatan Penyempurnaan Peraturan dan Perjanjian Kerja Sama Data, Statistik dan Informasi dengan sumber daya manusia yang sudah mengerjakan penyusunan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun lebih dan selalu berkoordinasi dengan Biro Hukum, Unit Eselon I, dan Unit Eselon II terkait, serta anggaran pagu awal senilai Rp345.450.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp11.795.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp11.707.300,- atau 99,26%. Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan ini adalah SDM lingkup Tata Usaha Pusdatin antara lain pengampu jabatan fungsional sebagai analis Sumber Daya Manusia, Pengadministrasi Perkantoran, dan Arsiparis, masih terdapat kekurangan kebutuhan yaitu Analis Hukum atau Perancang Undang- Undang dan Analis Kerja Sama.

3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin

3.3.17.1 Definisi Indikator Kinerja

Pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali/terkontrol, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit per semester setiap tahunnya. Teknik menghitung indikator ini yaitu:

1. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil *review* Itjen terhadap Laporan Keuangan (LK) Semester II tahun berjalan (dengan batas waktu penyelesaian bulan September) dan LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian bulan Februari n+1), baik jumlah kejadian maupun nilai uang;
2. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja setelah diterimanya CATATAN HASIL PEMERIKSAAN), baik jumlah kejadian maupun nilai uang; dan
3. Bobot jumlah kejadian dengan nilai uang adalah 50% : 50%.

3.3.17.2 Analisa Capaian

IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas dari 136/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal Pusdatin mendapatkan capaian sebesar 100%.

Tabel 48. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Pusdatin	-	-	-	100
7	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	0	100
8	BPISDKP	-	-	-	100
9	TP	-	-	-	100
Total		1.885.275.241	1.885.275.241	0	100

Tabel 49. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3.3.17.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menyiapkan data dukung dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK Tahun 2025;

2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan BPK, dengan melengkapi data dukung rekomendasi hasil audit;
3. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan sebagai Tim Tindak Lanjut Lingkup Sekretariat Jenderal;
4. Monitoring kegiatan penyelesaian temuan BPK lingkup Pusdatin tahun sebelumnya;
5. Peningkatan kepatuhan satuan kerja mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara *online*.



Gambar 39. Koordinasi Penyelesaian temuan BPK Tahun 2025 lingkup Pusdatin

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tim BPK;
2. Peningkatan kepatuhan satuan kerja mengirim laporan bulan dan monitoring secara tepat waktu secara *online*.

3.3.17.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK pada Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/Penatausahaan Keuangan/Penatausahaan BMN dengan anggaran revisi senilai Rp606.145.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp585.244.953,- atau 96,55%. Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan ini adalah SDM dengan jabatan fungsional sebagai Analis Pengelola Keuangan APBN, Perbendaharaan, dan Perencana,

Pengadministrasi Perkantoran, sedangkan untuk mendukung IKU ini masih terdapat kekurangan SDM dengan jabatan fungsional Penata Laksana Barang yang akan melakukan pencatatan Barang Milik Negara (BMN).

3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

3.3.18.1 Definisi Indikator Kinerja

Indeks profesionalitas (IP) ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Komponen IKU IP ASN terdiri dari:

1. **Kualifikasi (bobot 25%)** yaitu sesuai dengan pendidikan terakhir dari masing-masing pegawai:
2. **Kompetensi (bobot 40%)** terdiri dari:
 - a. Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
 - b. Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
 - c. Diklat 20 JP (Jam Pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana

semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;

d. Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

3. **Kinerja (bobot 30%)** merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 3600;

4. **Disiplin (bobot 5%)** mengambil dari hukuman disiplin apakah sudah diterima atau belum, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinnya.

Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) Tahun 2024 Kategori dalam Pengukuran IP ASN yaitu:

Tabel 50. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

- Kualifikasi bobot nilai 25:

Tabel 51. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi bobot nilai 40:

Tabel 52. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

- Kinerja bobot nilai 30:

Tabel 53. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- Disiplin bobot nilai 5:

Tabel 54. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

3.3.18.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin merupakan indikator yang dihitung dalam periode semesteran. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, Pusdatin mendapatkan capaian sebesar **87,85**, dengan rincian lingkup Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 55. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
11	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
	Total	21,71	34,47	26,18	5	88,37 (Tinggi)

Jika dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Semester II Tahun 2024 sebesar 90,13 (realisasi 106,04%), capaian tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,09% meskipun hasil capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan target kinerja pada tahun 2025, dari 85,00 pada semester II tahun 2024 menjadi 82,00 pada semester II tahun 2025.

Tabel 56. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Semester II 2025

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi Semester II Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Semester II 2025	Realisasi Semester II 2025	% Capaian Semester II 2025	% Kenaikan Semester II 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
83,47	85,36	85,79	90,50	90,13	82,00	87,85	107,13	1,09	82,00	107,13	84	104,58

3.3.18.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. ASN Pusdatin mengikuti pelatihan-pelatihan secara *daring* dan *luring* untuk meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin;



Gambar 40. Pelatihan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tematik Estimasi Karbon Biru Mangrove dan Lamun yang diselenggarakan oleh Geoaccess Indonesia

2. Pegawai Pusdatin mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
 - b. Badan Pusat Statistik (BPS) untuk jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi.
3. Memberikan motivasi tugas belajar/ijin belajar kepada pegawai Pusdatin;
4. beberapa pegawai Pusdatin yang mempersiapkan Uji Kompetensi Jenjang Ahli Madya, terlebih dahulu mengikuti Asesmen Manajerial dan Sosio Kultural (Mansoskul) pada Assesment Center terakreditasi A, seperti Assesment Center TNI AU, BPS, ataupun BIG;
5. Penertiban pengisian SKP;
6. Penertiban LHKPN/LHKSAN dengan sosialisasi dari Biro SDMAO;
7. Monitoring disiplin presensi pegawai lingkup Pusdatin.

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Memberikan informasi pelatihan/Bimtek dan seminar terkait dengan kompetensi pegawai lingkup Pusdatin baik secara daring atau luring secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;

2. Mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP dan Biro SDMAO;
3. Mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

3.3.18.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM (Sertifikasi) Bidang Data dan Informasi yang dilaksanakan oleh pengelola SDM dengan jabatan fungsional Analis SDM, Perencana, dan Pengadministrasi Perkantoran. Dan saat ini masih terdapat kekurangan jabatan fungsional Analis SDMA dan Organisasi. Anggaran yang digunakan senilai Rp849.100.000,- dan setelah efisiensi senilai Rp2.500.000,- sedangkan realisasi per 30 September 2025 senilai Rp2.500.000,- atau 100%.

3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

3.3.19.1 Definisi Indikator Kinerja

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusdatin merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satuan Kerja Pusdatin berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Sedangkan cara pengukurannya yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Satker Pusdatin yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 95% dari seluruh rekomendasi

yang diberikan kepada Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya.

3.3.19.2 Analisa Capaian

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin merupakan indikator yang dihitung dalam periode triwulanan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 103/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025, Pusdatin mendapatkan capaian sebesar 100% Berikut adalah capaian pada triwulan IV tahun 2025:

Tabel 57. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
7	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
8	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
Total		89	89	100%	0	0%

Tabel 43. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

Tabel 58. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin											
Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% Kenaikan TW IV 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
100	100	100	100	100	85	100	117,65	-	85	117,65	89	112,36

LAPORAN KINERJA

**TAHUN
2025**

PUSAT DATA & INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin Tahun 2025 telah melebihi target dikarenakan seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin telah dilaksanakan dari 7 (tujuh) rekomendasi telah dituntaskan seluruhnya. Jika dibandingkan dengan Biro lain Pusdatin mendapatkan nilai yang sama sebesar 100% dengan 8 (delapan) Biro/Badan/Lembaga lingkup Sekretariat Jenderal.

3.3.19.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan untuk penyelesaian dan tindak lanjut rekomendasi; dan
2. Memberikan data dukung rekomendasi dan saran hasil evaluasi/*review* dari Inspektorat Jenderal KKP.

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin pada triwulan selanjutnya.

3.3.19.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/Penatausahaan Keuangan/Penatausahaan BMN dengan anggaran revisi senilai Rp606.145.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp585.244.953,- atau 96,55%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukungnya adalah Jabatan Fungsional APK APBN, Pengelola Keuangan, Perencana, Pengadministrasi Perkantoran, dan Pranata Komputer.

3.3.20 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

3.3.20.1 Definisi Indikator Kinerja

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan capaian realisasi anggaran Pusdatin tahun 2025, dan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran Pusdatin tahun 2025.

3.3.20.2 Analisa Capaian

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan, namun berdasarkan pemantauan pada Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan realisasi Pusdatin s.d Triwulan IV tahun 2025 senilai Rp145.939.649.180,- atau mencapai 76,35% terhadap Pagu Anggaran sebelum ada pemblokiran dan pagu tambahan akhir tahun (Rp191.136.741.000,-) dan sebesar 99,93% terhadap pagu efektif (Rp147.087.602.000,-). Jika dibandingkan dengan persentase capaian terhadap target sebesar 95 pada tahun 2024 99,49% (104,73%) capaian tahun 2025 mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 0,46%

Tabel 59. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin											
Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
98,16	99,06	99,45	99,15	99,49	95	99,93	105,19	0,46	95	99,93	95	105,19

3.3.20.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;

2. Melakukan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu disampaikan kepada Bendahara Keuangan;
3. Melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Inovasi yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat proses administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3.3.20.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/Penatausahaan Keuangan/Penatausahaan BMN dengan anggaran revisi senilai Rp606.145.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2025 senilai Rp585.244.953,- atau 96,55%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukungnya adalah Jabatan Fungsional APK APBN, Pengelola Keuangan, Perencana, Pengadministrasi Perkantoran, Pranata Komputer, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya lingkup Pusdatin.

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan Pusdatin dengan DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp91,136,741,000,- (sebelum ada penambahan anggaran di akhir tahun) dengan adanya penambahan anggaran sesuai surat Sekretariat Negara nomor B-7/M/SDK/SA.01/11/2025 tanggal 6 November 2025 Perihal Tanggapan terhadap Permohonan Persetujuan Pembukaan Blokir Hasil Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 dan surat Setjen nomor B.1286/SJ/RC.420/XI/2025 tanggal 27 Nopember 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2025 dalam rangka Pembangunan

Reconnaissance Kampung Nelayan Merah Putih. [1] Pusdatin mendapatkan tambahan kegiatan Belanja Modal Lainnya dengan kegiatan Pembangunan Reconnaissance Kampung Nelayan Merah Putih dengan nilai Rp100.000.000.000,- sehingga pagu efektif menjadi senilai **Rp146.037.602.000,-**.

Terdapat 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dan Pengelolaan Data dan Informasi (2329). Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dengan 2 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Umum dan (2) Layanan Perkantoran

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (2329) masih menjadi kegiatan Teknis Pusdatin, dengan 4 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan; (2) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; dan (3) Sistem Informasi Pemerintahan; dan terdapat kegiatan Prioritas Nasional dengan Rincian Output (RO) yaitu (4) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kedua program tersebut masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen.

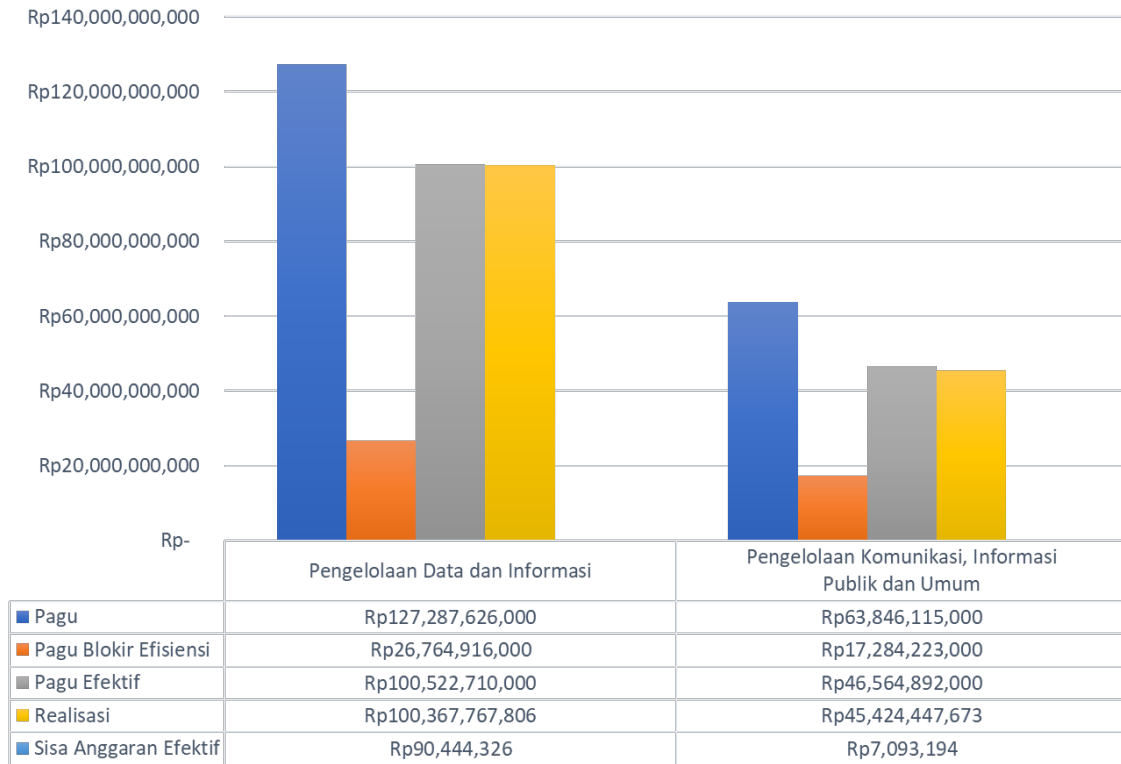
Untuk penjelasan lebih rinci, alokasi pagu dan realisasi anggaran Pusdatin sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 60. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Triwulan IV Tahun 2025

Rincian Output (RO)	Pagu (Rp)	Pagu Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran Efektif		Sisa Anggaran Efektif per 31 Desember 2025 (Rp)
				(Rp)	(%)	
Pengelolaan Data dan Informasi	127.287.626.000	26.764.916.000	100.522.710.000	100.367.767.806	99,99	90.444.326
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	63.846.115.000	17.284.223.000	46.564.892.000	45.424.447.673	99,84	7.093.194
TOTAL	191.136.741.000	44.049.139.000	147.087.602.000	147.087.602.000	99,93	97.952.820

Untuk total pagu Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp191.136.741.000,- sedangkan blokir efisiensi sampai akhir tahun senilai Rp44.049.136.000,- atau 23,05% dari total pagu Anggaran, sedangkan untuk pagu

efektif senilai Rp147.087.602.000,- dan realisasi akrual per 31 Desember 2025 senilai Rp145.939.649.180,- atau 99,93% adapun sisa pagu efektif senilai Rp97.952.280-.



Gambar 41. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Tahun 2025

BAB 4

PENGHARGAAN DAN KEGIATAN LAIN

Prestasi dan Penghargaan

1. Penghargaan Pusdatin sebagai Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Kementerian PANRB Tahun 2024 dengan Nomor: B.395/MEN-KP/III/2025.



Gambar 42. Penghargaan Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Kementerian PANRB Tahun 2024

2. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 oleh Ombudsman RI dengan predikat Kualitas Tertinggi Nilai 90,15 (Kategori Zona Hijau). Penghargaan ini sempat tertunda diberikan oleh Ombudsman RI karena adanya LHE pengawasan KKP yang belum tuntas pada Tahun 2024. Pada tanggal 30 April 2025, Ombudsman RI telah memberikan secara langsung kepada KKP dengan catatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dinyatakan telah tuntas.



Gambar 43. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 oleh Ombudsman RI

3. Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup KKP Tahun 2024 “atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” Nomor 615/SJ/TU.220/VI/2025 yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal kepada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) yang diserahkan pada tanggal 7 Juli 2025.



Gambar 44. Penyerahan Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup KKP Tahun 2024 oleh Sekretariat Jenderal KKP

4. Penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diberikan atas inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan IGT melalui Portal Data”. Portal Data Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan aplikasi resmi yang dapat diakses masyarakat untuk memperoleh data dan informasi seputar kelautan dan perikanan yang valid dan akurat. Inovasi Portal Data ini menjadi langkah penting KKP dalam memastikan informasi geospasial kelautan dan perikanan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi, terutama untuk perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat peran kementerian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.



Gambar 45. Piagam Penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2025

5. Penghargaan *Outstanding Public Service Innovations* (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor: B/1.77/PP.00 05/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025. Berdasarkan hasil sidang pleno Tim Panel Independen (TPI) dan Tim Evaluasi (TE) telah melakukan sidang pleno pada 8 Agustus 2025, telah ditetapkan *Outstanding Public Service Innovations* KIPP Tahun 2025 sejumlah 28 (dua puluh delapan) inovasi yang terdiri dari:
 - a. *Outstanding Public Service Innovations* Kelompok Umum: 25 (dua puluh lima) inovasi; dan
 - b. *Outstanding Public Service Innovations* Kelompok Replikasi: 3 (tiga) inovasi. sebanyak 3 inovasi dari 12 (dua belas) finalis top inovasi. Tiga inovasi peraih OPSI perlu disebarluaskan ke Organisasi Penyelenggara (OP) pelayanan publik atau instansi lain.



Gambar 46. Pengumuman Penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 oleh KEMENPANRB

Piagam penghargaan dari Kemenpan RB diberikan pada tanggal 17 Desember 2025 dalam kegiatan Penerimaan Penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 di ruang aula Kementerian PANRB.

BAB 5

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 2 (dua) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Berikut adalah capaian kinerja Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2025 berdasarkan aplikasi Kinerjaku dengan didukung oleh 76 Jabatan Fungsional lingkup Pusdatin dan 19 Jabatan Fungsional Umum:

1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin pada aplikasi Kinerjaku di Tahun 2025 adalah **106.84**.
2. Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang capaiannya dinilai pada tahun 2025, yaitu:
 - a. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (**Target: 91, Capaian: 98,46, Persentase Capaian: 108,20%**);
 - b. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (**Target: 3,50, Capaian: 4,41, Persentase Capaian: 126,00%**);
 - c. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (**Target: 77,00, Capaian: 98,52, Persentase Capaian: 127,95%**);
 - d. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (**Target: 3,20, Capaian: 3,99, Persentase Capaian: 124,69%**);
 - e. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (**Target: 77,00, Capaian: 82,54, Persentase Capaian: 107,19%**);

- f. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan **(Target: 90,00, Capaian: 100,00, Persentase Capaian: 111,11%);**
- g. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi **(Target: 100,00, Capaian: 100,00, Persentase Capaian: 100,00%);**
- h. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP **(Target: 2,00, Capaian: 2,07, Persentase Capaian: 103,50%);**
- i. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan **(Target: 64,68, Capaian: 83,69, Persentase Capaian: 129,39%);**
- j. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP **(Target: 3,00, Capaian: 3,00, Persentase Capaian: 100,00%);**
- k. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP **(Target: 2,70, Capaian: 2,73, Persentase Capaian: 101,11%);**
- l. Indeks Pelayanan Publik KKP **(Target: 4,60, Capaian: 4,80, Persentase Capaian: 104,35%);**
- m. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP **(Target: 88,87, Capaian: 90,15, Persentase Capaian: 101,44%);**
- n. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP **(Target: 89,60, Realisasi: 93,19, Persentase Capaian: 104,01%);**
- o. Nilai PM SAKIP Pusdan **(Target: 87,00, Capaian: 87,15, Persentase Capaian: 100,17%);**
- p. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan **(Target: 100,00, Capaian: 100,00, Persentase Capaian: 100,00%);**
- q. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin **(Target: 100,00, Capaian: 100,00, Persentase Capaian: 100,00%);**
- r. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin **(Target: 82,00, Capaian: 87,85, Persentase Capaian: 107,13%);**

- s. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin **(Target: 85,00, Capaian: 100,00, Persentase Capaian: 117,65%);**
 - t. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin **(Target: 95,00, Capaian: 99,93, Persentase Capaian: 105,19%);**
3. Total pagu Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp191.136.741.000,- sedangkan blokir efisiensi sampai akhir tahun senilai Rp44.049.136.000,- atau 23,05% dari total pagu Anggaran, sedangkan untuk pagu efektif senilai Rp147.087.602.000,- dan realisasi akrual per 31 Desember 2025 senilai Rp145.939.649.180,- atau 99,93% adapun sisa pagu efektif senilai Rp97.952.280-.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pusat Data dan Informasi pada periode-periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
2. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Monitoring pelaksanaan kegiatan per Kelompok Tim Kerja lingkup Pusdatin, melalui dialog kinerja setiap minggu sekali (pada hari Senin, pada saat apel pagi), agar dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Menyusun Rencana Aksi Tahun 2026 dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026 beserta bukti dukung hasil evaluasi rencana aksi;
5. Melaksanakan inovasi pada setiap indikator kinerja guna meningkatkan capaian indikator kinerja kedepannya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Pusdatin 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data, Statistik dan
Informasi


Rudy Heriyanto Adi Nugroho


Aulia Riza Farhan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Data, Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%)	91
		2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (%)	77
		4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2
		5 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77
		6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (%)	100
		8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3
		9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (%)	64,68
		10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7
		12 Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6
		13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87
		14 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6
2		15 Nilai PM SAKIP Pusdatin (nilai)	87

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik dan Informasi	16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (%)	100
	17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (%)	100
	18	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87
	19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (%)	85
	20	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (%)	95

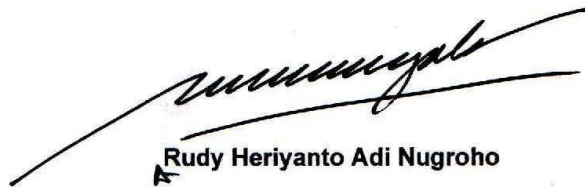
Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	Rp. 28.474.420.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	Rp. 67.675.001.000
Total Anggaran Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2025		Rp. 96. 149.421.000

Jakarta, 29 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Aulia Riza Farhan

Lembar Pengesahan	
Ketua Tim Kerja HSDMAOK	

Perjanjian Kinerja Pusdatin 2025 Revisi April



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Riza Farhan**
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data dan Informasi

Aulia Riza Farhan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%)	91
		2	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		3	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (%)	77
		4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2
		5	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77
		6	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		7	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (%)	100
		8	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3
		9	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (%)	64,68
		10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7
		12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6
		13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87
		14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup Pusat Data dan Informasi	15	Nilai PM SAKIP Pusdatin (nilai)	87
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (%)	100
		17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (%)	100
		18	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87
		19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (%)	85
		20	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (%)	95

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Data dan Informasi	28.474.420.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	67.675.001.000
Total Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun 2025		96.149.421.000

Jakarta, 7 April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data dan Informasi



Aulia Riza Farhan

Perjanjian Kinerja Pusdatin 2025 Revisi Desember



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data dan Informasi



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Aulia Riza Farhan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%)	91
		2	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		3	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (%)	77
		4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2
		5	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77
		6	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		7	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
		8	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2
		9	Tingkat Maturitas Satu Data KP (%)	64,68
		10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7
		12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6
		13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87
		14	Survei Kepuasan Masyarakat KKP (nilai)	89,6
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data dan Informasi	15	Nilai PM SAKIP Pusdatin (nilai)	87
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan (%)	100
		17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusdatin (%)	100
		18	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	82
		19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (%)	85
		20	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	110.522.710.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	45.814.892.000
Total Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun 2025		156.337.602.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data dan Informasi



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Aulia Riza Farhan

Lampiran Dokumen Pendukung

Tabel 61. Lampiran Dokumen Pendukung pada Rencana Aksi Pusdatin TW IV 2025

No.	Dokumen	Bukti Link
1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/1STKE88I37luPgmO-NoDFDygTfxitNCIX
2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	https://drive.google.com/drive/folders/1KumNAoBCY3o1oaoVP86q99_OiuUMaz6p
3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	https://drive.google.com/drive/folders/19bh-js1FfSL3mVZl2Gxe-9kY14TaQXid?usp=drive_link
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	https://drive.google.com/drive/folders/11vx0SaT-OTqDq0RMop4gmegqKJev_ZcQ?usp=drive_link
5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1LSrIntCmsK7ecYiWu9uquGqAD2GJTcE6?usp=drive_link
6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/1huBbAHx0DoYCTb8j6xRDOagbYaN5M6B?usp=drive_link
7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	https://drive.google.com/drive/folders/1UAVxQP8Am_VWVQ4Fm2S0jNWsCMCwoSRf?usp=drive_link
8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1YpiF6zMk2W6oBcbO_dH7jj1wAnhltNC5?usp=drive_link https://portal-repo.kkp.go.id/s/LKJKITI-TW3 https://portal-repo.kkp.go.id/s/LKJKITI-TWIV
9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/1Rpw9vfHfOG_ISO1ivKC6vVnovZEkkYXb?usp=drive_link
10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1BP6mob35MZDY92feYX0cpBwnX-1oMKkq?usp=drive_link
11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1SrOC2AihV66NT-pkZCpYxe6ArC5jMWgO?usp=drive_link
12.	Indeks Pelayanan Publik KKP	https://drive.google.com/drive/folders/12EU2c3r_8sZjrDwC8i11Euq7Czfv3AF?usp=drive_link
13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1mhGIS2IAbhHPhoIrxkDhq3ZUuOwer5X?usp=drive_link
14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	https://drive.google.com/drive/folders/1ZzZkcyoFVWdBnzmyriAzQ6Y6DKHfZOrW?usp=drive_link
15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	https://drive.google.com/drive/folders/1syxsloE1D8INwlgMRbXJwSpZKhELg_OU?usp=drive_link

No.	Dokumen	Bukti Link
16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/19o1A9c50vxk7rJ8TRlElkCXkkQyLnDge?usp=drive_link
17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1Y4KCN-TjHCe277g621gdRF5_70YntVFv?usp=drive_link
18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1RCA0R0UF6X9S0FzmzD-WfZA3NUDaYp-n?usp=drive_link
19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/14ZUVRG4bvzKfAfBZFc6xHI0EQ_4BLLkd?usp=drive_link
20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1n0TsYkwqcXPGaMA2xFzE_xWpJsEdWExi?usp=drive_link



PUSAT DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN